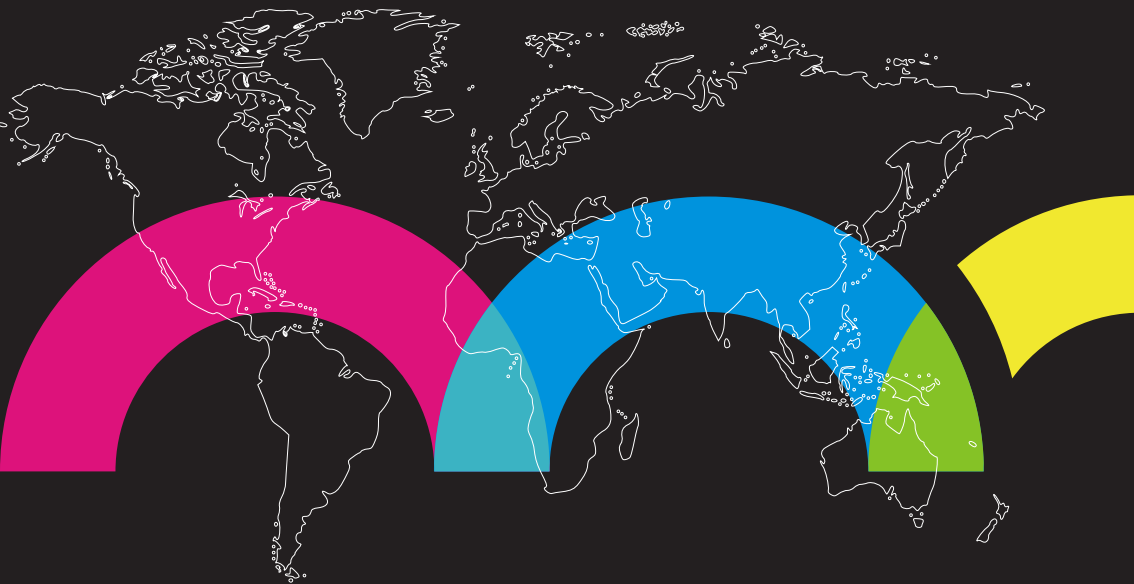


# GELOMBANG KETIGA INDONESIA



---

ANIS MATTA

# **Gelombang Ketiga Indonesia**

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Gelombang Ketiga Indonesia**

## **Peta Jalan Menuju Masa Depan**

**Anis Matta**



The **Future Institute**

**Gelombang Ketiga Indonesia:**  
Peta Jalan Menuju Masa Depan

© 2014, M. Anis Matta

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh  
Penerbit Sierra bekerja sama dengan The Future Institute, Maret 2014.

The Future Institute  
Jl. Dukuh Patra V No. 48 Parta Residen Kuningan  
Jakarta 12870 Indonesia

Penyunting: Dadi Krismatono  
Perancang grafis: Andunk Bayumurti  
Desain sampul: @oom\_ipin

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 987-602-14111-1-7

Cetakan I, Maret 2014

# Daftar Isi

Prolog	1
Memahami Sejarah sebagai Gelombang	15
Menjadi Indonesia	23
Menjadi Negara-Bangsa Modern	41
Gelombang Ketiga	71
Peta Jalan Menuju Masa Depan	93
Epilog	111
Pustaka	117
Ucapan Terima Kasih	119
Tentang Penulis	121
Indeks	123

## **Buku-Buku Anis Matta**

Membentuk Karakter Cara Islam (2003)

Mencari Pahlawan Indonesia (2004)

Dari Gerakan Menuju Negara (2006)

Integrasi Politik dan Dakwah (2007)

Serial Cinta (2008)

Delapan Mata Air Kecemerlangan (2009)

# Prolog

Setiap buku punya ceritanya masing-masing. Bukan saja soal cerita yang dibahas di dalam buku itu, namun cerita “di balik layar”—tentang inspirasi, motivasi atau proses pergulatannya. Buku ini bisa dibilang merupakan catatan perenungan, kegelisahan, ketegangan bahkan perbenturan saya sepanjang perjalanan saya menjadi aktivis dakwah yang kemudian masuk ke dunia politik.

Saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pernah tinggal di Tual, Maluku Tenggara, ketika masa kanak-kanak, “mondok” di pesantren di Makassar dan hijrah ke Jakarta untuk kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta, pada 1986. Pada hari-hari pertama kuliah saya berkenalan dengan teman-teman baru. Ada seorang teman dari Pulau Jawa bertanya, “Mas Anis dari Makassar, ya? Makassar itu berapa jam naik kereta dari Jakarta?”

Hari ini boleh kita tertawa dengan kisah jenaka itu. Tapi itu betul terjadi. Apalagi dalam konteks tahun 1980-an ketika informasi belum semelimpah sekarang dan pelajaran geografi tidak dirancang untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Bagaimana mungkin



membayangkan luasnya Indonesia, jika tak bisa membayangkan berapa jauhnya Makassar dari Jakarta?

Itulah Indonesia. Anugerah Allah yang membentang luas dan bisa mengaburkan dimensi kita tentang ruang dan waktu. Mudah-mudahan hari ini, tidak ada mahasiswa yang bertanya butuh berapa jam naik kereta dari Jakarta ke Makassar.

LIPIA adalah lembaga pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Lembaga ini merupakan filial dari Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Selain di Indonesia, kampusnya ada di Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Afrika. Mahasiswanya kebanyakan adalah lulusan pesantren dari seluruh Indonesia. Dalam sejarahnya, pesantren kerap menjadi isolasi sosial agama dari lingkungan sekitarnya. Dengan semangat penyucian dan pencarian keheningan, kebanyakan pesantren berada di pinggiran kota. Pesantren seperti orang yang berpaling dan lari dari kerumunan karena merasa tidak nyaman dengan suatu keramaian. Pesantren menyingkir ke pinggiran kota karena kota dalah tempatnya hawa nafsu dan kekotoran.

Itulah ketegangan Islam dan modernitas yang tercermin dalam “politik ruang” pesantren. Ia sengaja menjaga jarak dengan realitas sekeliling seperti orang berbaju bersih yang enggan ke pasar becek karena khawatir terciprat lumpur.

Itu juga yang saya rasakan dalam pergaulan saya dengan teman-teman di LIPIA. Pengetahuan keagamaan yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan wawasan tentang Indonesia. Dari saat itu saya mulai tergelitik dengan jarak yang menganga antara identitas keislaman dan keindonesiaan yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia.

Mungkin karena terinspirasi pengalaman singkat itu, saya lalu terlibat dalam pergulatan intelektual dalam memahami Indonesia. Dari

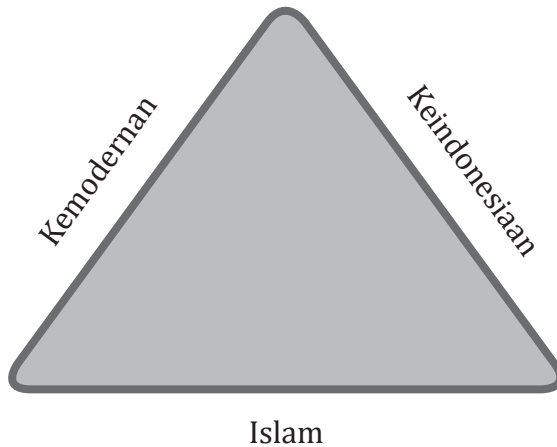
situ saya mencoba memahami Indonesia melalui dua hal: geografi dan sejarah.

Belajar geografi saya lakukan melalui membaca buku dan mengunjungi banyak tempat di Indonesia. Bahkan ketika masih kuliah dan uang pas-pasan, saya mengusahakan jalan-jalan naik kereta api ke beberapa kota di Pulau Jawa. Jika mengantuk saya tidur di kolong bangku beralas koran, ketika lapar saya makan nasi bungkus dari penjual asongan. Yang paling membekas adalah ketika saya duduk di pintu gerbong paling belakang sambil mengongkang-ongkang kaki.

Sejak saat itu saya percaya Indonesia yang begitu besar ini membutuhkan “otak besar” untuk memahaminya. Kita patut mensyukuri kemajuan kualitas pendidikan kita tapi kita juga membutuhkan banyak perspektif lebih besar dalam melihat realitas keindonesiaan yang melampaui rutinitas keseharian, apalagi di dunia politik.

Saya mempelajari sejarah dengan membaca buku dan mendengarkan cerita dari para pelaku yang bisa saya jangkau. Cerita sejarah Indonesia adalah cerita pergulatan pemikiran tentang identitas keindonesiaan. Itulah mengapa saya terdorong menulis penelitian kecil tentang pemikiran Nurcholish Madjid alias Cak Nur dalam bahasa Arab ketika masih kuliah di LIPIA. Sayang sekali penelitian kecil tersebut tidak ada dokumentasinya sekarang. Pada saat itu saya menikmati betul pergulatan pemikiran Cak Nur yang coba membedah tiga hal, yaitu keindonesiaan, keislaman dan kemodernan dalam situasi umat Islam di Indonesia saat itu.

Saya masuk LIPIA tahun 1986, ketika ketegangan Islam dan negara bisa dibilang berada pada puncaknya. Persitiwa Tanjung Priok belum lama terjadi dan asas tunggal mulai diterapkan. Sebagai anak kampung berusia 18 tahun yang baru masuk Jakarta, sayup-sayup saya merasakan ketegangan itu dalam diskusi-diskusi.



Ternyata saya kemudian terlibat dalam perang segitiga itu, ketika menjadi aktivis dakwah dan memutuskan masuk politik sebagai bagian dari jalan dakwah saya. Saya bergabung dengan gerakan tarbiyah sejak sekitar 1986. Memasuki era 1990-an, dilema Islam dan kemodernan sudah menemukan kesimpulannya dengan terbentuknya kelas menengah muslim, yang sering disebut sebagai “santri kota”, dengan ekspresi keislaman yang khas. Salah satu monumen evolusi kelas menengah Islam kota adalah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai agregasi aspirasi pada 1990-an. Memang banyak interpretasi terhadap berdirinya ICMI; apakah murni sebagai refleksi lahirnya kelas menengah Muslim, atau malah merupakan kooptasi rezim terhadap potensi yang baru mekar.

Selain itu ada beberapa peristiwa simbolik yang dirasakan sebagai angin sejuk hubungan Islam dan negara, khususnya dengan Presiden Soeharto. Misalnya, ibadah haji yang dilaksanakan keluarga Cendana yang diikuti pemberian imbuhan Haji Muhammad pada nama Pak Harto. Namun, ternyata masih banyak yang belum tuntas, ketika

kita mendiskusikan tarik-menarik antara identitas keislaman dan keindonesiaan.

Akhir 1980-an hingga memasuki 1990-an dunia menyaksikan runtuhnya komunisme. Tembok Berlin dihancurkan, Uni Soviet bubar, Yugoslavia pecah melalui proses yang berdarah hingga menimbulkan krisis kemanusiaan di Bosnia. Runtuhnya komunisme diikuti oleh proses demokratisasi global. Partai Islam di beberapa negara menang pemilu atau meraih suara cukup besar, seperti FIS (*Front Islamique du Salut*) di Aljazair dan Al-Nahda di Tunisia. Pada 1994, saya bersama beberapa sahabat mengkajinya lewat sebuah kelompok studi bernama Studi Informasi Dunia Islam Kontemporer (SIDIK). Bersama Abu Ridho, Mashadi, Al Muzzamil Yusuf, Abu Bakar Al Habsy, Achmad Rilyadi dan teman-teman lainnya, kami mengkaji perkembangan dunia Islam pada umumnya dengan fokus pada Indonesia. Yang paling berkesan adalah kelas kajian politik bersama almarhum Deliar Noer.

Bisa dibilang kajian dan advokasi dunia Islam ini juga menjadi pintu bagi saya dan teman-teman memasuki ranah politik. Ketika rezim Orde Baru berada di puncak kekuatannya dan kekuatan Islam ditekan, isu solidaritas dunia Islam—seperti Palestina, Bosnia atau Perang Teluk—mampu memecah kekosongan aspirasi serta menyediakan katarsis identitas politik sebagai orang Islam. Dalam sebuah aksi solidaritas di Masjid Al Azhar, Jakarta, sejumlah pelajar melepas jam tangannya untuk disumbangkan karena hanya itu harta yang mereka punya.

Lewat serangkaian diskusi dan kajian itu, kami mencoba memprediksi skenario demokratisasi di Indonesia dan bagaimana komunitas dakwah berperan ketika proses itu terjadi: berperan mendorong demokratisasi dan berperan mengisi ketika bangunan demokrasi mulai terbentuk. Salah satu diskusi penting kami laksanakan tak lama setelah pelaksanaan pemilu 1997. Pada waktu itu kami berhipotesis bahwa Presiden Soeharto

akan berkuasa hingga 2002 sambil menyiapkan seorang wakil untuk mengawal transisi yang mulus bagi kepentingan Pak Harto. Sang “putra mahkota” ini akan berkuasa satu periode dan proses demokratisasi mulai berjalan sejak 2007. Kami memprediksikan bahwa komunitas dakwah baru akan membutuhkan partai politik pada 2010. Namun semua proses itu dipercepat oleh krisis moneter 1997 yang mengakibatkan bergulirnya gerakan Reformasi 1998.

Pada 1998 itu saya terlibat dalam perdebatan, apakah gerakan dakwah sudah waktunya mendirikan partai politik? Inilah dilema antara kesiapan dan kesempatan: ambil peluang sekarang sambil tertatih-tatih membangun diri, atau menyiapkan diri untuk mengambil momentum kedua. Pertanyaannya, siapa yang menjamin akan ada momentum kedua?

Ketika diadakan voting, saya bersama antara lain Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid termasuk yang tidak setuju pendirian partai. Kami berpendapat sebaiknya komunitas dakwah membenahi diri terlebih dahulu sebelum memasuki ranah politik. Pemungutan suara dimenangkan oleh dukungan terhadap pendirian partai politik. Yang menarik, kami yang tidak setuju pendirian partai malah dipilih menjadi pimpinan partai yang baru lahir itu.

Saya menjadi sekretaris jenderal Partai Keadilan yang bersiap-siap ikut pemilu demokratis pertama pasca-Reformasi pada 1999. Banjir kebebasan ternyata juga menghasilkan revivalisme identitas politik. “Politik aliran” yang diredam Orde Baru mencoba hidup lagi. Nama-nama parpol pada pemilu 1955—seperti Masyumi, PNI, Syarikat Islam, Murba—melekat pada nama-nama partai yang berdiri saat itu. Tak jarang, satu identitas—seperti Masyumi atau PNI—digunakan oleh lebih dari satu partai politik dengan atribut yang lebih spesifik lagi, seperti PNI-Supeni atau PNI Front Marhaenis.

Dalam era itu pula saya menyaksikan jatuh-bangunnya pemerintahan demi pemerintahan. PDI Perjuangan menang pemilu 1999 dengan perolehan suara sebesar 34%. Golkar yang dihujat selama Reformasi, bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh mahasiswa, ternyata menjadi pemenang kedua dengan perolehan 22%. Inilah kontradiksi: Golkar sebagai tulang punggung Orde Baru dicap “bersalah” dan menjadi “terdakwa” di era Reformasi namun berhasil meraih suara yang signifikan dalam pemilu yang berlangsung demokratis.

Sejumlah suara menyatakan sebaiknya pemenang pemilu segera ditetapkan sebagai presiden (dalam hal ini Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan). Namun, konstitusi mensyaratkan pemilihan presiden dilakukan di dalam Sidang Umum MPR. Presiden Habibie dianggap membuat blunder dengan keputusannya memberikan kesempatan referendum bagi Timor Timur sehingga menimbulkan ketegangan hubungan dengan militer. Habibie dan Golkar harus menerima kenyataan pahit ditolakny laporan pertanggungjawaban presiden. Menyikapi perkembangan itu, Habibie menunjukkan sikap ksatria dengan menyatakan bahwa dia sudah tidak lagi memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Penerobos kebuntuan itu adalah dibentuknya “Poros Tengah” yang dipimpin oleh Amien Rais. Setelah melalui proses yang alot, koalisi ini mencalonkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden dan menang dalam voting. Gus Dur menunjukkan kualitasnya sebagai seorang negarawan dengan segera menyatakan bahwa Megawati dan pendukungnya harus dihormati dan siap bekerja sama dengan Megawati yang menjadi wakil presiden.

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama. Gus Dur hanya memerintah selama 21 bulan, sedikit lebih

panjang dari usia pemerintahan Habibie sepanjang 18 bulan. Kemudian Megawati diangkat sebagai presiden pada 2001.

Tahun-tahun awal Reformasi itu berlangsung begitu bising dan tegang. Tak jarang ketegangan itu menimbulkan jatuh korban, seperti pada Peristiwa Semanggi. Indonesia sedang mencari keseimbangan baru. Ignas Kleden membuat perumpamaan, gelombang kebebasan politik membuat kita seperti “OKB” (orang kaya baru) yang tiba-tiba punya uang banyak tapi tidak tahu bagaimana membelanjakannya. LSM, ormas dan surat kabar lahir hampir setiap hari dengan agenda dan kepentingannya masing-masing. Pakar-pakar dari kampus yang sebelumnya berdiam di menara gading terlibat dalam berbagai usaha demokratisasi, seperti menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga-lembaga lainnya.

Seiring waktu berjalan, dilema keindonesiaan, keislaman dan kemodernan belum juga selesai. Konflik berdarah di Ambon, Poso atau Sampit, misalnya, sungguh mengoyak rajutan kesatuan dan meninggalkan luka yang dalam. Konflik di Aceh dan Papua masih saja membara. Kebijakan otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi mahasiswa secara perlahan belakangan mulai mampu meredam dan mengembalikan kepercayaan kepada payung keindonesiaan.

Pemilu 2004 dan 2009 adalah catatan penting bagi kelompok “Islam politik” karena perolehan suara partai politik Islam—yang merupakan cermin legitimasinya—terus menurun. Yang saya maksud partai Islam di sini adalah partai secara eksplisit menyebutkan Islam sebagai asas atau landasan idealnya. Pada pemilu 2004, Partai Golkar menjadi pemenang dengan perolehan 21,62%, sementara total perolehan partai Islam yang melampaui ambang batas sehingga memiliki kursi di DPR RI, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai

Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), mencapai 20,58%. Kondisi lebih buruk terjadi pada pemilu 2009. Partai Demokrat unggul dengan raihan suara 20,81% sementara total suara partai Islam turun menjadi 13,22%. PBB dan PBR tidak melampaui *electoral threshold* sehingga tidak dapat mengirimkan wakilnya di Senayan. Partai Islam dengan perolehan suara terbesar pada 2004 adalah PPP dengan 8,16% dan kemudian PKS pada 2009 dengan 7,89%.<sup>1</sup>

Ada apa dengan umat Islam? Apakah perjalanan waktu selama lima tahun langsung menghapus ekspresi politik aliran yang sempat meletup pada pemilu 1999? Kemana mereka yang getol menyuarakan identitas simbolik mereka sebagai “Islam politik”?

Yang menarik, pada saat yang sama kita menyaksikan masyarakat Indonesia yang cenderung makin religius dan makin percaya diri menunjukkan ekspresi keislaman mereka. Jadi, yang terjadi adalah suatu anomali: masyarakat makin religius namun religiositas tersebut tidak berkorelasi langsung dengan pilihan partai politik.

Saya menyaksikan ini dari jarak dekat. Sebagai sekjen partai saya membaca survei demi survei, dinamika yang ada di pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai tempat dan tingkatan, juga pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden di tingkat nasional.

Sebagai sekjen partai Islam yang “baru”, yang relatif tidak terpaut dengan blok-blok Islam politik lama, seperti Masyumi atau yang lainnya, saya juga harus menghadapi skeptisisme, sinisme bahkan kecurigaan dari banyak pihak. *‘Benarkah PKS ini Indonesia? Apa benar ustadz-ustadz dan guru ngaji ini mengerti politik?’* Sejumlah pertanyaan itu yang memicu perenungan saya tentang perlunya rekonstruksi gagasan dan narasi keindonesiaan.

---

<sup>1</sup>Sumber: [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf)



Jarak antara keislaman dan keindonesiaan sebagian terbentuk oleh ketegangan relasi antara agama dan negara, baik di tingkat negara-bangsa Indonesia, maupun di tingkat global. Islam dan Indonesia seolah terpisah dan umat Islam seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Inilah jarak yang perlu diseberangi dan dijumpai melalui dialog terbuka dan pertukaran karya pemikiran.

Bagaimanapun, saya yakin ketegangan itu tidak akan sampai menafikan keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang dilahirkan oleh pilihan dan cita-cita. Kita ingat, para penghuni nusantara pada waktu itu bisa saja memilih untuk tetap menjadi bangsa Jawa, bangsa Celebes, bangsa Ambon, dan kemudian mendirikan negara atas klaim etnisitas tersebut. Tetapi sejarah Indonesia berkata lain. Para pencetus Sumpah Pemuda 1928 memutuskan untuk melampaui kelokalan masing-masing, memilih satu identitas yang mentransendensi ikatan akar primordial, dan merumuskan suatu imajinasi sosiologis yang bernama “bangsa Indonesia”. Mereka bukan mencari klaim tentang pilihan itu, melainkan sedang merancang nasib sendiri, menentukan peta jalan sejarah hidupnya sendiri, bahwa pada hari itu telah lahir sebuah bangsa baru bernama Indonesia.

Tak heran jika lahirnya Indonesia bisa kita anggap sebagai sumbangsih bagi kemajuan peradaban dunia. Indonesia adalah satu dari sedikit negara-bangsa yang lahir dari gagasan politik, jauh melampaui klaim-klaim primordialnya. Hampir sama dengan “bangsa Amerika”, yang merupakan kesepakatan dari orang-orang dari beragam etnis yang tinggal di tanah yang kini bernama Amerika Serikat. Berdirinya Indonesia adalah suatu model unik terbentuknya negara-bangsa dalam perjalanan sejarah dunia.

Usia Indonesia sebagai negara-bangsa masih relatif muda tetapi ia telah melewati beberapa ujian eksistensialnya. Pemberontakan,

konflik elite dan keresahan sosial sempat mengguncang sendi-sendi bernegara dan mengoyak rajutan benang kebangsaan kita. Tapi kita telah memutuskan, untuk meneruskan perhimpunan dan kontrak sosial kita di bawah naungan Indonesia. Mungkin esok tanah ini tak lagi subur, dan airnya mengering dihisap pemanasan global, tapi ia tetap tanah air kita, negara-bangsa tempat kita menemukan jati diri dan makna hidup kita sebagai manusia di muka bumi Allah SWT.

Secara umum, perolehan suara partai nasionalis juga mengalami penurunan. Banyak partai nasionalis tidak lolos ambang batas sejak 1999 namun juga tidak berhimpun kepada PDI Perjuangan sebagai representasi ideologi nasionalis terbesar. Pemilu 2009 bisa kita catat sebagai titik berakhirnya politik aliran. Di luar sana, masyarakat membicarakan hal lain yang membuat politik aliran tidak relevan. Generasi baru juga telah lahir. Mereka tidak terpaut dengan narasi dan konflik politik aliran. Perkembangan ini telah membuat tantangan terbesar yang sama-sama dihadapi oleh partai nasionalis dan partai Islam adalah irelevansi. Ketidakterpautan (*detachment*) antara politik dan masyarakat ini juga yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kekosongan narasi ini bahkan telah memicu rasa kehilangan arah (*sense of direction*) dan orientasi.

Di tengah dilema dan kegalauan itu, saya tetap ingin mengajak publik optimis melihat masa depan Indonesia. Saya tidak ingin menjual kecemasan, walau masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Indonesia bukan lagi negara yang teramat miskin dan porak-poranda. Secara umum kita sudah menyelesaikan sebagian besar masalah kebutuhan hidup yang layak bagi rakyat kita. Tentu semua pihak harus tetap bekerja keras menghapus kemiskinan agar tujuan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat tercapai. Namun, kita tidak perlu terjebak dalam gambaran muram yang terlalu didramatisir. Bagi saya, Indonesia adalah negara

menengah yang harus berbenah agar bisa melompat ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan lompatan itu, kita akan lebih sejahtera dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas lagi.

Buku ini merupakan kumpulan catatan dan renungan yang mulanya terserak di berbagai tempat. Sebagai sekjen partai selama 15 tahun, saya larut dalam kesibukan mengurus “dapur” partai. Fokus saya dan para pimpinan lainnya adalah membangun kapasitas organisasi sebagai partai politik modern. Dalam masa itu juga saya menghindari jabatan publik yang bisa mengalihkan fokus ini. Walaupun saya telah menjadi anggota DPR RI sejak 2004, namun fokus ini tetap menjadi perhatian saya dalam kerja internal partai.

*Alhamdulillah*, di tahun yang penuh cobaan bagi partai kami ini, saya dapat mengompilasi catatan perenungan saya menjadi satu jahitan gagasan yang relatif utuh dan siap didiskusikan secara terbuka di hadapan pembaca sekalian.

Buku ini adalah bagaimana saya membaca sejarah. Saya tidak berpretensi menulis sejarah Indonesia. Saya hanya menawarkan pembacaan saya tentang dari mana kita berjalan, sekarang ada di mana, dan mau ke mana kita berjalan setelah dari tempat kita berpijak sekarang.

Buku ini mudah-mudahan menjadi awal dari sebuah trilogi yang membahas perjalanan Indonesia sebagai bangsa. Buku pertama ini akan membahas visi dan cara membaca realitas keindonesiaan hari ini. Pada buku ini saya menawarkan cara melakukan periodisasi sejarah Indonesia ke dalam tiga gelombang. Hari ini kita memasuki gelombang ketiga sejarah Indonesia dengan faktor pembentuk nilai, lingkungan yang mempengaruhi serta karakter masyarakat yang berbeda dari gelombang-gelombang sejarah sebelumnya.

Buku selanjutnya akan membahas agenda yang harus dijalankan dalam mencapai tujuan kesejahteraan Indonesia dalam lanskap

sosial-politik di gelombang ketiga tersebut. Masyarakat yang makin berdaya dan cerdas, seiring dengan makin menisbinya hirarki dan otoritas negara, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh negara dan lembaga politik lainnya. Yang paling penting, bagaimana kita merumuskan agenda agar Indonesia yang sekarang berukuran menengah di bidang sosial, ekonomi dan pengaruh politik internasional ini dapat melakukan lompatan menjadi negara yang lebih maju, makmur dan ikut menentukan percaturan dunia.

Setelah kita menyepakati agenda transformasi Indonesia ke depan, kita perlu mendiskusikan strategi dan pendekatan manajemen dalam mewujudkan agenda tersebut. Tujuan kita berbangsa tetap sama, tetapi cara mewujudkannya menjadi jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Pendekatan dan strategi ini yang akan dituangkan dalam buku ketiga sekaligus sebagai pamungkas dari trilogi Indonesia.

Keseluruhan buku ini merupakan interpretasi saya terhadap perjalanan politik kita sebagai suatu entitas bernama bangsa; suatu cara membaca sejarah untuk meyakini masa depan Indonesia. Begitu banyak pelajaran dapat kita reguk dari mata air sejarah untuk memberi kita energi mengarungi hari ini dan hari depan yang penuh ketidakpastian. Membaca sejarah bukan ajakan untuk lari ke masa lalu, melainkan undangan untuk menyongsong masa depan dengan senyuman.

Selamat membaca.

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Anis Matta



# Memahami Sejarah sebagai Gelombang

## Mengapa Harus Sejarah?

**M**enulis politik di Indonesia adalah sebuah tantangan tersendiri. Tulisan politik dengan mudah dibagi menjadi dua: analisis para pengamat yang dingin dan berjarak, atau pamflet kampanye yang ditulis oleh politisi yang sedang “jual kecap”.

Sebenarnya kita mengenal banyak karya tulis politik berupa curahan gagasan yang mendalam, filosofis dan bernilai intelektual tinggi. Namun makin hari, ruang untuk melakukan elaborasi gagasan yang mendalam di ruang politik semakin sulit. Media lebih gemar mempertontonkan perdebatan isu aktual dan persaingan *sound byte* dalam durasi atau ruang yang sangat pendek. Politisi pun lebih sering menggunakan iklan yang berangkat dari strategi “pencitraan”. Artinya, yang ia kirimkan adalah citra yang ingin dibangun ke dalam benak khalayak. Kerap kali citra yang dibangun itu seperti sayap kupu-kupu yang indah dipandang namun rapuh dan luruh ketika disentuh. Buku ini ingin menghadirkan kembali elaborasi pemikiran politik yang lebih dalam dari *talk show* di TV, kutipan singkat di portal berita, atau kicauan di Twitter.

Sejarah selalu mencakup tiga hal: kronologi, biografi dan mitos. Melalui kronologi kita bisa mempelajari pertatutan antara peristiwa yang satu dengan yang lain, dan memahami betapa perubahan tidaklah berlangsung di ruang vakum. Biografi memberi pelajaran tentang manusia sebagai subyek aktif sejarah. Saya tidak ingin mendebat determinisme sejarah Marxis yang menyimpulkan bahwa gerak sejarah manusia melulu disebabkan oleh pertentangan kelas. Saya hanya merasa lebih bisa memetik pelajaran ketika melihat manusia sebagai subyek yang aktif dan mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Manusia melakukan perubahan, menciptakan penemuan, menghasilkan kesejahteraan, karena dia aktif bertindak dan tidak bersikap “pasrah” terhadap tempatnya di dalam gerak sejarah. Terakhir, mitos adalah pengetahuan awal yang perlu diuji oleh waktu agar terbukti kebenaran atau kesalahannya. Ketiga aspek dalam sejarah ini bisa kita jadikan landasan untuk bertindak di masa depan.

### **Mengapa saya menulis dengan perspektif sejarah?**

Saya menulis dengan perspektif sejarah dalam buku pertama ini karena ketika kita melihat dalam satuan waktu yang besar, realitas yang terangkum juga semakin luas. Kita dapat menggunakan pendekatan holistik dan bukan semata diagnostik dalam memahami realitas Indonesia sebagai negara yang besar dengan struktur sosial yang kompleks.

Jika melihat rentang sejarah, kita akan mempelajari bahwa dinamika perubahan sosial merupakan interaksi dari empat elemen utama: manusia, ide, ruang dan waktu. Manusia adalah pusat dari perubahan karena ia adalah pelaku atau aktor dimana ruang dan waktu merupakan panggung pertunjukannya. Ide menjadi penggerak manusia dalam seluruh ruang dan waktunya. Setiap kali ada perubahan yang penting dalam ide-ide manusia, maka kita akan menyaksikan perubahan besar dalam masyarakat mengikutinya.

Perubahan sosial di dalam sejarah merupakan interaksi empat elemen: Manusia, Ide, Ruang dan Waktu.

Manusia bergerak dalam ruang dan waktu secara dialektis, antara tantangan dan respon terhadap tantangan tersebut. Ide atau gagasan yang memenuhi benak manusia merupakan manifestasi dari dinamika dialektis itu. Hidup manusia bergerak dan terus bertumbuh karena ia merespon tantangan di sekelilingnya. Hasil dari respon baru itu selanjutnya melahirkan tantangan-tantangan baru yang menuntut respon-respon baru. Begitu seterusnya.

Dalam persepektif itulah, politik bertemu dengan sejarah. Sejarah adalah cerita tentang manusia di tengah seluruh ruangnya dalam rentang waktu yang panjang. Sejarah adalah cerita tentang tiga orang, yaitu: orang yang sudah meninggal, orang yang masih/ sedang hidup, dan orang yang akan lahir. Jika politik ingin memahami drama perubahan sosial secara komprehensif, maka politik harus memahami cerita tentang ketiga orang itu. Politik menjadi dangkal jika ia hanya memahami cerita tentang satu orang, yaitu orang yang masih hidup. Pandangan seperti itu adalah jebakan kekinian, dimana kita tampak seperti telah menyelesaikan masalah hari ini, ketika sebenarnya yang kita lakukan justru memindahkan beban masalah itu kepada generasi yang akan lahir esok hari.

Jika sejarah adalah cerita tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok, maka sejarah bukan saja metode untuk memahami masa lalu dan masa



kini, tapi juga menjadi jalan paling efektif menemukan alasan untuk tetap berharap bahwa esok hari cerita hidup kita akan lebih baik. Membaca sejarah adalah cara menemukan harapan. Harapanlah yang membuat kita rela dan berani melakukan kebajikan-kebajikan hari ini, walaupun buah kebajikan itu akan dipetik oleh mereka yang baru akan lahir esok hari.

Tugas politik adalah memberi arah bagi kehidupan masyarakat, agar mereka merasa memiliki satu arah yang dituju (*sense of direction*) dan memiliki orientasi. Rasa memiliki arah ini merupakan sumber kepercayaan diri dan harapan yang kuat bagi masa depan. Sebaliknya, chaos dan anomi membuat orang merasa tersesat dan limbung. Untuk dapat menemukan arah itulah, kehidupan politik harus berpijak pada sejarah. Berpijak pada sejarah bukan berarti melulu melihat ke belakang, atau memuja kejayaan masa lalu; berpijak pada sejarah harus dimaknai sebagai keyakinan merancang masa depan.

— ■ —  
Membaca sejarah adalah cara menemukan harapan.  
Harapanlah yang membuat kita rela dan berani  
melakukan kebajikan-kebajikan hari ini, walaupun buah  
kebajikan itu akan dipetik oleh mereka yang baru akan  
lahir esok hari.  
— ■ —

Muatan sejarah menghindarkan politik dari kedangkalan dan membawanya pada kedalaman kesadaran. Dengan memahami sejarah, politik akan bergeser dari pandangan sempit sekedar berebut kekuasaan menuju keluasan cakrawala pemikiran, dari sekedar perdebatan mengurus kenegaraan menjadi perbincangan arsitektur peradaban.

Sejumlah gelombang sejarah telah kita lalui sebagai negara-bangsa dan banyak pelajaran penting yang dapat kita sarikan. Pertanyaan mendasar ini menghindarkan kita dari jebakan kedangkalan politik. Sejarah adalah kompas bagi politik dalam mengarungi masa yang akan datang.

## Mengapa Gelombang?

Sudah ada beberapa buku atau tulisan yang menggunakan istilah “gelombang” untuk menggambarkan periodisasi sejarah. Yang sempat populer pada era 1980-an adalah *The Third Wave* karya Alvin Toffler. Saat itu Toffler bersama John Naisbitt meroket sebagai orang yang dianggap mempunyai ilmu melihat masa depan alias “futurológ”. Belakangan, pada 1993, terbit buku Samuel Huntington berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late 20<sup>th</sup> Century* yang bercerita tentang proses demokrasi di Amerika Latin dan Asia Pasifik.<sup>2</sup>

Benarkah sejarah datang dalam bentuk gelombang? Dalam tulisan ini saya menggunakan konsep sejarah sebagai suatu kontinum perjalanan satu entitas melintasi waktu, satu keberlanjutan dari masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Istilah “gelombang” merujuk pada peristiwa penting yang mencuat pada kontinum itu. Seperti hidup manusia, sejarah juga tidak berlangsung dramatis setiap hari. Ada hari-hari lengang tapi, selangang apapun, hari-hari itu memberi pengaruh bagi hari esok yang akan datang.

Gelombang tercipta karena momentum berkumpulnya berbagai daya, sehingga perubahan terjadi dan garis sejarah—walau berlanjut—tidak

---

<sup>2</sup> Iskandar Alisjahbana ketika menulis “Evolusi Pembaruan dan Budi Daya Masyarakat Terbuka Global” dalam Kristanto, J.B. (ed.), *Seribu Tahun Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2000) juga pernah menggunakan istilah gelombang perubahan dalam memahami sejarah. Dengan menggunakan konsep “*the third wave*” Huntington, Anders Uhlén menulis tentang demokratisasi di Indonesia yang kemudian diterjemahkan menjadi *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

berjalan lurus semata. Sejarah berbelok, wajah masyarakat berubah, peradaban dapat berganti, disebabkan oleh gelombang perubahan yang tercipta. Jika kita menggunakan analogi laut, gelombang tercipta oleh angin laut, atau pasang surut yang disebabkan oleh daya tarik bulan dan matahari. Gelombang juga bisa disebabkan oleh gempa, aktivitas vulkanik, atau pergerakan lempeng tektonik di dasar laut. Gelombang adalah resultan dari berbagai faktor pendorong yang mempengaruhi. Faktor pendorong (*drive*) itu ada yang berasal dari dalam dan dari luar. Itu juga yang nanti akan tampak pada hipotesis saya tentang gelombang sejarah Indonesia.

---

Dengan menggunakan pendekatan di atas, saya membagi perjalanan sejarah Indonesia menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama, yang saya beri nama proses "menjadi Indonesia", terjadi sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Gelombang kedua era ini kita bergulat "menjadi negara-bangsa modern". Tahun 2014 ke depan adalah gelombang sejarah baru, "gelombang ketiga", dimana kita akan menghadapi tantangan dan lingkungan yang sama sekali baru.

---

Masing-masing gelombang mempunyai faktor pendorongnya masing-masing. Dalam paparan ini, setiap gelombang memiliki beberapa elemen yang secara konsisten digunakan sebagai kerangka. Pada setiap

gelombang selalu ada faktor pendorong (*drive*) yang bisa datang dari dalam dan dari luar. *Drive* ini adalah fakta sosial yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh manusia sebagai subyek sejarah, malah menjadi stimulus untuk melakukan sesuatu dalam merespon stimulus atau desakan atau aspirasi yang berkembang. *Drive* ini juga yang kerap menjadi semangat zaman (*zeitgeist*) periode tersebut.

Elemen berikutnya adalah nilai-nilai (*values*) yang menjadi orientasi yang dikejar atau dianggap sebagai kebajikan sosial (*social virtue*) yang dipercaya pada saat itu. Pada akhir dari masing-masing gelombang, kita dapat merumuskan apa hasil (*output*) atau pencapaian dari proses dialektika yang terjadi pada periode sejarah itu. Pencapaian ini yang akan menjadi landasan dalam memasuki gelombang sejarah berikutnya.

#### Gelombang Sejarah:

- Faktor pendorong (*drive*) internal dan eksternal
- Nilai-nilai
- Pencapaian



# Menjadi Indonesia

## Indonesia Pada Mulanya

**M**au sejauh mana kita berpaling ke belakang melihat Indonesia di masa lalu? Itulah pertanyaan yang mengusik saya ketika mulai menulis buku ini. Kita harus membuat rentang waktu tertentu untuk memudahkan pembahasan kita. Oleh karena itu saya ingin memulainya dari evolusi nama “Indonesia”.

Sebelum imperialisme, nusantara adalah gugusan pulau dengan sejumlah kerajaan besar dan kecil yang menghuninya. Sejarah mencatat kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dalam menguasai wilayah yang melampaui sekedar pojok tenggara benua Asia. Visi kesatuan nusantara sudah pernah dicetuskan Gajah Mada. Yang menarik dari Sumpah Palapa adalah, potensi menyatunya nusantara sebagai suatu entitas politik sudah dilihat oleh Gajah Mada pada era 1300-an meskipun waktu itu motivasinya adalah ekspansi teritorial Majapahit.

Nusantara sebagai kesatuan ruang mulai memberi potensi terbentuknya identitas. Sudah sejak lama warga nusantara melihat laut sebagai penghubung—bukan penghalang—bagi interaksi antarawarga,

khususnya dalam perdagangan antarbangsa. Kota-kota perdagangan di pesisir, mulai dari Malaka, Sumatra, Jawa hingga di Maluku membentuk satu sabuk transportasi laut dan rantai ekonomi yang ramai. Pada dasarnya, bangsa nusantara (yang kemudian akan menjadi Indonesia) adalah masyarakat yang terbuka dan mudah berinteraksi. Karakteristik inilah yang mengendap menjadi modal bagi terbentuknya identitas Indonesia di kemudian hari.

Seiring perjalanan waktu, nama Indonesia pertama muncul sebagai penamaan etnis bagi orang yang menetap di nusantara oleh penjajah Belanda. Dalam hubungan kuasa, Belanda mengambil posisi dominan untuk memaksakan rumusannya sendiri ke pihak yang dikuasainya. Nama Indonesia timbul tenggelam, bergantian dengan nama “Insulinde” dalam wacana publik Belanda ketika membahas negara jajahannya itu.<sup>3</sup> Indonesia lebih luas dari Jawa, atau Sumatra, atau Celebes. Belanda butuh konsep dan penamaan untuk wilayah kekuasaan yang sudah lebih luas dari nama pulau-pulau atau nama asli daerah.

Karena itulah, Indonesia kemudian berkembang menjadi istilah geografis yang merujuk gugusan pulau yang dikuasai Belanda. Ketika integrasi wilayah jajahan itu semakin menguat, Indonesia menjadi suatu terminologi ekonomi politik yang mewakili kepentingan imperialisme atas daerah yang dulu disebut Hindia Timur atau Hinda Belanda.

### **Imperialisme sebagai Faktor Pendorong**

Secara obyektif kita harus mengakui bahwa keberadaan imperialisme Belanda sebagai pemicu rasa nasionalisme Indonesia dalam arti kesadaran teritorial ada benarnya. Dilema ini juga dirasakan oleh para

---

<sup>3</sup> Pada bagian ini saya banyak terinspirasi dari penelusuran sejarawan Inggris R. E. Elson. Untuk selanjutnya dapat dibaca Elson, R.E. *The Idea of Indonesia: A History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

pendiri Indonesia waktu itu.<sup>4</sup> Gagasan awal Indonesia sebagian besar didasarkan pada ketegangan antara menguasai dan dikuasai.<sup>5</sup>

Benarkah Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu, tetapi ingin membaca realitas imperialisme dalam dua hal: *pertama*, mengintegrasikan wilayah jajahan sehingga para pencetus bangsa Indonesia waktu itu memiliki cara pandang teritorial dan klaim kewilayahan baru serta, *kedua*, penderitaan dan penistaan akibat penjajahan memicu hasrat untuk bebas merdeka agar dapat hidup sejahtera dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda telah melahirkan “anak macam” yang menerkam induknya sendiri. Pendidikan yang mulanya bertujuan mengisi mesin biokrasi pemerintahan ternyata memercikkan api pencerahan yang berujung pada lahirnya pergerakan nasional. Yang dimaksud dalam Sumpah Pemuda “bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia” adalah wawasan teritorial yang dibangun oleh imperialisme yang menjadi pijakan bagi berdirinya negara-bangsa Indonesia di kemudian hari.

### **Pergulatan Mencari Identitas Baru & Lahirnya Nasionalisme**

Mengapa di nusantara pada awal abad ke-20 lahir “spesies” manusia baru yang “bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia”? Itulah hasil pergulatan mencari identitas baru para pendiri bangsa kala itu.

---

<sup>4</sup> Tokoh Indische Vereeniging (yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) Iwa Kusuma Sumantri sempat bertanya-tanya, “Apakah Hindia Belanda akan tumbuh menjadi satu negara atau pecah menjadi banyak negara ketika ikatan yang menyatukan semua wilayah di sana, yakni kekuasaan Belanda, tidak ada lagi?” Dikutip dari Elson.

<sup>5</sup> “Nasionalisme Hindia didasarkan atas imperialisme Belanda,” ujar Suwardi Suryaningrat (yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara). “Yang kami maksudkan sebagai negara Hindia masih harus dibentuk. Artinya, saat ini belum ada. Cangkul sudah dihunjamkan ke tanah, tapi benih belum ditanam.” Dikutip dari Elson.



Kira-kira, kegalauan kaun terdidik pada waktu itu jika diucapkan, *'Saya Jawa, tapi ke-Jawa-an saya tidak membedakan saya dengan yang lain dalam hal ketertindasan.'* Kata "Jawa" dalam kalimat tadi bisa diganti dengan Sumatera, Celebes, Ambon, Melayu dan yang lainnya. Karena itu, transformasi besar yang terjadi dalam proses menjadi Indonesia adalah kesadaran untuk bertumbuh dari etnis menjadi bangsa karena etnisitas tidak lagi cukup dan relevan untuk menjawab sejumlah pertanyaan eksistensialnya sebagai manusia. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar identitas primordial yang diharapkan menjadi jalan keluar, yaitu identitas baru sebagai bangsa. Di sinilah perbincangan mengenai nasionalisme menjadi relevan dan memberi harapan.

Transformasi besar yang terjadi dalam proses menjadi Indonesia adalah kesadaran untuk bertumbuh **dari etnis menjadi bangsa** karena etnisitas tidak lagi cukup dan relevan untuk menjawab sejumlah pertanyaan eksistensialnya sebagai manusia.

Nasionalisme Indonesia memiliki dimensi keluar dan ke dalam. Keluar dalam arti sebagai semangat untuk melawan penjajahan dan ke dalam sebagai proses pembentukan identitas baru, sebagai kelanjutan dari hadirnya kesadaran ruang atas teritori yang berawal dari terbentuknya Hindia Belanda.

Pada fase awal ini sesungguhnya tidak banyak yang disepakati dalam gagasan mengenai Indonesia. Para pendiri bangsa ini hanya berteguh

hati bahwa harus ada Indonesia yang bebas walau masih dalam konsep yang samar-samar. Gagasan Indonesia untuk sementara waktu juga terbatas menjadi wacana elite terpelajar dan komunitas politik sebelum akhirnya menyebar luas ke warga kebanyakan. Janji kemerdekaan yang mempertautkan ide abstrak nasionalisme dengan gambaran konkret kesejahteraanlah yang membuat pergerakan nasional menjadi "*collective mind*" dan melahirkan gerakan yang lebih luas.

Janji kemerdekaan yang mempertautkan ide abstrak nasionalisme dengan gambaran konkret kesejahteraan yang membuat pergerakan nasional menjadi "*collective mind*" dan melahirkan gerakan yang lebih luas

Ada dua hal yang menarik dari perjalanan nasionalisme Indonesia, yaitu nasionalisme sebagai produk modernitas dan nasionalisme Indonesia sebagai transformasi cara berpikir dari para bapak bangsa.

### **Nasionalisme sebagai produk modernitas**

Apa yang membuat Indonesia menjadi sebuah bangsa?

Saya tertarik mengelaborasi pendapat sejarawan Ernest Gellner dalam membaca proses terciptanya Indonesia sebagai bangsa.<sup>6</sup> Teori utamanya merumuskan bahwa kebangsaanlah (atau

<sup>6</sup> Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism* (New York: Cornell Paperbacks, 2008).

nasionalisme) yang menciptakan bangsa, bukan sebaliknya. Hal ini terjadi terutama karena kekuatan nasionalisme sebagai *gagasan*, dan pengaruh kaum cendekiawan yang menjadi inovator sosial sebagai pengusung gagasan ini. Gagasan nasionalisme adalah produk dari modernitas.

Awal abad ke-20 merupakan titik awal kemodernan bagi tanah Hindia sebagai hasil dari pendidikan dan mobilitas sosial kaum pribumi pada waktu itu. Gagasan Indonesia juga lahir seiring semangat modernitas; gagasan baru untuk era yang baru pula. Pendukungnya adalah anak muda berpikiran modern, dengan tampilan kultural yang sama sekali berbeda dengan pendahulu mereka dan jumlahnya sangat sedikit.

Ada dua elemen penting sebuah bangsa, yaitu kehendak (*will*) dan budaya (*culture*). Dalam konteks Indonesia, kita bisa menyaksikan bahwa kebangsaan Indonesia adalah ekspresi kehendak untuk keluar dari jerat penderitaan akibat penjajahan. Kehendak ini yang menciptakan pembeda: *penjajah vs. yang dijajah, aku vs. engkau; kami vs. kalian; Indonesia vs. imperialisme*. Pembeda ini yang pada gilirannya menjadi identitas dan kesadaran: aku Indonesia karena aku ingin merdeka dari penjajahan!

Ide tentang Indonesia adalah ide yang modern. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari rekayasa dan konsensus yang dibimbing oleh kesadaran sejarah.

Dalam konteks budaya, nasionalisme Indonesia merupakan transformasi budaya menuju masyarakat modern. Bangsa baru bernama Indonesia itu bergerak menuju pengelolaan hidup bersama yang dijalankan dengan kaidah-kaidah rasionalitas. Cara hidup lama, dimana struktur masyarakat yang rumit tersaput oleh mitos dan sejarah lisan turun-temurun, digantikan oleh gagasan masyarakat baru bernama Indonesia, yang juga sedang dicari formatnya.

Ide tentang Indonesia adalah ide yang modern. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari rekayasa dan konsensus yang dibimbing oleh kesadaran sejarah. Identitas baru dan modern sebagai Indonesia inilah yang mematangkan kesadaran para pemimpin politik waktu itu bahwa gagasan politik Indonesia adalah gagasan yang bagus dan sudah waktunya tiba.

### **Nasionalisme Indonesia adalah Transformasi Cara Berpikir**

Apa yang membuat kita menjadi sebuah bangsa?

Setelah melalui proses sejarah dan penderitaan yang panjang, bangsa Indonesia sadar bahwa imperialisme tidak lagi dapat dihadapi oleh kerajaan-kerajaan kecil atau etnis-etnis yang ada. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu melebur dalam satu simpul yang lebih besar dari simpul-simpul primordial selama ini.

Para pendiri bangsa ini mengalami peralihan spektrum berpikir. Etnis-etnis dan kerajaan-kerajaan kecil tidak lagi relevan. Kita membutuhkan simpul yang lebih besar, yaitu simpul bangsa yang menyatukan semua etnis-etnis ini, dan simpul politik, yaitu sebuah negara yang lebih besar yang meleburkan semua kerajaan-kerajaan kecil tadi.

Pencarian identitas sebagai bangsa yang berdaulat atas nasibnya sendiri merupakan reaksi dari penjajahan yang menempatkan bangsa

Indonesia waktu itu sebagai orang yang ditentukan nasibnya oleh penjajah. Identitas Indonesia sejatinya berangkat dari identitas defensif “yang terjajah vs. penjajah”. Kesadaran ini pula yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan yang lebih massif dari periode sebelumnya.

Awal abad ke-20 menjadi fajar terbitnya kesadaran, momentum pencerahan tanah nusantara. Setelah melalui proses sejarah dan penderitaan yang begitu panjang, bangsa Indonesia sadar bahwa imperialisme tidak bisa lagi dihadapi oleh kerajaan-kerajaan kecil atau etnis-etnis yang ada. Hanya ada satu jalan untuk keluar, yaitu melebur dalam satu simpul yang lebih besar dari simpul-simpul primordial selama ini.

Pada saat itu orang Indonesia menyadari, setelah gagasan mengenai Indonesia menyentuh kesadaran mereka, bahwa gagasan itu sudah tiba waktunya. “Bangsa” (dalam hal ini bangsa Indonesia) sebenarnya sudah ada di tempatnya, tinggal menunggu dibangkitkan oleh para pejuangnya. Namun, nasionalisme bukanlah kebangkitan kekuatan yang laten dan “tidur”. Nasionalisme adalah konsekuensi dari bentuk organisasi sosial yang baru, yang berakar pada pendidikan dan kebudayaan.

— ■ —  
Jika kita bedah Indonesia pada hari kelahirannya,  
kita akan temukan bahwa nilai terdalamnya adalah  
solidaritas.  
— ■ —

Itulah ide awal Indonesia. Jika kita bedah Indonesia pada hari kelahirannya, kita akan temukan bahwa nilai terdalamnya adalah solidaritas. Para pendiri bangsa ini mengalami peralihan spektrum berpikir, bahwa etnis-etnis dan kerajaan-kerajaan kecil ini tidak lagi relevan. Kita membutuhkan sebuah simpul yang lebih besar, yaitu simpul bangsa yang menyatukan semua etnis-etnis ini, dan sebuah simpul politik, yaitu sebuah negara yang lebih besar yang meleburkan semua kerajaan-kerajaan kecil tadi.

Satu fakta sejarah yang menarik dicatat adalah partisipasi kaum Tionghoa dan keturunan Arab serta keturunan etnis lain dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun mereka menikmati privilese akibat dari kebijakan yang diskriminatif dari pemerintah kolonial, namun tidak sedikit dari mereka yang melakukan “bunuh diri kelas” dan mendukung pergerakan nasional.

Tidak banyak dari kita yang ingat peristiwa “Sumpah Pemuda Keturunan Arab” yang dilakukan oleh pemuda-pemuda keturunan Arab di nusantara dalam sebuah kongres di Semarang, 4-5 Oktober 1934.<sup>7</sup> Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Peristiwa penting ini tidak masuk dalam kurikulum resmi sejarah Indonesia. Padahal, pernyataan ini memiliki konsekuensi penting bagi komunitas keturunan Arab, yang pada waktu itu menikmati kenyamanan, dan memberi kontribusi bagi perjuangan kemerdekaan di Indonesia.

Tidak banyak juga dari kita yang ingat bahwa di dalam keanggotaan BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ada sejumlah tokoh Tionghoa di dalamnya. Bahkan, tokoh seperti Liem

---

<sup>7</sup> Dikutip dari: [http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah\\_Pemuda\\_Keturunan\\_Arab](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda_Keturunan_Arab). Salah satu hasil kongres ini adalah pembentukan Persatuan Arab Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Arab Indonesia yang dipimpin oleh A.R. Baswedan.

Koen Hian sejak 1929 melalui surat kabar mengembangkan visi bahwa Indonesia harus menjadi tanah bagi para keturunan Tionghoa (Hoa Kiauw).<sup>8</sup> Dengan visinya itu, Liem kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan sempat ditahan pada masa pendudukan Jepang. Ketika BPUPKI dibentuk, Liem menjadi salah satu anggotanya dan kemudian pada 1947 ia menjadi salah satu anggota delegasi RI dalam Perundingan Renville.

Dari dua nukilan peristiwa sejarah itu kita dapat belajar bahwa “bangsa Indonesia” bukan hanya berasal dari penghuni yang secara biologis lahir dan turun-temurun berada di tanah ini. Bangsa Indonesia adalah mereka yang mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Kita lahir sebagai bangsa ketika kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Tidak gampang memilih satu bahasa dari 300-an bahasa yang hidup di nusantara waktu itu. Tidak gampang memilih satu nama untuk menyatukan sekian banyak etnis. Indonesia adalah kesepakatan yang lahir dari jiwa besar, yang lahir dari rasa solidaritas, hasil proses sejarah yang panjang.

— ■ —  
“Bangsa Indonesia” bukan hanya berasal dari penghuni yang secara biologis lahir dan turun-temurun berada di tanah ini. **Bangsa Indonesia adalah mereka yang mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air mereka.** Indonesia adalah kesepakatan yang lahir dari jiwa besar, yang lahir dari rasa solidaritas, hasil proses sejarah yang panjang.  
— ■ —

---

<sup>8</sup> Dikutip dari: [http://id.wikipedia.org/wiki/Liem\\_Koen\\_Hian](http://id.wikipedia.org/wiki/Liem_Koen_Hian)

Selain nilai solidaritas, gotong-royong muncul sebagai ekspresi solidaritas. Pada tingkatan yang lebih fisik, solidaritas dan gotong-royong ini menjadi patriotisme, yaitu semangat berkorban demi tujuan bersama, yaitu Indonesia yang merdeka. Dari semangat itulah lahir slogan: Merdeka atau Mati!



Kereta bersejarah pengangkut logistik dan bala bantuan ke medan perang pada masa perjuangan kemerdekaan. Kereta ini pertama beroperasi pada 1935 dan kini menjadi koleksi Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: Istimewa)

### **Islam sebagai Kohesi**

Saya ingin membuka diskusi tentang peran Islam sebagai faktor kohesi sosial dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Penulisan sejarah yang dominan sekarang cenderung memisahkan antara “sejarah Islam di Indonesia” dengan “sejarah Indonesia” itu sendiri. Sejarah Islam di Indonesia kerap direduksi menjadi sejarah wali-wali, tumbuhnya kerajaan Islam nusantara dan berdirinya organisasi kemasyarakatan besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,



sebelum kemerdekaan. Padahal, Islam ambil bagian yang sangat intens dalam pergulatan menjadi Indonesia.

Para ahli sejarah mencatat ada dua gelombang masuknya Islam di nusantara, yaitu pada abad ke-7 dan abad ke-13. Agama ini dibawa oleh pedagang dari Arab yang menetap di kota-kota pelabuhan nusantara. Pada abad ke-8 telah berdiri perkampungan muslim di pesisir Sumatra. Pada awalnya, Sumatra (dan nusantara pada umumnya) hanyalah persinggahan para pedagang Arab menuju Tiongkok dan Jawa. Pada abad ke-13, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di nusantara, disusul berdirinya Kerajaan Demak pada abad ke-15. Awalnya, Raden Patah adalah wakil kerajaan Majapahit di daerah itu yang kemudian dia memutuskan masuk Islam dan mendirikan kerajaan sendiri.

Islam masuk ke nusantara secara damai karena merupakan *"by product"* dari interaksi perdagangan, bukan agenda utama penyebaran agama apalagi ekspansi teritorial kerajaan Islam tertentu. Islam di Indonesia berkembang melalui asimiliasi dengan tradisi dan budaya setempat. Kisah yang paling sering kita dengar adalah tentang Sunan Kalijaga menyebarkan Islam lewat pertunjukan wayang dan mengubah tembang *"Lir-ilir"* serta Sunan Bonang yang mengarang tembang *"Tamba Ati"* (Obat Hati) yang populer sampai sekarang. Namun demikian, tidak terhindari terjadinya konflik antara masyarakat setempat dengan Islam yang baru datang. Salah satu konflik antara komunitas tradisi dan Islam yang tercatat oleh sejarah adalah Perang Paderi di Sumatra Barat pada rentang 1803-1838 yang belakangan berubah menjadi perang melawan Belanda.

Sejak abad ke-13, Islam telah memberi warna dominan di bumi nusantara. Kerajaan-kerajaan yang berjuang melawan kolonialisme Belanda hampir semuanya bercorakkan keislaman. Mulai dari Cut Nyak Dien di Aceh, Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Makassar sampai Sultan Baabullah di Ternate; semuanya adalah pemimpin komunitas Islam dalam

melawan pendudukan Belanda. Dalam kepercayaan mereka, melawan penjajah itu mulia seperti jihad. Bahkan perang di Aceh disebut sebagai “Perang Sabil” oleh rakyat Aceh untuk menggambarkan betapa perang tersebut adalah perjuangan melawan kekufuran yang batil. Perlawanan ini juga menjadi cikal-bakal kesadaran nasionalisme di kalangan Islam. Sejarawan menyebut cikal ini sebagai “proto-nasionalisme Indonesia”, yaitu kesadaran untuk bebas dari penjajahan dan kesadaran untuk menumbuhkan identitas budaya sendiri di kalangan kaum muslim yang berbeda dengan penjajah yang kafir. Ajaran Islam yang banyak menekankan persatuan umat juga telah membangun sentimen dan solidaritas anticolonialisme. Lebih jauh lagi, Islam menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan mengilhami berbagai gerakan lokal menentang penjajahan.<sup>9</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat juga tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren berperan penting sebagai penyuplai semangat perlawanan terhadap imperialisme, walaupun berujung pada terkucilkannya komunitas pesantren dari pergaulan dan pendidikan modern pada awal abad ke-20 hingga setelah Indonesia merdeka.<sup>10</sup>

HOS Cokroaminoto sejak awal mengingatkan bahwa melalui Islam, nasionalisme dapat tumbuh subur. Senada dengan Cokro, Mohammad Natsir menyatakan bahwa sebelum digunakan istilah “nasionalisme Indonesia”, ketika berbagai organisasi masih membatasi diri pada suku bangsa masing-masing, pergerakan berdasarkan Islam sudah lama memiliki ikatan kebangsaan. Pergerakan Islam telah menanam bibit

---

<sup>9</sup> Istilah “proto-nasionalisme” atau “pre-nasionalisme” digunakan oleh Benedict Anderson. Sementara peran Islam dalam membangkitkan solidaritas anticolonialisme yang menjadi bibit nasionalisme dibahas oleh George McTurnan Kahin. Lihat Mughni, Syafiq A. “Munculnya Kesadaran Nasionalisme Umat Islam” dalam *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).

<sup>10</sup> Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, 2004).

persatuan dan menyingkirkan sifat kesukuan.<sup>11</sup> Lebih jauh, Natsir perlu dicatat sebagai pencetus awal konsep “nasionalisme-religius”. Ia menempatkan Islam sebagai dasar nasionalitas Indonesia. Dalam banyak kesempatan, ia berpolemik dengan Soekarno yang mendukung “nasionalisme-sekuler.”

Islam menjadi kohesi bagi proses pembentukan bangsa Indonesia karena menyediakan wawasan dan pergaulan yang melintasi batas-batas kesukuan atau kewilayahan. Islam juga yang menjadi inspirasi solidaritas yang mempercepat persatuan kebangsaan.

Sarekat Islam yang terbentuk pada 1912 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi pertama yang mengekspresikan pentingnya pemerintahan sendiri dan menuntut kemerdekaan, selain agenda ekonomi jangka pendek untuk melindungi perdagangan pribumi. Dengan pengembangan organisasi yang luas dan anggota yang berasal dari beragam etnis, Sarekat Islam lebih maju dari Boedi Oetomo yang masih berpikir tentang Jawa dan orang Jawa. Sarekat Islam juga menjadi benih bagi tumbuhnya “nasionalisme ekonomi” yang merefleksikan perlawanan terhadap kapitalisme dan dominasi ekonomi oleh pedagang Cina yang mendapat privilese akibat hukum yang diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam salah satu pidatonya, sejak awal Cokroaminoto menegaskan bahwa agama Islam

<sup>11</sup> Hidayat, Komaruddin & Ahmad Gaus AF. “Menjadi Indonesia – Pengantar Editor” dalam *Menjadi Indonesia*.

adalah tali pengikat dan tanpa agama tidak akan ada kerja sama dan kekuatan Sarekat Islam, dan gerakan Islam lainnya, di nusantara. Cokro mengambil esensi ayat suci “*Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara*” dan mentransformasikannya dalam langkah melawan penjajahan.

Islam menjadi lebih dari sekedar agama, tetapi faktor pendorong timbulnya ekspresi perlawanan terhadap dominasi ekonomi, superioritas rasial dan kontrol politik penjajah.<sup>12</sup> Islam menjadi kohesi bagi proses pembentukan bangsa Indonesia karena menyediakan wawasan dan pergaulan yang melintasi batas-batas kesukuan atau kewilayahan. Islam juga yang menjadi inspirasi solidaritas yang mempercepat persatuan kebangsaan.



Dokumentasi pertemuan Sarekat Islam di Kaliwungu (dekat Semarang), Jawa Tengah pada 1921. (Foto koleksi Tropenmuseum, Koninklijk Instituut voor de Tropen [KIT], diambil dari Wikipedia).

---

<sup>12</sup> Mughni dalam *Menjadi Indonesia*.

## **Pencapaian: Lahirnya Negara-Bangsa Indonesia**

Pamungkas dari gelombang pertama sejarah Indonesia adalah kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Lewat proklamasi itu, bangsa Indonesia meraih penegasan identitas sosial dan politik yang baru. Kami adalah bangsa Indonesia (bukan bangsa Jawa, Sumatra, Ambon, Celebes, dll) di dalam negara yang merdeka (bukan jajahan negara lain) dan karenanya kami pantas diakui dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka di seluruh dunia. Soekarno menguatkan semangat ini dengan proyek-proyek internasional seperti Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, untuk mengumumkan dengan lantang eksistensi negara baru Indonesia ini.

Klaim atau kepemilikan teritori tertentu sebagai “tanah air” adalah pencapaian dalam merealisasikan apa yang sebelumnya merupakan imajinasi sosiologis menjadi bentuk konkret suatu negara. Di sini kita bisa belajar arti penting rumusan Sumpah Pemuda 1928 yang menempatkan “bertanah air satu” sebagai butir pertama dari sumpah tersebut.

Bahasa Indonesia harus diapresiasi sebagai terobosan berani yang dipilih oleh pendiri bangsa kita. Ada semangat egaliter, karena tidak memilih bahasa Jawa yang hirarkis dan penuh perlambang; serta semangat kosmopolitan, karena bahasa “Melayu Pasar” telah menjadi bahasa perniagaan dan pergaulan (*lingua franca*) di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih penting, bahasa Indonesia menjadi penegas bahwa “kami berbeda” dan mengibarkan bendera perlawanan kepada bahasa yang waktu itu digunakan sebagai bahasa kekuasaan dan birokrasi, yaitu bahasa Belanda.

Jadi, jika kita menggunakan analogi komputer, maka Sumpah Pemuda 1928 dapat dirinci sebagai berikut:

Tanah air	→	Perangkat keras
Bangsa	→	Perangkat lunak
Bahasa	→	Sistem operasi

Indonesia merdeka adalah bangunan utuh sebuah perangkat komputer yang akan bekerja untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang bernaung di bawahnya.

Lahirnya negara-bangsa Indonesia yang merdeka adalah pencapaian besar yang merupakan hasil dari transformasi kesadaran politik untuk bergabung dalam satu simpul besar bernama “negara”. Ini adalah hasil peralihan cara pikir yang menyadari betapa kerjaan-kerajaan kecil tidak bisa mengimbangi imperialisme. Harus dibuat suatu entitas baru yang memiliki legitimasi untuk berhadap-hadapan dengan imperiasme dan entitas dimaksud adalah negara. Kebetulan, sejak abad ke-19, gairah membangun negara-bangsa—sebagai antitesis dari imperium besar yang diperintah oleh monarki—menggeliati di Eropa dan sampai imbasnya ke Asia pada pertengahan abad ke-20. Hampir sama dengan Indonesia, pembentukan negara-bangsa di Eropa juga mengalami proses kristalisasi atau unifikasi budaya sebelum menjadi entitas negara.

Negara Indonesia dilahirkan sebagai sarana mencapai tujuan melindungi warga bangsa dalam suasana kebebasan untuk mencapai kesejahteraan. Negara menjadi puncak legitimasi eksistensi bangsa Indonesia dalam teritori tertentu dan memiliki tujuan hidup bersama yang disepakati. Negara Indonesia adalah perwujudan kontrak sosial bangsa Indonesia.

### Transformasi Besar Gelombang Pertama

Sosial	→	Etnis	→	Bangsa
Politik	→	Kerajaan	→	Negara

Indonesia telah bertransformasi dari identitas defensif akibat penjajahan menjadi gagasan tentang identitas yang baru dan modern. Pada gelombang pertama ini kita telah berhasil mencapai tonggak-tonggak sejarah yang penting, yaitu solidaritas dan identitas, integrasi teritori, bahasa sebagai modus eksistensi, serta kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Dengan pencapaian inilah kita melangkah ke gelombang berikutnya, yaitu pergulatan untuk membangun negara-bangsa yang modern.



Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Foto bersejarah ini diambil oleh Frans Mendur. (Sumber: Wikipedia).

### Gelombang Pertama: Menjadi Indonesia

<b>Faktor Pendorong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imperialisme (eksternal)</li> <li>- Pencarian identitas (internal)</li> </ul>
<b>Nilai-nilai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solidaritas</li> <li>- Gotong royong</li> <li>- Pergerakan nasional sebagai "<i>collective mind</i>"</li> </ul>
<b>Pencapaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemerdekaan</li> <li>- Identitas sosial dan politik baru</li> <li>- Tanah air (integrasi teritori)</li> <li>- Bahasa</li> </ul>

# Menjadi Negara-Bangsa Modern

## Pergulatan Mencari Sistem

Setelah menjadi negara merdeka dan menuntaskan gelombang sejarah yang pertama, Indonesia bergulat dalam upaya mencari sistem yang kompatibel dengan sejarah dan referensi budayanya di gelombang kedua. Gagasan Indonesia sebagai bangsa yang modern dilanjutkan dengan proyek mewujudkan negara modern. Untuk mewujudkan ambisi itu, Indonesia membutuhkan konstitusi modern, lembaga negara yang kuat, serta budaya demokrasi yang subur.

Persaingan ideologi yang diredam pada masa persiapan kemerdekaan karena adanya kepentingan bersama yang lebih besar kini mencuat ke permukaan. Partai politik yang mulanya lebih berperan sebagai organisasi pergerakan nasional mulai berevolusi menjadi partai politik dalam arti peserta kontestasi politik dan mesin diseminasi ideologi. Intensitas persaingan ini menguat seiring dengan mulai terbentuknya dua blok besar Barat dan Timur sebagai hasil Perang Dunia II.

Sejak itulah dan hingga hampir 70 tahun ini kita mendebatkan sistem politik, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem pemerintahan



yang cocok bagi kita. Pergulatan mencari sistem inilah yang menjadi ruh zaman (*zeitgeist*) yang membenteng sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Itu sebabnya, selama itu pula kita terlibat dalam perdebatan yang sengit antara berbagai ideologi. Antara Islam, nasionalisme, sosialisme, dll. Kita juga terlibat dalam perdebatan panjang dan melelahkan tentang relasi agama dan negara. Kita juga berdebat tentang sistem ekonomi apa yang akan kita pakai. Sayangnya, pergulatan itu berjalan bagai pendulum yang berayun dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain yang tak jarang berbiaya amat mahal, hingga menumpahkan darah.

## **Tema-Tema Perdebatan**

### ***Relasi Agama dan Negara***

Proses pencarian identitas yang tidak solid dan konklusif menjadi akar problematika negara vs. agama hingga berlangsung cukup lama. Para pendiri negara, yang juga bisa kita sebut sebagai penganjur nasionalisme Indonesia, bersepakat hanya pada tiga hal: bahwa pergerakan nasionalisme didasarkan pada gagasan kedaulatan rakyat yang longgar, bahwa pengaruh buruk penjajahan Belanda hanya diatasi dengan cara meraih kemerdekaan, dan bahwa usaha mencapai kemerdekaan menuntut kesatuan tujuan dan perjuangan terus-menerus. Mereka tidak bersepakat dalam banyak hal lain. Namun, kuatnya solidaritas dan hasrat ingin merdeka meredam egoisme mereka. Ini bisa dilihat betapa perdebatan di BPUPKI/PPKI tidak sesengit jika dibanding dengan yang terjadi di Konstituante.

Ketegangan sebenarnya bermula dari perdebatan tentang apa dasar negara kita pada rapat BPUPKI. Rapat Tim Sembilan<sup>13</sup> yang seharusnya menyusun naskah proklamasi kemerdekaan, menyusun

---

<sup>13</sup> Anggota Panitia Sembilan: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin.

dokumen yang nantinya menjadi Mukadimah UUD 1945 pada 22 Juni 1945. Di dalam rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta terdapat kata-kata: “ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Frasa ini kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ketika pengesahan UUD 1945 dan Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan (Preamble) UUD 1945 dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945.

Banyak tafsir atas peristiwa ini. Sebagian menilai digantinya Piagam Jakarta merupakan kekalahan kelompok Islam dalam proses pembentukan negara Indonesia. Sebagian besar memandang peristiwa ini lebih positif, yaitu sebagai bentuk kompromi dan jiwa besar para pendiri bangsa dalam menyusun satu cetak biru negara-bangsa yang dapat memayungi semua warga dari berbagai agama.

Pada masa Orde Lama, relasi agama dan negara mengeras karena sikap agresif Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendekati ke Presiden Soekarno. Bung Karno sendiri merupakan pemikir yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan umat Islam. Para kyai dan saudagar Islam menjadi bulan-bulanan agitasi PKI tentang tuan tanah dan “tujuh setan desa”.<sup>14</sup> Di berbagai daerah tak terhindarkan konflik perebutan lahan, pemogokan buruh tani dan pembentukan sayap-sayap partai atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang disiapkan untuk bertempur secara fisik. Ketegangan ideologi ini terjadi di ranah masyarakat sipil, yaitu partai politik dan ormas, sementara negara berperan relatif pasif.

Perang ideologi ini memuncak pada peristiwa G-30-S yang mengubah lanskap politik Indonesia. Banyak tafsir mengenai peristiwa ini namun yang

---

<sup>14</sup> “Tujuh setan desa” adalah bagian dari kampanye yang dalam term komunis untuk menciptakan situasi revolusioner, terutama menunggangi terlambatnya penerapan UU Agraria pada waktu itu. Yang disebut tujuh setan desa adalah: (1) kepala desa (yang disebut juga “kapitalis birokrat” disingkat “kapbir”, (2) bintang pembina desa (babinsa/TNI), (3) petani kaya (tuan tanah), (4) lintah darat, (5) tengkulak, (6) tukang ijon dan (6) pengumpul zakat.

jelas PKI mengalami tekanan hebat baik dari militer maupun mahasiswa. Salah satu tuntutan Tritura adalah bubarkan PKI karena dianggap sebagai dalang kekacauan dan pertumpahan darah dalam peristiwa G-30-S.

Salah satu eksekusi dari perang ideologi pada era Orde Lama ini adalah terbaikannya kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merajalela dan situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Orde Baru dengan menggunakan isu stabilitas dan ekonomi sebagai basis legitimasi.

Pada masa Orde Baru, perdebatan ideologi ditutup dan disubordinasikan di bawah dalih pentingnya stabilitas keamanan demi pembangunan ekonomi. Jargon sakti yang terus didengungkan adalah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Beberapa percikan konflik politik dengan cepat diringkus dan ideologi dijadikan stigma untuk meredam potensi kritik dan perlawanan.

Fusi partai politik yang dilakukan pada 1973 telah menutup ruang bagi debat ideologi. Pemilu pertama setelah Orde Baru berkuasa (dan yang kedua kali dilakukan sejak Indonesia merdeka) dilaksanakan pada 1971 dan diikuti oleh 10 partai politik. Atau, menggunakan bahasa Orde Baru, diikuti oleh 9 parpol dan satu golongan karya. Lima besar pada pemilu ini adalah: Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

### Lima Besar Perolehan Suara Pemilu 1971

No.	Partai	Jumlah (juta)	Persen
1.	Golongan Karya	34,3	62,8
2.	Nahdlatul Ulama	10,2	18,7
3.	Partai Nasional Indonesia	3,8	6,9
4.	Partai Muslimin Indonesia	2,9	5,4
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia	1,3	2,4

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Pemingkatan berdasarkan suara, karena akibat sistem saat itu, Parmusi mendapat kursi yang lebih banyak (24 kursi) dari PNI (20 kursi).

Menyongsong pemilu kedua pada masa Orde Baru, dilakukan peleburan (fusi) partai-partai politik. Partai-partai Islam, yaitu: NU, Parmusi, PSII dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertii) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pengukuhan penggabungan ini dilakukan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Di sini rezim Orde Baru memainkan politik pemaknaan karena tidak menyebut dirinya sebagai partai, melainkan golongan, yaitu Golongan Karya, yang membuat masyarakat memandang negatif terhadap politik.



Lambang tiga partai politik pascafusi. Pada 1984 PPP mengubah gambar ka'bah menjadi gambar bintang karena pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Setelah Reformasi 1998, PPP kembali menggunakan lambang ka'bah.

Ketegangan agama dan negara tampak pada konflik berdarah di Tanjung Priok (dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Priok) terjadi pada 1984 akibat arogansi aparat militer yang memicu protes massa dan kerusakan yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka-luka. Peristiwa ini masih menyisakan luka yang mendalam walaupun sempat digelar pengadilan HAM *ad-hoc* untuk memeriksa kasus ini pada 2003-2004.

Puncak pengontrolan ideologi adalah diterapkannya Pancasila sebagai asas tunggal. Mengacu pada Tap MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P-4), pemerintah Orde Baru

mengeluarkan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya dengan kewajiban menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam paket yang sama, pemerintah mengeluarkan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dimana ormas diberi waktu dua tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan ini mendapat perlawanan dari kelompok Islam.

Organisasi kemasyarakatan Islam bergolak menghadapi kebijakan baru ini. Sejumlah mahasiswa mendeklarasikan berdirinya HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) untuk mempertahankan asas Islam dan memisahkan diri dari HMI yang menerima asas Pancasila pada kongres 1986 di Padang. Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam besar, seperti Muhammadiyah dan NU, berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan mencoba mengayuh dayung di sela-sela karang otoritarianisme Orde Baru. Banyak peristiwa simbolik yang mewarnai hubungan Islam dan negara pada masa ini, bahkan ibadah haji yang dilakukan oleh Pak Harto dan keluarga pun tak luput dari interpretasi politik yang beragam.

Dalam perjalanan Orde Baru, stigma “ekstrem kiri” dan “ekstrem kanan” dijadikan senjata ampuh dalam memberangus kritik dan perlawanan. Misalnya, warga Kedungombo yang menolak relokasi dicap “eks PKI” dan mendapat intimidasi.

Tarik-menarik antara Islam dan negara berjalan pada dua arah. Represi tetap berjalan, namun, pada saat yang sama tumbuh kelas menengah Islam, atau santri kota, yang lahir akibat kesejahteraan dan akses pendidikan yang terwujud semasa Orde Baru. Banyak dari kelas menengah ini yang merupakan pegawai negeri atau berinteraksi dekat dengan pemerintah, bukan aktivis yang keras mengkritik pemerintah. Salah satu yang dianggap sebagai ikon tumbuhnya kelas menengah santri adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Banyak interpretasi terhadap

berdirinya organisasi ini. Perspektif yang positif menganggap memang sudah waktunya muslim Indonesia melahirkan kelas menengah dan kemudian menyuarkan aspirasinya. Sementara, perspektif yang lebih kritis menganggap ICMI adalah alat politik yang digunakan Soeharto untuk membuat perimbangan baru setelah “berpaling” dari militer.<sup>15</sup>

Di era Reformasi, hubungan antara negara dan agama mulai mendapatkan formatnya. Paket undang-undang politik, yang di dalamnya memuat Dwi Fungsi ABRI, adalah salah satu “target Reformasi” sehingga langsung menjadi agenda DPR pasca-Reformasi. Kini kita bisa melihat keseimbangan baru dalam relasi agama-negara. Negara tidak lagi dominan sebagai agen pengontrol isi benak masyarakat. Pancasila tidak lagi ditafsirkan tunggal dan dijadikan palu godam untuk meredam kritik dan perlawanan terhadap pemerintah. Pancasila telah menjadi panggung yang terbuka bagi identitas yang berbeda-beda. Ekspresi agama sebagai identitas tidak lagi dianggap sebagai ancaman, malah menjadi kekuatan sosial-politik baru yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Pancasila telah menjadi panggung yang terbuka bagi identitas yang berbeda-beda. Ekspresi agama sebagai identitas tidak lagi dianggap sebagai ancaman, malah menjadi kekuatan sosial-politik baru.

<sup>15</sup> Robert W. Hefner membaca berdirinya ICMI sebagai konvergensi yang rumit antara kekuatan-kekuatan sosial, antara lain: meningkatnya kelas menengah, meningkatnya proporsi muslim di tengah populasi, dan kepentingan Soeharto mencari basis dukungan baru di luar tentara. Kepemimpinan ICMI didominasi oleh pejabat negara namun membuka ruang bagi diskusi tema-tema yang selama ini dianggap tabu, seperti HAM, keadilan sosial, pluralisme, bahkan ekonomi Islam. Lihat Heffner (terj.). *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

### ***Dialektika Demokrasi dan Pembangunan***

Perang ideologi dan paradigma “politik sebagai panglima” yang diusung Orde Lama telah mengabaikan kesejahteraan rakyat. Hingar-bingar politik hampir tak bertaut dengan denyut kehidupan rakyat yang makin hari makin didera kemiskinan.

Orde Baru hadir sebagai antitesis dari Orde Lama setelah melewati masa transisi yang berdarah. Dengan mengedepankan “ekonomi sebagai panglima”, Orde Baru memberangus kebebasan politik atas nama stabilitas. Negara tampil sebagai aktor ekonomi utama yang kemudian digerogoti oleh praktik kolusi dan kroniisme dari para aktornya.

Selain dari sisi aktor, dalam hal konsep dan paradigma ekonomi pun tidak terjadi perdebatan yang mampu muncul ke permukaan. Pembangunan ekonomi Orde Baru berkiblat penuh dan didukung sepenuhnya oleh kapitalisme Barat. Banyak teknokrat Orde Baru yang merupakan alumnus Amerika hingga dijuluki “mafia Berkeley”. Utang luar negeri dan asistensi teknis dari hubungan bilateral dan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, menjadi arus utama pembangunan Indonesia. Lembaga internasional pula yang memberi dukungan dan pujian, misalnya dalam bidang pangan dan keluarga berencana.

Di berbagai tempat muncul perlawanan terhadap gerak roda pembangunan Orde Baru. Namun, sifatnya masih lokal dan berkaitan dengan periuk nasi dan bukan berupa perlawanan yang sistematis. Beberapa kasus tanah dan konflik petani, seperti kasus Rancamaya, Kedungombo, Nipah, atau tragedi pembunuhan aktivis buruh Marsinah, merupakan percikan perlawanan namun masih takluk oleh solidnya rezim Orde baru yang bersendikan kekuatan militer.

Korupsi menjadi konsekuensi tak terelakkan dari sistem yang miskin *chekcs & balances* dari publik. Korupsi di masa Orde Baru tampil dalam segala bentuknya: nepotisme, kolusi dan manipulasi. Pelayanan

publik yang menjadi hak dasar warga negara menjadi barang dagangan berbayar. Begitu juga dengan pelaksanaan proyek-proyek negara. “Kanker” korupsi inilah yang nanti terbawa hingga kita melewati masa pasca-Reformasi.

Pada era ini kita mengenal satu aktor di ranah politik, yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tampil sebagai instrumen advokasi bahkan konfrontasi antara negara dan masyarakat sipil. Fokus LSM adalah penguatan atau pemberdayaan masyarakat sehingga posisinya tidak sepenuhnya bergantung pada negara melainkan sebaliknya, mampu menyampaikan kritik dan masukan kepada negara. LSM (yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organisation/ Organisasi Non-Pemerintah*) adalah salah satu elemen kemandirian masyarakat sipil untuk bernegosiasi di luar saluran formal, seperti partai politik atau DPR. Apalagi di tengah suasana otoriter, LSM tampil sebagai saluran aspirasi dan perjuangan terhadap kesewenang-wenangan negara.

Berbeda dengan ormas yang sudah dikenal sebelumnya, LSM ini tampil dengan isu-isu spesifik seperti bantuan hukum, lingkungan dan perburuhan dengan dilengkapi teknik dan perangkat advokasi yang sebelumnya tidak dimiliki ormas.

LSM menjadi salah satu dari cikal-bakal oposisi terhadap Orde Baru. Perannya sangat penting dalam menggulirkan wacana demokrasi di Indonesia. Peran generasi perintis LSM yang hadir pada 1970-an dan generasi LSM yang baru prodemokrasi dan HAM yang menguat pada penghujung Orde Baru, sangat signifikan saat menumbangkan Soeharto. Namun, fragmentasi ideologis, seperti yang juga diidap oleh kelompok oposisi lainnya, menyebabkan LSM seperti kehilangan orientasi ketika kehilangan “musuh bersama” berupa rezim yang otoriter.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Uhlin, Anders. (terj.) *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).



LSM ini belakangan bertransformasi menjadi agen demokratisasi dengan isu-isu yang lebih luas, seperti pendidikan politik dan pemantauan pemilu, yang pada gilirannya nanti menjadi sumber kaderisasi elite politik yang mengisi ruang publik di era Reformasi.

Krisis ekonomi yang dipicu krisis moneter 1997 memukul sendi legitimasi Orde Baru tentang kemakmuran ekonomi. Memang, selain pukulan krisis, Orde Baru pada waktu itu melakukan kesalahan mendasar dalam mempertontonkan kroniisme dengan mengangkat “orang Cendana” sebagai menteri pada kabinet terakhir Soeharto.

Yang alpa dibangun oleh Orde Baru adalah tatanan kelembagaan. Padahal, tatanan kelembagaan inilah—yang mencakup kelembagaan ekonomi dan politik—yang akan menentukan kesejahteraan sebuah bangsa.<sup>17</sup> Kelembagaan ekonomi menentukan insentif ekonomi sementara kelembagaan politik berperan dalam menentukan bagaimana proses tersebut bekerja. Kelembagaan politik mencakup konstitusi, tingkat pencapaian demokrasi dan kekuatan serta kapasitas negara dalam mengatur masyarakat.

Kealpaan Orde Baru membangun kelembagaan ini berujung pada pemusatan kekuasaan atau oligarki politik dengan segala dampaknya, termasuk korupsi. Inilah yang kemudian dikritik bahkan dilengserkan oleh gerakan Reformasi.

Dari kaca mata politik, gerakan Reformasi yang awalnya diusung oleh mahasiswa merupakan koreksi dan perlawanan terhadap kekuasaan oligarkis Orde Baru. Namun, jika kita lihat dalam spektrum yang lebih luas, dalam perjalanan sejarah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Reformasi adalah sintesis, dari tesis Orde Lama dan antitesis Orde Baru.

---

<sup>17</sup> Acemoglu, Daren & James A. Robinson. *Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty* (London: Profile Books, 2012).

Pada fase ini, dengan segala kegaduhannya, kita mulai memantapkan budaya demokrasi, sebagai bagian dari usaha mewujudkan negara-bangsa yang modern. Gerakan Reformasi terutama membentur cara berpikir masyarakat tentang kekuasaan. Jika kita lihat Enam Tuntutan Reformasi yang mengkristal di kalangan mahasiswa, kita bisa melihat bahwa inti tuntutan itu adalah pengaturan kekuasaan.

Masalah korupsi dan otonomi daerah adalah dua masalah yang merupakan kelindan antara masalah politik dan ekonomi. Politik oligarkis dan otoriter telah menyuburkan korupsi, sementara kekuatan material yang terakumulasi lewat korupsi, ikut meningkatkan pengaruh politik orang atau kelompok yang bersangkutan. Masalah otonomi daerah sebagai tuntutan Reformasi akan dibahas tersendiri sesudah ini.

### **Enam Tuntutan Reformasi**

1.	Penegakan supremasi hukum
2.	Pemberantasan KKN
3.	Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya
4.	Amandemen UUD 1945
5.	Pencabutan dwi fungsi TNI/Polri
6.	Otonomi daerah

Korupsi merupakan indikator yang jelas mengenai kelembagaan politik yang mempengaruhi kelembagaan ekonomi. Kelembagaan politiklah yang menentukan kelembagaan ekonomi, dan akhirnya kinerja ekonomi. Politik adalah proses dimana masyarakat memilih aturan yang akan mereka jalani sendiri. Kelembagaan politik adalah kunci penentu pertandingan distribusi kekuasaan di dalam masyarakat. Kelembagaan politik menentukan siapa pemegang kekuasaan di dalam masyarakat dan sampai tingkat mana kekuasaan itu dapat digunakan.

Dengan perspektif tersebut, tuntutan Reformasi adalah menyeimbangkan kekuasaan yang sebelumnya digunakan secara semena-mena oleh Orde Baru. Penegakan supremasi hukum dan amandemen konstitusi menjadi pondasi bagi pengaturan kekuasaan yang seimbang tersebut.

Sampai sekarang kita masih punya banyak PR dalam membangun kelembagaan politik dan ekonomi. Banyak aspek prosedural dalam demokrasi yang sudah dipenuhi, seperti pemilihan umum, pembatasan masa jabatan pejabat publik dan DPR yang mampu mengimbangi kekuatan eksekutif. Namun, semua itu harus digerakkan untuk menjawab pertanyaan substansial, yaitu bagaimana demokrasi mampu memberikan hasil yang konkret berupa kesejahteraan rakyat. Kebebasan yang kita nikmati sekarang adalah modal untuk berusaha tanpa rasa takut untuk mewujudkan kemakmuran.

### ***Negara dan Masyarakat Sipil***

Ada tiga organ penting dalam masyarakat yang menjadi perhatian dalam kajian hubungan negara-masyarakat sipil, yaitu partai politik, media massa dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Partai politik berperan sebagai jembatan antara negara dan rakyat dalam proses dan mekanisme politik formal seperti pemilihan umum, pembentukan pemerintahan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR sebagai perwakilan rakyat. Media massa disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena berperan sebagai kontrol sosial melalui penyebaran informasi. Sepanjang sejarah pers selalu menjadi obyek kontrol pemerintahan otoriter dan kerap menjadi motor proses demokratisasi. Ormas mengurus masalah-masalah sosial yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh negara dan mengisi proses yang tidak dapat dicakup dalam mekanisme formal oleh partai politik. Beberapa ormas besar, terutama yang bercorak agama seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, melebarkan sayap hingga

membangun universitas, rumah sakit dan lembaga keuangan. Organisasi ini juga menjadi tempat persemaian kaderisasi kepemimpinan sosial dan politik. Berbeda dengan ormas, LSM hadir memberi warna khusus karena fokus yang spesifik dan aksi-aksinya menggunakan opini publik.

Partai politik telah menjadi organisasi pergerakan nasional sejak era sebelum kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, partai menjadi wadah ideologi yang rigid, terutama pada pemilu 1955 dan saat eksperimen sistem parlementer. Partai politik menjadi tumpuan jalannya pemerintahan dan proses di parlemen telah membuat jatuh-bangun kabinet demi kabinet. Negara tidak banyak mengontrol partai politik. Bahkan pada masa Orde Lama, partai politik menjadi organisasi yang lengkap, memiliki media massa, sayap organisasi pada tiap sektor, seperti buruh, tani dan seniman, bahkan memiliki organ paramiliter.

Media massa juga berevolusi mengikuti jalur yang relatif sama. Setelah menjadi corong perjuangan kemerdekaan, media berubah menjadi corong ideologi partai politik. Pada masa Orde Lama, setiap partai politik mempunyai surat kabar. Masyumi memiliki *Abadi* sementara NU bersuara lewat *Duta Masyarakat*; *Harian Rakyat* milik PKI dan PNI mempunyai *Suluh Indonesia*. Bahkan Golongan Karya pada masa awal Orde Baru mendirikan surat kabar harian *Suara Karya* untuk mempengaruhi opini publik terhadap pemerintah Orde Baru, khususnya untuk memenangkan pemilu 1971.<sup>18</sup> Berkembangnya LSM sebagai wadah masyarakat sipil telah dijelaskan berkaitan dengan paradigma pembangunan yang dianut Indonesia pada waktu itu.

Di masa Orde Baru praktis semua elemen masyarakat sipil berada dalam genggaman negara. Orde Baru merancang peraturan perundangundangan yang dengan sistematis mengkanalisasi potensi

---

<sup>18</sup> Dapat dilihat pada portal berita <http://www.suarakarya-online.com/aboutus.html> dan [http://en.wikipedia.org/wiki/Suara\\_Karya](http://en.wikipedia.org/wiki/Suara_Karya)

masyarakat sipil ke dalam saluran “resmi” yang diresmikan rezim. Organisasi pers hanya boleh ada satu dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) adalah secarik kertas yang menentukan nyawa sebuah media. Menguatnya masyarakat sipil dan berkurangnya dominasi negara adalah isu penting yang nantinya mewarnai dinamika di gelombang ketiga. Bagaimana peran negara ketika masyarakat menguat? Ini yang perlu dijawab oleh lembaga-lembaga politik.

Di era Reformasi, air bah kebebasan telah membuat surplus partisipasi politik dan opini publik. Masyarakat sipil pada era awal Reformasi seperti “Orang Kaya Baru (OKB)” yang tiba-tiba punya uang banyak dan tidak tahu bagaimana membelanjakannya dengan bijak.<sup>19</sup> Kebebasan pers malah digunakan untuk mempublikasikan desas-desus dan gunjingan, tanpa mengikuti kaidah jurnalistik yang semestinya. LSM yang semula mendapat tempat di hati masyarakat juga mengalami “inflasi nilai” karena praktek oknum yang mengatasnamakan LSM untuk kepentingan tertentu.

Lima belas tahun sejak Reformasi bergulir, evolusi politik menemukan banyak titik temu. Misalnya dalam soal jumlah partai politik. Partai politik yang banyak cocok pada zaman setelah kemerdekaan, karena pada saat itu kita sedang dalam proses membangun pondasi negara. Ideologi dan identitas dikonteskan secara terbuka untuk menguji secara empirik penerimaan dan kemampuan bekerja (*workability*) ideologi tersebut. Namun, pertentangan yang sengit ternyata tidak berujung pada konsensus yang kokoh, malah membuat masalah pemerintahan berlarut-larut karena debat tak berujung dalam sidang Konstituante. Orde Baru menyederhanakan partai, namun untuk kepentingan kontrol otoriter dan dilakukan dengan paksaan. Pada era Reformasi, kita belajar bahwa jumlah partai politik perlu disederhanakan secara alamiah, yaitu melalui kompetisi.

---

<sup>19</sup> Kleden, Ignas. “Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia” dalam *Seribu Tahun Nusantara*.

Lima belas tahun Reformasi menutup perdebatan “kanan vs. kiri” dalam politik Indonesia. Bukan karena salah satunya menang mutlak, namun karena munculnya kelas menengah baru yang keluar dari pembelahan usang tersebut. Kelas menengah inilah yang akan mendorong momentum perubahan lebih besar pada gelombang ketiga.

Lima belas tahun Reformasi menutup perdebatan “kanan vs. kiri” dalam politik Indonesia. Bukan karena salah satunya menang mutlak, namun karena munculnya kelas menengah baru yang keluar dari pembelahan usang tersebut.

Robert Corfe mencatat perubahan ekspresi identitas politik masyarakat yang tidak lagi tercermin pada keanggotaan partai atau ideologi “besar” lainnya, melainkan semakin tertuju pada organisasi atau gerakan dengan isu tunggal dan spesifik di tingkat nasional dan internasional.<sup>20</sup> Awalnya analisis Corfe ditujukan pada masyarakat Inggris, namun dalam batas tertentu, pisau analisis ini juga bisa digunakan untuk membedah fenomena global.

Kecenderungan pilihan pada isu tunggal adalah saluran untuk mengalirkan frustrasi masyarakat terhadap kebuntuan yang tak mampu dipecahkan oleh partai politik dan kelompok ideologis. Masyarakat kini membalik perspektif, melakukan tindakan kecil sebagai ekspresi

---

<sup>20</sup> Corfe, Robert. *The Future of Politics – with the demise of the left/right confrontational system* (London: Arena Books, 2010).

pemikiran atau gagasan. Namun, tindakan kecil tersebut belum mampu menggantikan solusi terhadap permasalahan besar di tingkatan nasional dan internasional.

Ketegangan dialektis dalam suasana demokratis antara negara dan masyarakat sipil inilah yang diharapkan menjadi energi penggerak sistem politik yang bertanggung jawab. Negara dikontrol partai politik, sementara partai politik dikontrol oleh media dan masyarakat. Perselisihan antara negara dan media tidak lagi diselesaikan melalui pembredelan, namun melalui mediasi dan sidang kode etik di Dewan Pers. Proses semacam ini akan berakumulasi pada pematangan budaya demokrasi yang menjadi tonggak penting dalam gelombang ketiga sejarah Indonesia yang akan dijelaskan selanjutnya.

### ***Pusat dan Daerah***

Bangsa Indonesia sejak awal menyadari luasnya wilayah negara kita dan kompleksitas permasalahan yang mengiringinya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat oleh aktor-aktor daerah menjadi tema perdebatan klasik sejak Indonesia baru saja merdeka hingga sekarang.

Di masa Orde Lama, kekecewaan terhadap pemerintah pusat sampai berujung pada perlawanan bersenjata, seperti yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta. Memang ada unsur konflik politik dan pertentangan ideologi antar-elite yang menjadi faktor mematangkan keresahan menjadi konflik berdarah. Para pelaku PRRI sampai saat ini menolak jika apa yang mereka lakukan disebut sebagai pemberontakan. Sejarah mencatat, wilayah Sumatra Barat adalah salah satu basis perlawanan terhadap penjajahan. Apa yang mereka lakukan hanyalah “ultimatum” mengenai pemerataan pembangunan.

Kekuatan senjata menjadi jawaban Orde Baru terhadap ketegangan pusat dan daerah. Jejaring militer dari atas sampai bawah, mulai dari

Kowilhan hingga Babinsa,<sup>21</sup> menjadi tulang punggung manajemen konflik Orde Baru. Kristalisasi ketegangan ini adalah terbentuknya organisasi dengan aspirasi memisahkan diri dari NKRI. Di Aceh ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bergerak sejak 1976. Eskalasi konflik terjadi pada periode 1990-an hingga berakhir pada bulan Agustus 1998, ketika Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa ini diindikasikan banyak terjadi pelanggaran HAM. Setelah Reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dimulai sebuah dialog panjang menuju perdamaian di Aceh melalui Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan GAM di Jenewa pada Mei 2000. Pintu perdamaian semakin terbuka tatkala Aceh luluh-lantak dihantam tsunami pada 26 Desember 2004. Setelah melalui proses yang menegangkan, pada 15 Agustus 2005 disepakati Perjanjian Helsinki yang ditindaklanjuti dengan otonomi khusus kepada propinsi Nangroe Aceh Darussalam, termasuk ruang bagi adanya partai politik lokal untuk berkompetisi di pemilu lokal.

“Monumen” ketegangan pusat-daerah lainnya adalah Papua. Terkait dengan sejarah panjang masuknya Papua ke Indonesia, hingga kesenjangan ekonomi yang sangat parah walau di sana ada pertambangan emas dan tembaga yang menjadi pemasok kemakmuran ke pusat. Otonomi khusus juga akhirnya menjadi konsensus pemerintah dengan warga Papua, sekaligus menjadi kebijakan afirmatif untuk menyejahterakan propinsi paling timur itu. Di dalam skema otonomi khusus tersebut, selain Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Khusus sebagai instrumen pemberdayaan secara finansial, dibentuk Majelis

---

<sup>21</sup> Sebelum struktur yang sekarang, TNI mengenal Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) yang membagi Indonesia menjadi lima wilayah baru kemudian di bawahnya ada Komando Daerah Militer (Kodam). Pada masa kepemimpinan L.B. Moerdani, diadakan reorganisasi dan regenerasi dimana Kowilhan dibubarkan dan wilayah kodam diperkecil. Dari dulu sejak sekarang, kita bisa melihat bahwa struktural teritorial TNI, khususnya TNI AD, merupakan pantulan cermin struktur pemerintahan, mulai di tingkat pusat hingga tingkat desa.



Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Memang, problem di Aceh dan Papua bukan semata masalah kesejahteraan. Ada konteks sejarah dan politik yang panjang melatarinya. Karena itu, masalah di kedua daerah itu tidak bisa hanya dijawab dengan kebijakan ekonomi, namun harus dibarengi dengan dialog yang konstruktif dari pemerintah pusat.

Ketegangan pusat dan daerah ini juga menjadi agenda penting Reformasi. Tuntutan otonomi daerah menjadi salah satu tuntutan mahasiswa. Sejumlah peraturan dan tatanan kelembagaan dibangun untuk menjembatani ketegangan ini. Penetapan alokasi anggaran yang lebih berpihak ke daerah, serta penghilangan sentralisasi pemerintahan melalui pemerintahan kepala daerah langsung adalah pilar utama otonomi daerah.

Jika kita lihat lebih dalam, akar masalah pusat-daerah ini bukan semata ekonomi. Ada dua hal lain yang menjadi faktor, yaitu identitas dan kekuasaan. Identitas sering dihubungkan dengan sejarah daerah-daerah dalam naungan Indonesia. Papua masuk ke pangkuan ibu pertiwi melalui proses referendum yang menyebabkan proses “menjadi Indonesia” harus terus ditumbuhkan di tengah kesenjangan ekonomi yang coba dijembatani lewat sejumlah kebijakan afirmatif. Masalah kekuasaan juga coba diselesaikan dengan pelimpahan wewenang dan pilkada langsung.

Secara umum, ketegangan pusat dan daerah telah berhasil dikelola walau masih ada insiden di sana-sini. Sampai hari ini kita masih mendengar peristiwa kekerasan di Papua. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, kita bisa menyimpulkan keseimbangan antara kebebasan otonomi daerah dan—pada saat yang sama—keutuhan integrasi nasional

sudah tercapai. Kekuatan yang satu tidak perlu menegasikan yang lain. Distribusi kewenangan dan legitimasi melalui otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung, serta distribusi kesejahteraan melalui politik anggaran di APBN telah menjadi katalis lahirnya keseimbangan ini.

### Implikasi Perdebatan

Salah satu implikasi penting dari perdebatan mencari sistem yang kompatibel adalah terjadinya konflik pada berbagai derajat. Ada konflik yang lebih berupa polemik di wacana publik, hingga konflik bersenjata. Dari perjalanan hingga ke gelombang ketiga sejarah Indonesia, ada tiga tipikal konflik yang terjadi, yaitu:

- **Konflik vertikal**, yaitu konflik pusat-daerah yang dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, ketegangan ini telah memicu konflik bersenjata. Setelah 70 tahun, konflik pusat-daerah telah termoderasi oleh penerapan otonomi daerah dan pilkada langsung. Konflik lebih berupa polemik di ruang publik yang dicari solusinya melalui kebijakan pemerintah.
- **Konflik horisontal**, yang biasanya dipicu masalah suku, agama, ras, antar-golongan (SARA). Pada awal Reformasi kita menyaksikan konflik horisontal yang amat tragis di Ambon, Poso, Sampit dan belahan nusantara lainnya. Konflik ini terjadi karena hilangnya kemampuan masyarakat mengelola konflik akibat represi militer pada masa Orde Baru. Pada masa itu, setiap potensi konflik selalu diredam dengan kekuatan aparat keamanan, baik polisi maupun militer, sehingga masyarakat tidak terbiasa membangun konsensus atas banyak perbedaan yang harus dihadapi sehari-hari. Konflik meningkat juga disebabkan karena pada saat itu kekuatan aparat keamanan melemah. TNI mengalami delegitimasi karena dituding sebagai pendukung Orde Baru sementara Polri belum sekuat sekarang.

- **Konflik elite**, lebih merupakan pertentangan kepentingan elite politik. Namun, dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, konflik di “ruang tertutup” tersebut bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar dan terbuka. G-30-S dengan segala kontroversi sejarahnya bisa dibaca sebagai konflik politik antar-elite yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata. Dalam perspektif yang sama, kita juga bisa menempatkan konflik Negara Islam Indonesia (NII), yang juga sering disebut sebagai pemberontakan DI/TII sebagai konflik elite. NII diproklamirkan pada pertengahan 1949 di Jawa Barat ketika Negara Pasundan buatan Belanda dalam kerangka RIS dibentuk. Gerakan ini mendapat sambutan secara sporadis di berbagai daerah, seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Konflik elite biasanya tidak tuntas terselesaikan dan menyimpan luka yang dalam. Sampai sekarang kita masih mendengar opini negatif terhadap keturunan PKI dan NII walau sudah banyak usaha rekonsiliasi dari berbagai pihak.

## **Perang Dingin & Demokratisasi Global**

Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia berada pada keseimbangan yang goyah akibat tarik-menarik dua kubu ideologi besar: kapitalisme dan komunisme. Perang Dunia di belahan Eropa berakhir dengan invasi Jerman oleh Tentara Sekutu dan Uni Soviet hingga Jerman menyerah pada 8 Mei 1945. Setelah itu Amerika Serikat sukses menghentikan dominasi Jepang di Asia dengan serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki yang kemudian berdampak pada kemerdekaan Indonesia.

“Barat” secara sepihak mengumumkan diri sebagai pemenang PD II, menyisakan Jerman dan Jepang yang porak-poranda dan terlilit utang akibat kekalahan perang. Pada saat yang sama, melemahnya kekuasaan Eropa di tanah jajahan memulai proses dekolonisasi di Asia dan Afrika.

Kemenangan Barat dilembagakan dengan pembentukan Liga Bangsa Bangsa yang kemudian berganti menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebagai “pemenang”, Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris dan Perancis langsung menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Setelah kerja sama yang singkat dalam PD II, AS dan Uni Soviet kemudian menjadi rival adidaya yang menyulut Perang Dingin yang berlangsung hingga runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet.

Masing-masing kubu membentuk sekutu dan melancarkan perang urat syaraf melalui aksi intelijen dan strategi diplomasi agresif. Tindakan simbolik untuk menekan dan merusak reputasi terus dimainkan. Amerika dan sekutunya memboikot Olimpiade Musim Panas 1980 di Moskow dengan dalih sebagai protes invasi Soviet di Afghanistan. Sebagai balasannya, perlombaan akbar serupa di Los Angeles, AS, tahun 1984 diboikot oleh Uni Soviet dan belasan negara sekutunya, termasuk Jerman Timur, Laos, Bulgaria dan Mongolia.

Masing-masing negara pun melancarkan operasi untuk mencegah satu negara berpaling atau terpengaruh oleh ideologi lawan. Partai-partai berhaluan kiri di seluruh dunia menjadi target operasi Amerika. Sebagian analis mengatakan, Indonesia mendapat dukungan untuk mengintegrasikan Timor Timur karena partai sosialis memenangkan pemilu di Portugal dan dikhawatirkan Timor Timur menjadi “hub” bagi Blok Timur di Asia Oceania.

Jejak-jejak perang ideologi dunia terasa sejak era pergerakan kemerdekaan. Keterkaitan para pendiri bangsa dengan ideologi, jaringan bahkan organisasi internasional mewarnai perdebatan tentang Indonesia yang akan merdeka, dan sesudah Indonesia merdeka. Ambil contoh gerakan komunis. Tidak sedikit tokoh PKI yang juga menjadi tokoh penting dalam gerakan komunis internasional. Tan Malaka tercatat sebagai anggota komite eksekutif Komunisme Internasional

(Komintern) untuk Timur Jauh. Hal yang hampir sama juga terjadi pada gerakan Islam. Jejaring ulama dan lembaga pendidikan Islam dengan Mekkah pun begitu intens hingga memungkinkan terjadinya pertukaran pelajar. Contohnya, KH Ahmad Dahlan yang sepulang dari menuntut ilmu di Mekkah kemudian mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Contoh yang lain lagi adalah para pelajar Indonesia di Belanda, seperti Hatta dan Sjahrir, mendapat pengaruh sosialisme dari pendidikan dan pergaulannya.

Pengaruh berbagai ideologi ini bertemu di Indonesia. Sebagai pembaca yang tekun narasi-narasi besar dunia, Soekarno mencoba bereksperimen dengan memadukan berbagai ideologi dan diberi racikan Indonesia, seperti Nasakom dan Marhaenisme. Di ranah internasional, Soekarno menyulut kebanggaan dan solidaritas simbolik melalui Konferensi Asia Afrika dan pertandingan olah raga GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) sebagai tandingan dari Olimpiade dan merespon pembatalan Asian Games 1962 yang semula akan dilaksanakan di Jakarta.

Partai-partai politik di Indonesia juga menjadi kepanjangan bagi kecamuk ideologi dunia. Ini pula yang menyebabkan perdebatan di Konstituante lebih sengit dibanding perdebatan di BPUPKI/ PPKI. Ideologi-ideologi juga muncul dengan berbagai variannya yang rigid pada berbagai partai politik Indonesia. Pada pemilu 1955 tercatat paling tidak ada tiga partai yang berhaluan kiri: Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia dan Partai Murba. Masing-masing memiliki karakteristik dan basis massanya sendiri.

Dengan alasan pemulihan ketertiban dan mengedepankan kemakmuran ekonomi, Orde Baru menutup debat ideologi, bahkan melarang dan menciptakan ketakutan serta kebencian terhadap komunisme. Islam politik pun akhirnya dijadikan musuh dengan imbuhan stigma “ekstrem kanan” ketika dianggap membahayakan kepentingan Orba.

Indonesia Orde Baru adalah anak manis kapitalisme Barat. Program bantuan dan utang luar negeri serta beasiswa untuk para teknokrat menjadi satu paket memasukkan Indonesia ke dalam gelombang modernisasi dunia. Bahkan, negara-negara donor membentuk konsorsium, seperti IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang kemudian berganti menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia), juga Paris Club, untuk menggelontorkan utang luar negeri dan dengan demikian mengendalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Dari sisi lain, kita bisa melihat Reformasi di Indonesia sebagai bagian dari proses demokratisasi global yang berlangsung sejak runtuhnya Tembok Berlin 1999. Bubarnya Uni Soviet diberi tafsir tunggal dan dominan sebagai bangkrutnya komunisme sekaligus kemenangan demokrasi dan kapitalisme. Bangkrutnya komunisme dan proses transisi menuju demokrasi di Eropa Timur berujung pada gugatan terhadap integrasi teritori. Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya, seperti Yugoslavia, Rumania, Ceko, Slowakia pecah, bahkan melalui proses yang sangat berdarah-darah.



Kerumunan massa beberapa hari sebelum Tembok Berlin dirobhkan. (Sumber: Wikipedia).

Trauma “Balkanisasi” ini sempat menghantui Indonesia pada masa transisi pasca-Orde Baru. Banyak gugatan dan konflik kedaerahan yang membuat Indonesia sebagai bangsa seolah berada di titik nadir eksistensinya. Terutama ketika konflik di Sampit atau Ambon terjadi. Indonesia seolah akan lenyap dari peta bumi. Namun, ancaman ini dapat diatasi dengan otonomi daerah dan model pemilihan umum yang semakin terbuka sehingga aspirasi dan partisipasi lokal dapat diwadahi dengan baik.

### **Transformasi Nilai**

Bangsa kita memasuki kemerdekaan nyaris tanpa persiapan kecuali keyakinan bahwa kemerdekaan, sebagai antidot dari keterjajahan yang nista dan menyengsarakan, adalah jalan menuju kesejahteraan. Namun, kemodernan yang menyertai kemerdekaan membawa ikutan berupa “kristalisasi” ideologi yang dibawa oleh para pendiri bangsa ini. Jadi, mereka bisa meninggalkan ikatan-ikatan tradisional kesukuan, namun mengikatkan atau mengasosiasikan diri dengan narasi-narasi besar ideologi yang bertempur sebagai “cara memandang realitas dunia” yang paling benar dan karenanya menyediakan resep keluar dari masalah yang paling mujarab.

Nasionalisme, sosialisme, komunisme, Islam, ideologi berdasarkan agama lain, beserta begitu banyak turunannya berlomba-lomba menafsirkan dunia dan berteriak bahwa tafsirannyalah yang paling benar. Ujung dari perlombaan ini tentu kekuasaan, karena dengan kekuasaanlah cara pandang dan resep yang dianggap mujarab itu bisa diaplikasikan di tingkat negara.

Dengan Perang Dingin sebagai *setting* global, tak heran jika perang ideologi mewarnai tahap awal pembentukan negara-bangsa pasca-kemerdekaan. Konflik dan kompetisi, atas nama klaim kebenaran ideologi tak terelakkan lagi, bahkan hingga dalam bentuknya yang paling

berdarah. Perbedaan yang pada masa persiapan kemerdekaan masih bisa diredam, ketika semua pihak mengedepankan tujuan yang lebih besar—yaitu Indonesia merdeka—kini mengejawantah nyata.

Konflik dan kompetisi yang berujung pada tragedi berdarah yang teramat traumatis itu membawa bangsa Indonesia berpaling pada keamanan, atau stabilitas dalam bahasa penguasa Orde Baru, karena belajar bahwa konflik dan persaingan tidak mampu menghadirkan kesejahteraan. Suasana trauma ini juga yang dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk melancarkan hegemoni, mengutamakan stabilitas demi kesejahteraan, dan melancarkan politik stigma kepada mereka yang bersikap kritis. Mayoritas rakyat terbius dengan janji stabilitas, bahkan dengan kepatuhan aktif mereka berpartisipasi dalam hegemoni Orde Baru. Baru ketika kesejahteraan yang selama itu menjadi klaim Orde Baru musnah akibat krisis moneter 1997-1998, legitimasi Orde Baru goyah dan timbul perlawanan.

---

Perjalanan di gelombang kedua ini juga memperlihatkan upaya mematu-matut diri dengan kemodernan (*conformity*) sebagai kelanjutan dari proyek modernisasi di gelombang pertama yang berujung pada nasionalisme Indonesia

---

Perjalanan di gelombang kedua ini juga memperlihatkan upaya mematu-matut diri dengan kemodernan (*conformity*) sebagai kelanjutan dari proyek modernisasi di gelombang pertama yang berujung pada nasionalisme Indonesia. Kemodernan yang dicapai



melalui pendidikan ini yang nantinya menjadi modal untuk perubahan besar di penghujung Orde Baru. Kemodernan ini juga yang nantinya akan mengantarkan kita memasuki gelombang ketiga.

Pengembangan proyek modernitas ini juga tampak dari lahirnya Pancasila sebagai konsensus yang menjaga serat-serat kebangsaan Indonesia. Pancasila sempat didominasi pemaknaannya, bahkan dipakai sebagai alat justifikasi dan palu godam oleh Orde Baru. Namun, konflik berdarah di Banyuwangi atau Sampit pada masa transisi Reformasi, membawa kita pada kesimpulan bahwa Pancasila masih mampu mempersatukan kita. Dia lahir dari perumusan hakikat manusia Indonesia yang religius, berperikemanusiaan, ingin bersatu, demokratis dan menjunjung keadilan.

Sepanjang gelombang kedua ini bangsa Indonesia belajar, mulai dari perebutan siapa yang paling benar hingga bagaimana membangun konsensus dalam lingkungan yang bebas dan demokratis. Proses itu masih berlangsung sekarang. Karena itu, saya kerap mengatakan bahwa kebisingan politik yang kita dengar sekarang, walau kadang melelahkan, adalah sebuah proses yang produktif.

## **Pencapaian**

Sebagaimana bayi yang baru lahir, Indonesia adalah negara baru yang rapuh, terombang-ambing dalam perang ideologi dan konflik elite. Perang ideologi menjadi lebih keras karena beriringan dengan perebutan kekuasaan politik. Memenangkan kekuasaan politik adalah cara paling efektif untuk menerapkan ideologi yang dipercayai.

Namun di tengah perang ideologi yang keras dan berdarah itu, Soekarno dan para pemimpin politik telah menyumbang satu pondasi penting bagi Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila, konstitusi UUD 1945 dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada waktu itu, UUD 1945 adalah konstitusi yang modern dan maju melampaui zamannya. Memang belakangan kita belajar bahwa ringkas dan sederhananya UUD 1945 memungkinkan penfasiran yang bermacam-macam, termasuk tafsir untuk kepentingan kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru.

Kemudian kita belajar bahwa konstitusi yang maju dan modern ini tidak bertaut dengan realitas masyarakat. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, ditambah rendahnya tingkat pendidikan, membuat jarak antara negara dan rakyat menganga akibat ketidaktahuan. Kondisi konstitusi UUD 1945 ini berbeda dengan Pancasila yang—walupun baru pada tahap awal—telah menjadi konsensus sosial di masyarakat. Era ini merupakan pelajaran tentang konstitusi yang kuat, namun pemerintahan lemah. Timbul banyak pemberontakan akibat lemahnya wibawa negara.

Pada masa Orde Baru, lembaga negara mengalami penguatan signifikan, terutama dengan dukungan militer. Militer yang pada masa Orde lama menjadi aktor politik yang kadang berseberangan dengan pemerintah, pada masa Orde Baru ini menjadi tulang punggung utama. Konstitusi modern yang dihasilkan oleh Orde Lama dijalankan oleh negara yang kuat oleh Orde Baru. Sayangnya, negara kuat Orde Baru telah menjadi begitu eksekutif hingga menghasilkan sentralisasi kekuasaan. Kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan menuntut ongkos hilangnya kebebasan politik.

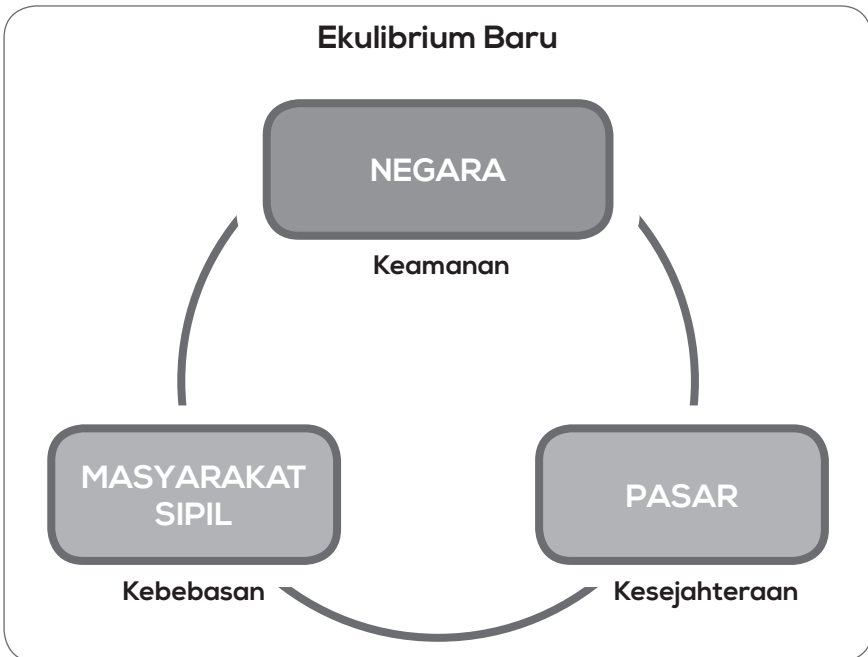
Setelah berayun bagai pendulum dari ekstrem yang satu ke titik ujung lainnya, Indonesia telah berhasil membangun beberapa ekuilibrium baru pada era Reformasi. Beberapa keseimbangan yang berhasil kita capai antara lain:

*Pertama*, keseimbangan dalam relasi negara dan agama. Kita sudah sampai pada konsensus. Kita bisa menggunakan asas Islam dalam negara Pancasila. Kita bisa menempatkan Pancasila sebagai panggung terbuka bagi identitas yang berbeda-beda.

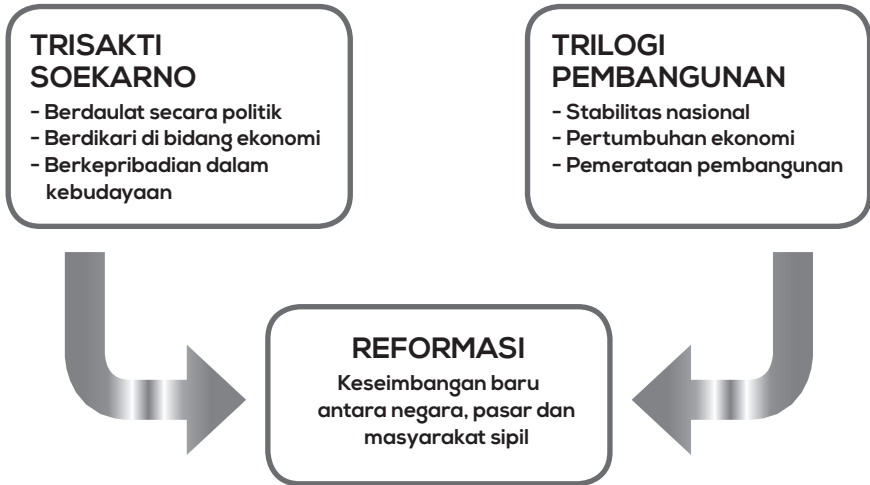
*Kedua*, kita mulai menemukan keseimbangan antara kebebasan dan kesejahteraan, antara demokrasi dan pembangunan. Walaupun belum memenuhi standar ideal, tetapi setidaknya kita sudah mengarah ke sana.

*Ketiga*, kita juga mengarah pada titik temu antara kebebasan dan keamanan, karena keamanan kini lebih bermakna ketertiban bersama dari sesama warga masyarakat ketimbang intervensi daya paksa negara ke tengah kehidupan sosial dan privat.

*Keempat*, kita dapat menyimpulkan keseimbangan antara kebebasan otonomi daerah dan—pada saat yang sama—keutuhan integrasi nasional. Kekuatan yang satu tidak perlu menegasikan yang lain. Distribusi kewenangan dan legitimasi melalui otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung, serta distribusi kesejahteraan melalui politik anggaran di APBN telah menjadi katalis lahirnya keseimbangan ini.



Jika kita menggunakan jargon pada masing-masing orde, maka Reformasi adalah sintesis dari Trisakti Soekarno, yang cenderung pada politik, dengan Trilogi Pembangunan Soeharto yang sarat dengan bobot ekonomi.



### Gelombang Kedua: Menjadi Negara-Bangsa Modern

<b>Faktor Pendorong</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perang Dingin (eksternal)</li><li>- Pencarian sistem yang kompatibel dengan sejarah dan budaya kita (internal)</li></ul>
<b>Nilai-nilai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konflik &amp; kompetisi</li><li>- Keamanan</li><li>- Menyesuaikan diri dengan kemodernan (<i>conformity</i>)</li></ul>
<b>Pencapaian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konstitusi modern UUD 1945</li><li>- Penguatan lembaga negara</li><li>- Keseimbangan baru dalam format negara-bangsa modern</li><li>- Bahasa</li></ul>

# Gelombang Ketiga

## Masyarakat Baru Indonesia

**D**ua gelombang dalam sejarah Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor eksternal. Kini kita memasuki gelombang ketiga dengan faktor pendorong yang berbeda, yang terutama berasal dari dalam, yaitu perubahan komposisi demografi dan budaya. Karakteristik masyarakat baru Indonesia di gelombang ketiga ini adalah:

- Kelas menengah baru yang dibentuk oleh orang berusia 45 tahun ke bawah
- Berpendidikan cukup tinggi
- Kesejahteraan semakin membaik
- Terhubung (*well connected*) dengan lingkungan global melalui internet
- Lahirnya kelompok "*native democracy*"

Komposisi penduduk Indonesia sedang condong ke usia muda, bahkan didominasi oleh penduduk berusia 45 tahun ke bawah. Proyeksi demografis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2014 ini angka usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 65 persen. Penduduk

berusia muda ini memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang cukup tinggi. Indonesia telah masuk ke ambang pendapatan per kapita USD 3.000 sejak awal 2011. Karakter lain dari kelompok ini adalah koneksi ke dunia luar melalui internet (*well connected*). Diperkirakan kurang-lebih 60 juta orang Indonesia terhubung dengan *social media*. Angka itu sama dengan hampir 25% dari penduduk Indonesia. Inilah “*the new majority*”, kelompok mayoritas baru Indonesia sekarang ini.

### Kelas Menengah dalam Populasi

Kelas	Pendapatan per Hari (USD)	2003		2010	
Rendah	< 1,25	21,9%	62,2%	14,0%	43,3%
	1,25 – 2	40,3%		29,3%	
Menengah	2 – 4	32,1%	37,7%	38,5%	56,5%
	4 – 6	3,9%		11,7%	
	6 – 10	1,3%		5,0%	
	10 – 20	0,3%		1,3%	
Tinggi	> 20	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%

Sumber: Susenas, dikutip dari Bisnis Indonesia, 7 Maret 2012.

### Efek Demografi

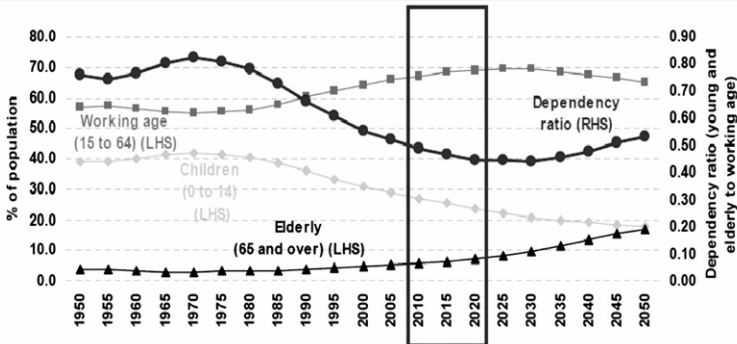
Implikasi ekonomi di depan mata dari komposisi demografi baru ini adalah meningkatnya produktivitas karena penduduk produktif (usia kerja) lebih banyak dari penduduk tidak produktif (anak-anak dan orang tua). Bahkan pada satu titik, yang sejumlah pakar meramalkan pada 2020, angka Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Indonesia begitu rendah karena jumlah usia produktif jauh di atas kelompok tergantung itu. Selisih yang tinggi ini oleh pakar ekonomi dan kependudukan disebut sebagai “dividen demografi” atau “bonus demografi”. Sejarah

mencatat, sejumlah negara mencapai kesejahteraan sebagai hasil dari bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik.

Tingkat pendidikan yang cukup tinggi merupakan hasil dari akselerasi pembangunan material pada masa Orde Baru. Pendidikan ini menjadi modal mobilisasi vertikal yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan. Sebagian besar bangsa Indonesia telah melampaui fase kebutuhan dasar pada piramida kebutuhan Maslow dan mulai melangkah ke tingkatan berikutnya, yaitu kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan menjadi bagian dari kelompok tertentu (*belonging needs*).

### Dividen Demografi

Figure 42: Indonesia's demographic window of opportunity will close in the next decade



Yang menarik, menguatnya *belonging needs* ini bersamaan dengan semakin masuknya internet dalam kehidupan kita. *Social media* menjadi saluran ekspresi diri dalam ruang yang relatif datar, terbuka dan nyaris tanpa batas. Kelompok yang sedang membutuhkan rasa terasosiasi dengan kelompok atau citra tertentu ini dipuaskan oleh tersedianya jejaring sosial tempat memunculkan eksistensi.

Inilah kelompok mayoritas baru Indonesia yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah. Indonesia mengalami lompatan ekonomi, sosial dan politik begitu jauh dalam waktu begitu singkat.



### Lahirnya “*Native Democracy*”

Pada gelombang ketiga ini kita menyaksikan lahirnya “*native democracy*”, generasi yang sejak lahir hanya mengenal demokrasi. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 adalah mereka yang lahir pada rentang 1992-1997. Ketika SD, mereka menyaksikan krisis moneter dan gerakan Reformasi. Gambar yang terbayang di benak adalah Gedung DPR di Senayan diduduki mahasiswa dan Jakarta terbakar oleh kerusuhan. Lalu mereka tumbuh remaja dengan menyaksikan pemilihan presiden langsung, iklan politik di media, dan kebebasan berpendapat hampir di mana saja. Mereka tidak memiliki referensi kehidupan dalam suasana otoriter Orde Baru, dimana pers dibungkam, partai politik dibonsai, dan pemilu semata menjadi “pesta” bagi penguasa, bukan pesta demokrasi yang sebenarnya.

Kelompok “*native democracy*” ini berbeda dengan “kakaknya” yang lahir pada awal Orde Baru (akhir 1960-an atau awal 1970-an) yang menyaksikan runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet ketika remaja.

Sebagian dari anak sulung Orde Baru ini menjadi pelaku ketika gerakan Reformasi bergulir, karena mereka sedang berada pada usia pemuda atau mahasiswa. Mereka merekam suasana otoriter masa lalu dan melihat situasi demokratis sekarang sebagai suatu pencapaian, sementara adiknya melihat kebebasan hari ini adalah sesuatu yang terberi (*given*), bukan hasil perjuangan berdarah-darah.

Saya gemar menggunakan analogi telepon seluler dalam menggambarkan lahirnya “*native democracy*”. Bagi generasi tua, mereka menyaksikan dan mengalami sendiri perubahan dari rumah tanpa listrik, menjadi ada listrik, menggunakan telepon putar dengan jaringan kabel di rumah, penyeranta (*pager*), hingga telepon seluler. Mereka bermigrasi dari satu tahapan teknologi ke tahapan teknologi

berikutnya, berikut perubahan gaya hidup yang menyertainya. Mereka saya sebut sebagai “imigran teknologi”. Ketika *smartphone* datang, mereka mampu membelinya, tetapi hanya menggunakan fitur-fitur dasar sesuai dengan referensi pengalamannya. *Smartphone* itu hanya digunakan untuk bertelepon, pesan pendek (SMS) dan sesekali berfoto dengan kamera digital.

Pada gelombang ketiga ini kita menyaksikan lahirnya “**native democracy**”, generasi yang sejak lahir hanya mengenal demokrasi. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 adalah mereka yang lahir pada rentang 1992-1997. Mereka lahir ketika demokrasi ini tumbuh dan mulai menguasai fitur-fitur demokrasi yang rumit sementara generasi tua masih berkuat pada fitur-fitur dasar demokrasi.

Lihat bedanya dengan anak sekarang. Mereka lahir dan tumbuh ketika *smartphone* hadir. Bagi mereka, *smartphone* adalah sesuatu yang biasa dan fitur-fitur canggih di dalamnya adalah keharusan, mulai dari *chatting*, *social media*, korespondensi via email, hingga fitur yang rumit seperti *internet banking*. Merekalah “*native technology*” yang dengan lancar menguasai perkembangan teknologi sebagaimana mereka berbicara dalam bahasa ibu.

“*Native democracy*” juga demikian. Mereka lahir ketika demokrasi ini tumbuh dan mulai menguasai fitur-fitur demokrasi yang rumit

sementara generasi tua masih berkuat pada fitur-fitur dasar demokrasi. Fitur dasar ini yang sebelumnya saya sebut sebagai demokrasi prosedural. Pemilihan umum yang bebas, pembatasan masa kekuasaan, pemisahan kekuasaan melalui trias politika, yang merupakan “prestasi” dari proses demokratisasi yang panjang bagi generasi tua, dianggap hal biasa oleh generasi muda. Mereka sudah masuk ke penguasaan fitur-fitur rumit, seperti perlindungan kaum minoritas, partisipasi individu dalam gerakan sosial, hingga keadilan global.

Dalam konteks ideologi, Corfe menyebut kelompok ini sebagai *middle-middle majority* (mayoritas tengah-tengah). Mereka berada di tengah dalam konteks sosio-ekonomi dan juga spektrum ideologi. Karena tidak ada lagi konflik politik ideologi yang bipolar, generasi ini percaya diri untuk menyuarakan isu-isu secara obyektif dan berani. Mereka sudah melampaui cara berpikir dalam kungkungan kepentingan kelas bahkan melampaui batas negara-bangsa. Kebajikan yang paling utama bagi kelompok tengah-tengah ini adalah keadilan sosial, kesempatan yang sama dan kesetaraan.

Kelompok baru ini membangun nilai etis baru sebagai konsekuensi dari perubahan yang mereka alami. Bagi mereka, mengejar kesuksesan dan melakukan akumulasi finansial adalah kebajikan, karena dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan itu, mereka tidak mengorbankan individu atau bagian lain dari masyarakat.

Di sisi politik, mereka yang hanya paham fitur dasar demokrasi akan tergap-gagap berdialog dengan mereka yang sangat lancar menguasai fitur-fitur yang *advance*. Kelompok ini membutuhkan pendekatan kepemimpinan baru yang mampu memberdayakan mereka di tengah situasi ketidakpastian.

### MEMBONGKAR MITOS TENTANG PENANGKARAN

**MITOS:** Lumba-lumba bahagia di penangkaran

**FAKTA:** Lumba-lumba terlihat seolah-olah mereka tersenyum, padahal itu adalah bentuk dari wajah mereka. Bukan karena mereka bahagia. Lumba-lumba dipenangkarkan terus-menerus sampai tempat untuk berkembangbiak, mereka dipaksa untuk melakukan manjungan setiap hari, mereka tidak diberi kebebasan untuk melakukan perjalanan, dan dalam banyak kasus, mereka diambil secara paksa dari keluarga dan rumah mereka di laut. Apakah anda akan senang jika seandainya anda adalah lumba-lumba yang tinggal dipenangkaran?

**MITOS:** Di penangkaran Lumba-lumba aman dari serangan pemangsa (predator) dan tidak perlu mencari makan seperti saat mereka di alam liar.

**FAKTA:** Sama halnya dengan penghuni penjara aman dari perampokan dan diberi makan setiap hari, tetapi apakah Anda pikir mereka senang? Perbedaan utama antara sel penjara dan tangki akuarium adalah bahwa salah satunya diisi dengan air. Di alam liar, lumba-lumba makan ikan segar, sedangkan di penangkaran hanya diberi ikan mati yang mungkin sudah busuk.

**MITOS:** Pertunjukan Lumba-lumba mempunyai nilai pendidikan.

**FAKTA:** Satu-satunya hal yang diajarkan di penangkaran adalah bahwa tidak ada apa-apa untuk memperlakukan hewan dan memaksa mereka untuk melakukan pertunjukan guna menghibur kita. Di penangkaran, bukanlah perilaku alami dari lumba-lumba, mereka sebenarnya depresi, di alam lumba-lumba liar tidak melompat melalui lingkaran atau menarik orang di air dengan sirip mereka. Penangkaran menyajikan gambar yang benar-benar palsu tentang lumba-lumba. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang salah.

**MITOS:** Anak-anak membuat hubungan dengan lumba-lumba di penangkaran yang tadinya dinyatakan tidak mungkin untuk dicapai.

**FAKTA:** Banyak anak-anak peduli tentang dinosaurus, namun mereka belum pernah melihat satupun. Melalui Foto, video, cerita, wisata untuk melihat lumba-lumba liar di habitatnya, dan animasi, anak-anak dapat mengembangkan rasa cinta pada lumba-lumba tanpa mereka harus membuat Lumba-lumba menderita di sirkus atau penangkaran. Menurut Anda, apakah anak Anda ingin lumba-lumba menderita jika mereka tahu yang sebenarnya? Di Bali sangat mudah untuk melihat lumba-lumba liar yang bahagia di habitatnya.

## FAKTA !!!

DIBALIK SENYUM MANIS  
**LUMBA-LUMBA**



"Pertunjukan Lumba-lumba hanyalah tampilan dominasi manusia atas satwa. Mereka mendidik lumba-lumba seperti halnya Mickey Mouse si tikus"

- Ric O'Barry-

eksploitasi lumba-lumba masih berlanjut hingga hari ini adalah karena masyarakat tetap tidak menyadari betapa menderitanya lumba-lumba, sekarang Anda tahu, jangan mindalah penderitaan lumba-lumba dan para keel lainnya dengan membeli tiket untuk pertunjukan lumba-lumba atau ikut program berenang dengan lumba-lumba.

untuk mempelajari lebih lanjut tentang lumba-lumba di penangkaran, dan untuk informasi mengenai bagaimana caranya Anda dapat terlibat, kunjungi [www.jakartaanimalaid.com](http://www.jakartaanimalaid.com)










LUMBA - LUMBA  
MENDERITA  
DI PENANGKARAN

Brosur advokasi menentang sirkus lumba-lumba. Gerakan masyarakat dengan isu yang spesifik. ([www.jakartaanimalaid.com](http://www.jakartaanimalaid.com))

## Orientasi yang Berubah

Dari perjalanan sejarah, kita mencatat bahwa pencapaian terbesar para pendiri bangsa dan pemerintahan pasca-kemerdekaan di bawah Bung Karno adalah pembentukan konstitusi Indonesia sebagai negara-bangsa modern. Namun, di samping eksperimen pemerintahan—khususnya sistem parlementer yang menyebabkan jatuh-bangunnya pemerintahan—paradigma “politik sebagai panglima” di era ini menyebabkan negara tidak punya perhatian dan kemampuan untuk melakukan pembangunan sosial dan ekonomi.

Orde Baru yang datang sebagai antitesis Orde Lama menempatkan pembangunan ekonomi, dalam arti kesejahteraan material, sebagai

fokus dan basis legitimasi. Hasil dari fokus ini adalah penguatan lembaga negara dan institusi pasar. Pembangunan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, merupakan derivasi dari kebutuhan pembangunan ekonomi. Namun, karena stabilitas politik merupakan premis bagi pembangunan ekonomi, maka proses penguatan lembaga negara dilakukan dengan menjadikan militer sebagai “*brain and backbone*” negara, sementara kekuatan sipil terpinggirkan, khususnya partai politik.

Era Reformasi mengalihkan perhatian kita dari politik dan ekonomi ke masyarakat (*society*). Yang terjadi selama 15 tahun belakangan ini adalah penguatan masyarakat sipil dengan empat pranata utama: kampus, media, LSM dan ormas, serta partai politik. Inilah yang kemudian menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan antara negara, pasar dan masyarakat sipil. Penguatan masyarakat sipil ini juga dapat dibaca sebagai hasil ikutan dari akumulasi pendidikan dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.

Bersamaan dengan beralihnya pusat perhatian kita pada *society*, yang berdampak pada penguatan masyarakat sipil, kita mendapatkan berkah dari Allah berupa “bonus demografi” dimana komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menurun karena orang tidak produktif (orang tua dan anak-anak) yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin kecil sampai titik tertentu. Proyeksi demografis BPS menunjukkan bahwa dividen ini mencapai puncaknya pada 2020, ketika penduduk berusia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen dari populasi. Inilah perpaduan antara tanah yang subur dan bibit yang unggul. Sistem demokrasi akan menjadi lingkungan yang memicu pertumbuhan sosial masyarakat kita dengan sangat cepat dan dinamis.

Dampak paling besar akibat pergerakan dari politik ke ekonomi ke masyarakat ini adalah berubahnya tujuan pertanggungjawaban politik

dan ekonomi. Di era ini, masyarakat akan menjadi “panglima” bagi politik dan ekonomi. Karenanya, negara sebagai integrator bagi semua aktivitas politik dan pasar sebagai integrator bagi semua aktivitas ekonomi bukan hanya dituntut untuk lebih terbuka dan transparan, tetapi juga dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sosial. Masyarakat menjadi faktor pembentuk nilai utama bagi negara dan pasar. Jargon era ini adalah: *Society First!*

### **Globalisasi & Abad Asia**

Bumi kini semakin datar akibat tempaan kemajuan teknologi dan interaksi antarmanusia yang tidak bisa lagi disekat-sekat oleh jarak, wilayah negara, bahkan wilayah waktu. Interaksi manusia kini terjadi 24 jam sehari di mana saja, dipertemukan oleh teknologi informasi dan didorong oleh pergerakan uang, barang dan kepentingan. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, dapat kita ketahui dalam hitungan detik. *Social media* kini kerap menjadi saluran “*breaking news*” baru karena kecepatan dan banyaknya orang yang terlibat.

Pada saat yang sama, interaksi mendunia ini tak jarang membuat orang merasa gamang dan takut. Sama seperti kita menyeberang di jalan raya yang sangat ramai di tengah kawasan gedung-gedung pencakar langit. Kita akan merasa kecil, lemah, sendiri dan terasing. Maka tak heran jika globalisasi, selain menghasilkan keterbukaan, juga memicu lahirnya “ketertutupan” sekelompok masyarakat. Fenomena radikalisme dan primordialisme merupakan pantulan balik globalisasi yang menjangkau hingga ke relung-relung privat kehidupan individu.

Masyarakat baru Indonesia tak lepas dari arus menyatunya dunia ini. Teknologi informasi mengakibatkan demokratisasi pengetahuan dan runtuhnya otoritas penentu apa yang boleh dan tidak boleh diketahui masyarakat. Apa yang lokal dan apa yang global mengabur, semua

menyatu dalam interaksi yang begitu cepat dengan muatan informasi yang begitu besar. Kekerasan terhadap muslim Rohingya telah memicu pengrusakan terhadap simbol agama tertentu di negara lain. Bayangkan, sebuah peristiwa lokal (konflik penduduk di Rohingya) direspon oleh sebuah peristiwa lokal lainnya (pengrusakan simbol di suatu tempat) akibat interaksi informasi global.

Kemudahan mencari informasi membuat generasi baru lebih percaya diri namun pada saat yang sama sering bingung membuat keputusan akibat banjir informasi. Akhirnya, percakapan orang biasa menjadi saluran pencarian dan pertukaran informasi, sebagai bagian dari proses melunturnya wewenang dan hirarki lembaga-lembaga formal.

Dari pandangan ekonomi dan geopolitik, sebagian ahli menyebut era sekarang adalah “abad Asia” karena tinggal Asia yang kini tumbuh ekonominya sehingga memperkuat posisi tawar dan pengaruhnya dalam percaturan politik dunia. Motor pertumbuhan Asia adalah konsumsi yang besar, akibat jumlah penduduk yang besar pula, di China dan India. Sebagian kawasan Asia telah mengalami demokratisasi yang signifikan, bahkan kawasan Timur Tengah telah tersentuh gelombang demokrasi yang disebut “Arab Spring”.

Globalisasi dan abad Asia menyediakan kesempatan dan kecemasan. Kesempatan untuk tumbuh muncul melalui ekonomi jaringan (*networked economy*) karena peran negara dan pasar mengalami degardasi, tetapi juga cemas karena dengan berkurangnya peran negara berarti tiadanya payung perlindungan bagi warga negara karena persaingan terjadi di tingkatan individu tanpa mengenal batas negara.

Dua perkembangan inilah yang menjadi faktor pendorong dan pemicu lahirnya nilai-nilai baru dalam gelombang ketiga perjalanan sejarah Indonesia. Individu yang sendirian turun ke gelanggang akhirnya

bergandeng tangan dengan individu lain dalam ikatan komunitas yang egaliter, dan melalui komunitas itulah (yang mirip dengan “percakapan orang biasa” di bagian atas) individu mencari solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Persaingan antar-individu tidak lagi dalam semangat “*survival of the fittest*” namun “*let’s fit ourselves together*” untuk menjawab berbagai problematika hidup.

## Nilai-Nilai Baru

### *Pertanyaan tentang Kualitas Hidup*

Pada gelombang ketiga ini, dengan kemenangan kapitalisme sebagai latar, masyarakat masih akan mendewakan pertumbuhan. Namun, pertumbuhan akan disandingkan dengan “dewa” yang lain, yaitu pertanyaan tentang kualitas hidup. Pertumbuhan, yang dalam terang ini adalah pertumbuhan ekonomi, harus diikuti dengan distribusi kesejahteraan. Karena itu, pertanyaan tentang kualitas pertumbuhan dan bagaimana pertumbuhan dapat berorientasi manusia, akan menjadi diskursus penting di ruang publik.

Berbagai kajian tentang generasi “*Millenials*” di berbagai negara menunjukkan temuan yang mengejutkan.<sup>22</sup> Millenials adalah generasi baru yang lahir antara 1980-1995 sehingga rentang usia mereka sekarang mulai 18 hingga 33 tahun. Mereka sering disebut “generasi Y” sebagai kelanjutan dari “generasi X” yang hadir sebelumnya. Generasi ini tumbuh menyaksikan terjadinya peristiwa besar 9/11, resesi global, Arab Spring, Facebook dan *smartphone*. Generasi ini merupakan generasi yang paling beragam dari segi etnisitas dan paling berpendidikan sepanjang sejarah manusia.

---

<sup>22</sup> Bisa dilihat kajian Pew Research pada 2010 tentang generasi Millenials di AS <http://www.pewresearch.org/millennials/> dan kajian konsultan *public relations* Edelman di 11 negara di seluruh dunia (2012) <http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/8095-exchange/>.



Dari berbagai survei di berbagai negara ditemukan bahwa tiga hal terpenting bagi generasi ini adalah: (1) menjadi orang tua yang baik dalam perkawinan yang langgeng; (2) memiliki rumah sendiri; dan (3) mampu menolong orang lain yang membutuhkan. Mereka adalah anak dari orang tua masyarakat industrial yang mengorbankan banyak hal demi karir dan mencari uang. Mereka menyaksikan orang tuanya bercerai karena sibuk dengan pekerjaan. Sebagian dari mereka hidup bersama orang tua tunggal, baik karena *broken home* atau pilihan gaya hidup orang tua mereka sebagai buah revolusi kebebasan seksual. Anak-anak yang kini dewasa tersebut merasakan kehampaan hidup yang membuat mereka berjanji tidak akan mengulanginya ketika mereka dewasa.

Generasi ini punya rumus baru tentang uang dan kesuksesan: *'aku ingin punya uang banyak tapi punya waktu luang untuk keluarga dan pekerjaan itu haruslah menyenangkan karena menjadi passion yang aku geluti.'* Inilah jawaban dari merebaknya kewirausahaan di negeri kita. Anak muda ini tidak ingin seperti ayah-ibunya yang kekayaannya berbanding lurus dengan jumlah jam yang mereka habiskan untuk bekerja, bahkan hingga mengorbankan keluarga. Selain wirausaha, ekonomi kreatif akan menjadi sektor yang digeluti oleh generasi baru ini karena kebebasan waktu yang ditawarkannya.

Masyarakat akan bergulat mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan kebahagiaan. Di sinilah budaya menjadi faktor penting. Kebahagiaan adalah perasaan umum (*"public mood"*) yang mengatakan hidup di sini (baca: di Indonesia) adalah bermakna dan berharga. Pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mampu mengelola *public mood* ini, bukan lagi pemimpin aspirasional yang mengandalkan populisme.

Pertanyaan generasi ini adalah *kualitas hidup*. Kesejahteraan adalah impian, tapi ia tak lagi sendiri. Kesejahteraan bergeser dari

tujuan menjadi salah satu faktor pembentuk kualitas hidup. Itulah yang kita baca dari perubahan lanskap nilai dan moral masyarakat baru tersebut. Di samping nilai-nilai lama yang masih kuat bertahan, yaitu agama dan gotong royong, muncul nilai baru yang menyertai dan mengimbangi kedua nilai yang sudah ada itu, yaitu tendensi pada kekuasaan (*power*) dan prestasi (*achievement*). Kedua nilai terakhir ini umumnya ditemukan pada masyarakat dengan kultur individualisme yang kuat. Menariknya, yang terjadi di Indonesia bukanlah transformasi dari masyarakat komunal ke masyarakat individual, tetapi yang terjadi adalah penguatan nilai individu di dalam masyarakat komunal. Ini adalah keseimbangan nilai yang baik.

Pertanyaan generasi ini adalah kualitas hidup. Kesejahteraan adalah impian, tapi ia tak lagi sendiri. Kesejahteraan bergeser dari tujuan menjadi salah satu faktor pembentuk kualitas hidup.

Karena sumber dari nilai-nilai yang berhubungan dengan *power* dan *achievement* adalah pengetahuan, maka dapat dikatakan bahwa sekarang pengetahuan berperan mendampingi agama sebagai faktor pembentuk nilai bagi masyarakat baru Indonesia. *Output* dari bertemunya kedua faktor tersebut adalah kesejahteraan sebagai pembentuk kualitas hidup individu dan masyarakat kita. Dengan begitu, nilai dan orientasi masyarakat baru Indonesia ini bertemu dalam segitiga ini: agama, pengetahuan dan kesejahteraan.

Agama memberi orientasi hidup, menjadi sumber moral sementara pengetahuan memberi mereka kapasitas dan sumber produktivitas. Kesejahteraan adalah *output* dari kedua hal tersebut yang berfungsi sebagai pembentuk kualitas hidup secara keseluruhan.

### ***Melampaui Individualisme***

Masyarakat gelombang ketiga merumuskan nilai-nilai baru yang berasal dari pengalamannya masa lalu yang digabungkan dengan bekal menghadapi masa depan. Ada suara yang mengatakan bangsa Indonesia kini tidak lagi ramah dan menjadi masyarakat yang individualistik. Rumusan itu tidak salah, tetapi juga harus dilihat dalam konteks perkembangan zaman.

Orang Indonesia di gelombang ketiga kini membangun nilai yang saya sebut melampaui individualisme (*transcending the individualism*). Solidaritas dan gotong royong yang telah mengakar dalam referensi budaya masyarakat muncul dengan semangat baru karena bertemu dengan spirit berkompetisi dari individualisme.

Pelampauan individualisme ini tampak pada semangat kolaborasi dan sikap sebagai warga kampung mondial dengan nilai-nilai universal. Individu minta diakui, bahkan berteriak minta diakui, namun pengakuan itu berupa ajakan untuk berpartisipasi dalam suatu kolaborasi besar. Keterhubungan (*connectivity*) yang merupakan karakteristik masyarakat baru ini memungkinkan ekspresi individual bertemu dengan kolaborasi sosial.

Nilai baru ini menarik jika kita implementasikan dalam konteks ekonomi. Banyak pihak yang menyerukan kemandirian ekonomi sebagai agenda politik penting. Teriakan yang kelihatan gagah di awal namun tidak menjawab permasalahan mendasar. Sekarang adalah era kolaborasi, termasuk dalam konteks kerja sama ekonomi antar-negara.

Kemandirian ekonomi menjadi setengah ilusi karena kita tak akan bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Yang diperlukan adalah penguatan kapasitas agar Indonesia dapat berkolaborasi dan menjadi mitra sejajar di bidang ekonomi dengan negara-negara lain di dunia.

Pergeseran nilai ini tampak dari perubahan *Need of Achievement* orang Indonesia. Istilah ini populer pada era 1980-1990-an seiring dengan teori psikologi sosial yang berpijak pada paradigma modernisasi.<sup>23</sup> Pada waktu itu kerap disebut selalu dikatakan bahwa N-Ach kita rendah dan ini yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam balap pacu menuju kemodernan dibanding bangsa-bangsa lain. Dengan menggunakan konsep itu, kita sekarang menyaksikan sekarang betapa N-Ach orang Indonesia sangat tinggi dan mampu mewarnai panggung-panggung prestasi dunia. Kita juga melihat panggung prestasi itu kini jauh lebih beragam dan berbeda dari sebelumnya.

### Gelombang Ketiga: "The Next Indonesia"

<b>Faktor Pendorong</b>	- Demokrasi global & abad Asia (eksternal)
	- Budaya & demografi (internal)
<b>Nilai-nilai</b>	- Orientasi kemanusiaan
	- Pencarian makna kualitas hidup
	- Melampaui individualisme

### Tantangan bagi Negara dan Lembaga Politik

Karena gelombang sejarah ini di-*drive* oleh perubahan demografi, maka orientasi kemanusiaan menjadi utama. Tidak perlu lagi ada pertentangan antara negara dan masyarakat. Negara kembali ke makna dasar sebagai organisasi sosial yang menciptakan keteraturan. Konsolidasi sosial akan

<sup>23</sup> Istilah N-Ach dipopulerkan oleh ahli psikologi David McLelland. Konsep ini merujuk pada keinginan individual terhadap pencapaian yang signifikan, penguasaan keterampilan, kontrol dan standar yang tinggi. Puncak dari N-Ach adalah determinasi untuk menang.

membesarkan komunitas hingga mampu bernegosiasi dengan negara. Negara diuji eksistensinya dari segi kapasitas.<sup>24</sup> Mampukah negara *deliver* perannya dengan baik? Otoritas negara menjadi tidak relevan jika kapasitasnya lebih rendah dari ekspektasi kelompok mayoritas baru ini. Ini menuntut pendekatan kepemimpinan (*leadership approach*) baru.

Struktur politik akan semakin datar karena memudarnya hirarki dan otoritas. Individu yang menguat menisbikan peran kelompok dan pemimpin sosial yang selama ini berperan dalam menggiring opini publik dan pilihan politik. Politik tidak bisa lagi dijalankan secara “grosiran”, dimana partai bernegosiasi dengan pemimpin atau perwakilan kelompok dengan harapan menanggung ribuan hingga jutaan suara dari anggota kelompok atau komunitas itu. Sebaliknya, politik akan berjalan secara “retail” dan partai politik harus bekerja keras mendulang satu suara demi satu suara, mengetuk satu pintu demi satu pintu untuk mendapatkan dukungan.

Kita akan menyaksikan makna baru kewarganegaraan. Menjadi warga negara bukan lagi status pasif dan warga negara yang baik bukanlah warga negara yang sekedar patuh. Warga negara gelombang ketiga adalah mereka yang berpartisipasi dalam politik dan mampu mengartikulasikan opininya. Apalagi dengan semakin melekatnya *social media* dalam kehidupan sehari-hari, akan terasa efek reverberasi opini individu di ruang publik. Isi wacana publik bukan hanya elite, pemimpin atau ahli, tapi juga suara warga biasa yang makin lantang.

*Social media* juga menjadi pemicu demokratisasi media. Dulu, apa yang diketahui oleh masyarakat dikontrol oleh institusi media.

---

<sup>24</sup> Dalam perspektif ekonomi, Ahmad Erani Yustika memaknai kapasitas negara sebagai kemampuan mengimplementasikan tujuan-tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Yustika menyimpulkan bahwa demokrasi akan lumpuh apabila tidak bersanding dengan kapasitas negara, dalam hal ini pemerintah dan birokrasi. Demokrasi dan kapasitas negara bersifat komplementer dalam meraih kinerja pembangunan ekonomi. Yustika, “*Kapabilitas Sosial Negara*” (*Kompas*, 4 Desember 2013).

Masyarakat hanya menerima apa yang telah diolah dan diberi kerangka (*framing*) oleh media, sesuai dengan agenda dan kepentingan masing-masing perusahaan pers. Kini, setiap orang adalah media. Informasi, berita bahkan ekspresi individual bisa dengan cepat disampaikan di ruang publik.

Ruang dialog antara media dan publik juga tercipta oleh *social media*. Jika dulu ruang dialog itu juga terjadi di media, yang artinya dikontrol oleh media itu sendiri, kini ruang dialog terjadi di ruang terbuka dan *real time*. Contohnya, dulu keberatan publik terhadap isi media hanya bisa disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi atau surat pembaca dalam korespondensi formal yang memakan waktu. Kini, warga bisa berkomentar langsung melalui kolom komentar di berita *online* atau berpendapat di Twitter terhadap isi berita. Bukan satu kali terjadi media menarik dan merevisi isi berita (*online*) akibat kritik lewat *social media*.

Peran negara dalam perekonomian juga mengalami tantangan karena kapasitas negara yang kini “tidak besar-besar amat” dibanding lembaga lain seperti perusahaan multinasional yang memiliki asset, uang bahkan orang yang begitu besar. Saya sering memberi ilustrasi, jika asset perusahaan multinasional di Indonesia dikumpulkan, jumlahnya bisa melampaui APBN dalam setahun. Negara tidak lagi menjadi pemain utama dalam perekonomian karena ukurannya.

Tantangan kepada negara sebagai institusi ekonomi juga muncul dari berkembangnya ekonomi jejaring (*network economy*) yang mengiringi lahirnya internet. *Network* menjadi kekuatan ekonomi baru karena sifatnya yang longgar dan adaptif bahkan bisa meregulasi diri sendiri. Kekuatan itu pula yang menyebabkan ekonomi jejaring keluar dari perdebatan negara vs. pasar dalam ekonomi. Institusi gigantik, yaitu pasar dan negara, digantikan dengan simpul-simpul kecil dan banyak yang tersebar di banyak lapisan dan pada masing-masing simpul itu

berlangsung aktivitas ekonomi yang membawa kesejahteraan. Negara akan menjadi penjaga malam bukan karena pilihan ideologi ekonomi liberalisme, namun karena geliat warga yang berkuat pada simpul-simpul kecil yang saling terhubung itu.

Melihat peran teknologi informasi, khususnya internet dan *social media*, tak berlebihan jika kita gambarkan era yang akan datang adalah era “percakapan masyarakat” atau *“people conversation”*. Tidak ada lagi kekuasaan sosial yang tegak vertikal dan mampu menguasai semuanya. Yang ada adalah lingkaran-lingkaran sosial yang bekerja memenuhi kebutuhan spesifik secara lateral.



### Fitur-fitur di Gelombang Ketiga:

- *People conversation*
- Ekulibrium sosial
- Konektivitas & interdependensi (bukan cuma arus barang dan modal, tapi arus manusia)
- Ekonomi kreatif
- Peran individu di ranah global
- Kontribusi

Semua fitur ini menuntut format baru negara, khususnya dari pemerintahan yang kuat (*strong government*) ke pemerintahan yang efektif (*effective government*). Negara hanya akan berperan pada masalah-masalah dalam skala pengaruh yang besar, seperti infrastruktur dan militer.

Pada satu titik, pertumbuhan akan mencapai batasnya dan materialisme akan berhenti. Ketika batas ini tercapai, akan muncul basis spiritual baru untuk menerima fakta ini. Khususnya di bidang politik, evolusi bergerak dari berbagi kekuasaan (*power sharing*) menuju berbagi kesejahteraan (*wealth sharing*).

### Pilar-Pilar Gelombang Ketiga

Politik	Ekonomi	Sosial
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Struktur politik yang makin mendatar (<i>flat</i>) karena memudarnya hirarki dan otoritas</li> <li>■ Negara bukan dipandang otoritas, tapi kapasitas</li> <li>■ Makna baru kewarganegaraan: partisipasi &amp; opini publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elemen baru dalam penciptaan kesejahteraan</li> <li>■ Orientasi pada kesejahteraan jangka panjang</li> <li>■ <i>Network based economy</i>: bukan negara dan pasar</li> <li>■ Independensi institusi ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Demokratisasi media (<i>personalized media</i>)</li> <li>■ Nilai: transcending individualism (kolaborasi, <i>universalism</i>, <i>connectivity</i>)</li> <li>■ Orientasi pada kualitas hidup (kesejahteraan &amp; religiusitas)</li> </ul>



**G**elombang ketiga adalah bagian terkini dari sejarah Indonesia kontemporer. Saya belum punya nama untuk menangkap semangat zaman pada gelombang ini karena ia baru saja mulai. Yang bisa kita saksikan adalah terbentuknya masyarakat baru yang membutuhkan cara berkomunikasi baru bagi lembaga-lembaga politik, seperti pemerintah dan partai politik.

Logika komunikasi politik konvensional biasanya dimulai dengan masalah-masalah yang dihadapi (tak jarang dengan penggambaran yang didramatisir) lalu dilanjutkan dengan solusi dan mengerucut pada kesimpulan bahwa solusi dari permasalahan itu adalah adalah “saya”. Masyarakat gelombang ketiga tidak dapat lagi didekati dengan logika komunikasi patronistik seperti itu karena mereka tidak lagi membutuhkan patron-patron pelindung. Masyarakat ini percaya diri dengan individualitas mereka dan pada saat yang sama mau berkolaborasi untuk saling melindungi satu sama lain.

Logika komunikasi politik konvensional “jual kecap nomor satu” seperti di atas juga gagal menjawab pertanyaan dasar: apa manfaatnya bagi saya? (*what is it in it for me?*) yang kini dengan lantang dan percaya diri disampaikan oleh mayoritas baru ini. Lembaga-lembaga politik, partai politik terutama, harus membangun jembatan relevansi baru untuk dapat menggalang pelibatan publik (*public engagement*) melalui dialog dan keterbukaan.

Visi partai politik yang mewakili ideologi dan identitasnya harus bisa diturunkan menjadi agenda sehingga publik dapat dengan jernih membaca arah dan bahkan kepentingan partai politik tersebut. Baru pada tahap eksekusi dari agenda itu kita bisa bicara mengenai cara kepemimpinan (*leadership approach*) dalam menjalankan agenda agar visi partai mampu mewarnai kanvas besar bernama pemerintahan.

Ideologi & Identitas	•→	Visi
Kepentingan	•→	Agenda
Eksekusi	•→	Kepemimpinan

Komunikasi politik ke depan tidak lagi memaksakan ideologi sebagai cara pandang terhadap dunia yang rigid, tapi juga tidak terjebak pada sikap asal menyenangkan publik alias populisme. Pemimpin gelombang ketiga adalah eksekutor andal dalam menyelesaikan (*deliver*) agenda-agenda publik yang telah disepakati.

Melihat perubahan ini saya optimistis akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Gelombang demi gelombang sejarah telah kita lalui dan meninggalkan endapan berharga bagi perjalanan kita sebagai negara-bangsa. Gelombang ketiga adalah momentum berharga bagi Indonesia menuju kesejahteraan.

### Gelombang Sejarah Indonesia

	Gelombang Pertama: Menjadi Indonesia	Gelombang Kedua: Menjadi Negara-Bangsa Modern	Gelombang Ketiga:
<b>Faktor Pendorong</b> (Eksternal)	Imperialisme	Perang Dingin & demokratisasi global	Globalisasi & abad Asia
(Internal)	Pencarian identitas	Pencarian sistem yang kompatibel dengan sejarah dan budaya	Budaya & demografi
<b>Nilai-nilai</b>	Solidaritas	Konflik & kompetisi	Orientasi kemanusiaan
	Gotong royong	Keamanan	Pencarian makna kualitas hidup
	Pergerakan nasional sebagai "collective mind"	Menyesuaikan diri dengan kemodernan (conformity)	Melampaui individualisme
		Pancasila sebagai konsensus	
<b>Pencapaian</b>	Kemerdekaan	Konstitusi modern UUD 1945	Sedang berproses
	Identitas sosial dan politik baru	Penguatan lembaga negara	
	Tanah air (integrasi teritori)	Keseimbangan baru dalam format negara-bangsa modern	
	Bahasa		

# Peta Jalan Menuju Masa Depan

**S**ekarang kita sudah sampai di sini: di penghujung gelombang kedua. Sejenak kita melakukan penghentian, menengok ke belakang, menata ulang imaji sejarah kita, lalu menatap ke depan untuk membuat sebuah peta jalan baru yang akan kita lalui.

Peta jalan kita susun dari lanskap sosial baru yang kita temukan dari rekonstruksi sejarah yang telah kita lakukan. Semua penjelasan terdahulu telah menjabarkan bagaimana transformasi terjadi dalam sejarah bangsa kita serta apa saja faktor yang telah mendorong terjadinya transformasi itu. Peta jalan adalah pilihan yang kita buat di tengah realitas baru yang terpampang di depan mata, yaitu apa yang kita sebut sebagai masyarakat gelombang ketiga.

Sekilas tampak tidak ada yang baru dalam realitas itu karena sebagiannya sudah terjadi atau sedang berlangsung. Ini adalah deskripsi atas realitas yang sudah ada atau sedang terjadi. Karena itu pula sulit menemukan sebuah monumen yang secara tegas memisahkan gelombang ketiga dari gelombang kedua, seperti proklamasi kemerdekaan yang menjadi monumen pemisah antara gelombang pertama dan gelombang

kedua. Penjelarasannya adalah, karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi bukanlah semata ledakan demografi baru yang terjadi bersamaan dengan ledakan demokrasi, melainkan terutama pada perubahan ide-ide dan nilai-nilai yang kemudian membentuk budaya baru dari masyarakat kita. Itu sebabnya perubahan-perubahan itu tidak terlihat secara kasat mata tetapi implikasinya sebenarnya sangat dalam dan besar bagi masa depan bangsa.

Saya optimis menatap masa depan Indonesia karena setelah setengah abad ketegangan dari Orde Lama ke Orde Baru, setengah abad pergerakan yang ekstrem dari “politik sebagai panglima” ke “ekonomi sebagai panglima” sebagai tesis dan antitesis, kita akhirnya bergerak secara alami ke arah “masyarakat sebagai panglima” dalam era Reformasi. Kembali ke masyarakat (*back to society*) adalah gejala yang sehat dari sebuah masyarakat karena manusia yang ada dalam masyarakat adalah awal dan akhir, subyek dan obyek, dari semua yang kita cita-citakan dalam politik dan ekonomi.

Di tengah semua kegaduhan yang kita rasakan selama era Reformasi, harus kita akui bahwa tanpa sadar ada begitu banyak kemajuan yang kita capai secara diam-diam dalam berbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Capaian-capaian itulah yang saya sebut sebagai keseimbangan baru yang merupakan sintesis dari semua dialektika dua rezim sebelumnya. Sebab, hanya ketika kita kembali ke masyarakat, maka semua yang tampak bertentangan dalam politik dan ekonomi—seperti antara demokrasi dan pembangunan ekonomi—dapat kita integrasikan dalam kehidupan sebagai bangsa. Pergulatan mencari sistem tidak akan pernah berujung dengan pilihan benar-salah, tetapi akan berhenti sementara pada suatu titik dimana kita menemukan kesesuaian dan kecocokan. Sistem itu sendiri akan terus mengalami penyesuaian dan penyempurnaan, sebab kekurangan dari sebuah sistem hanya dapat ditemukan setelah ia diterapkan di lapangan. Ambil contoh, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang merupakan

koreksi diri-sendiri (*self adjustment*) dari kapitalisme Eropa Barat ketika sosialisme makin berkembang pesat. Intinya ada pada redistribusi. Tapi, tanpa sadar *adjustment* itu kemudian menjadi awal yang menginspirasi ide-ide tentang “Jalan Ketiga” di kemudian hari.

Sekali lagi saya optimistis memandang masa depan Indonesia dan tidak ada alasan untuk menjual kecemasan kepada publik. Pencapaian kita sebagai bangsa tidaklah buruk. Indonesia adalah negara tingkat menengah hampir dalam semua aspek. Masalahnya adalah, pencapaian yang diraih tidak sebesar potensi yang kita miliki. Jadi, yang diperlukan adalah sebuah tekad bersama dan peta jalan yang jelas untuk melompat lebih jauh ke depan, agar pencapaian kita paling tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Pergulatan mencari sistem tidak akan pernah berujung dengan pilihan benar-salah, tetapi akan berhenti sementara pada suatu titik dimana kita menemukan kesesuaian dan kecocokan. Sistem itu sendiri akan terus mengalami penyesuaian dan penyempurnaan.

Langkah pertama untuk melakukan lompatan besar itu adalah mengganti cara pandang. Harus ada peralihan dalam cara kita memandang Indonesia dari sebagai satu entitas politik menjadi entitas peradaban. Hanya dengan perubahan cara pandang itu kita dapat mengubah cara kita bekerja dan mengelola sumber daya yang kita miliki. Ini yang mejelaskan mengapa dulu bangsa Arab dan Inggris bisa menjadi pemimpin dunia. Mereka bekerja dalam skala peradaban dan

bukan hanya dalam skala negara. Lihatlah betapa banyak pengguna bahasa Arab dari bangsa-bangsa non-Arab di seluruh dunia? Begitu juga bahasa Inggris. Bangsa-bangsa itu memimpin dunia selama beberapa abad dan menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa yang paling banyak digunakan saat ini. Bahasa adalah mata uang peradaban.

Dengan demikian kita perlu membangun sebuah kesadaran bahwa kerja-kerja pembangunan negara (*state building*) tidak melulu berkuat pada pembentukan konstitusi, regulasi atau institusi, melainkan melakukan pekerjaan inti yang lebih rumit, yaitu pada proses membangun peradaban. Kerja itulah yang mempertautkan proses *state building* dengan *nation building*. Negara di sini berperan sebagai agen yang mengelola proses peradaban dari masyarakatnya sendiri.

Mesin besar yang kita perlukan untuk melakukan peralihan dari entitas politik ke entitas peradaban adalah budaya. Sekaranglah waktunya bagi kita menyadari betapa besar peran budaya dalam kemajuan setiap bangsa dalam sejarah manusia. Semua pencapaian kita dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi dan politik hanya bisa dijelaskan secara komprehensif oleh budaya kita sendiri. Begitu juga semua kemajuan pada bangsa-bangsa lain. Kebudayaanlah yang menjadi penjelasan utama dari kemajuan mereka. Budaya gotong royong adalah kekuatan utama yang memungkinkan kita mengalami peralihan pada gelombang pertama dari etnis menjadi bangsa dan akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan.

Yang kita perlukan adalah sebuah strategi kebudayaan baru yang memungkinkan kita melakukan peralihan dan lompatan dari skala negara ke skala peradaban. Kebudayaan adalah pondasi yang paling kokoh dari kemajuan jangka panjang yang ingin kita raih. Kebudayaan juga yang menjadi landasan dari kemakmuran jangka panjang yang ingin kita capai. Ambil contoh kewirausahaan, misalnya. Kewirausahaan pada dasarnya adalah suatu budaya dan bukan sekedar keahlian atau

profesi. Strategi kebudayaan menjelaskan ide-ide dan nilai-nilai seperti apa yang harus dimasukkan sebagai pembentuk budaya yang kemudian menjadi pondasi bagi kemajuan jangka panjang yang kita cita-citakan. Strategi kebudayaan mengharuskan negara menjalankan peran sebagai mesin rekayasa sosial yang efektif.

Yang kita perlukan adalah sebuah strategi kebudayaan baru yang memungkinkan kita melakukan peralihan dan lompatan dari skala negara ke skala peradaban. Kebudayaan adalah pondasi yang paling kokoh dari kemajuan jangka panjang yang ingin kita raih. Kebudayaan juga yang menjadi landasan dari kemakmuran jangka panjang yang ingin kita capai.

Kebudayaan berhubungan dengan manusia sebagai aktor utama. Tetapi, jika ada introspeksi yang pantas ditujukan, maka kritik itu adalah tidak tekunnya kita mempelajari diri sendiri sebagai bangsa. Berapa banyak tulisan atau penelitian tentang “siapa dan bagaimana manusia Indonesia” itu? Kita tidak akan menemukan referensi yang memadai tentang tema tersebut kecuali mungkin ceramah Mochtar Lubis tentang manusia Indonesia pada dekade 1970-an dan buku Koentjaraningrat.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Ceramah tersebut berjudul “Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung Jawab” dilakukan pada tahun 1976. Diterbitkan dalam bentuk buku pada 1977 dan diterbitkan kembali oleh Yayasan Obor pada 2001. Tokoh lain yang menulis dengan serius tentang manusia Indonesia adalah Koentjaraningrat, terutama dalam bunga rampai antropologi *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (1974).



### Manusia Indonesia

Mochtar Lubis (1976)	Koentjaraningrat (1974)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Munafik atau hipokrit</li> <li>■ Enggan bertanggung jawab</li> <li>■ Feodal</li> <li>■ Percaya tahayul</li> <li>■ Artistik</li> <li>■ Lemah dalam watak dan karakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meremehkan mutu</li> <li>■ Suka menerabas</li> <li>■ Tidak percaya diri sendiri</li> <li>■ Tidak disiplin</li> <li>■ Suka mengabaikan tanggung jawab</li> </ul>

### Budaya dan Pola Pikir Baru

Kita bisa membaca banyak definisi tentang budaya yang ditawarkan. Tapi, untuk kepentingan kita sekarang, saya ingin mendefinisikan budaya sebagai kotak perkakas (*toolkit*) paling dasar yang dipakai oleh manusia untuk menavigasi kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat budaya sebagai alat maka—seperti alat yang harus selalu disesuaikan dengan masalah yang dihadapi—budaya akan terus berubah. Obeng cocok untuk sekrup, palu cocok untuk paku; harus ada kesesuaian antara alat dan masalahnya. Karenanya, dengan adanya peta baru akibat datangnya gelombang ketiga, diperlukan transformasi budaya agar kita mampu dan berhasil menavigasi medan baru ini.

Pada dasarnya budaya merupakan penyebab dan sekaligus hasil dari interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Budaya bisa bekerja sebagai penghambat tetapi juga mendorong perilaku manusia. Maka wajar jika kita memulai transformasi budaya sebagai transformasi pola pikir (*mindset*) manusia karena manusialah yang menjadi agen aktif atau aktor dalam panggung kehidupan sosial. Karena pola pikir adalah representasi budaya, yang juga merupakan alat navigasi kehidupan

sosial yang harus sesuai dengan medan lapangan yang ada, maka pola pikir manusia gelombang ketiga juga harus disesuaikan dengan lanskap baru ini.

Seperti sudah saya sampaikan, ciri utama dari lanskap gelombang ketiga adalah keterhubungan (*connectedness*). Fenomena gelombang ketiga adalah fenomena jejaring, baik jejaring budaya, sosial, politik, hingga jejaring ekonomi. Implikasi terpenting dari meningkatnya konektivitas ini adalah semakin mudahnya ide, informasi dan sumber daya menyebar. Tentunya ini berlaku sama baik bagi penyebaran yang bersifat positif maupun negatif. Efek dari meningkatnya kecepatan dan variasi penyebaran adalah meningkatnya fluktuasi dalam berbagai sendi kehidupan. Sesuatu cepat datang, tetapi juga cepat hilang. Dalam dunia gelombang ketiga yang semakin fluktuatif ini dibutuhkan pola pikir khusus agar kita tidak terhempas tetapi justru dapat menunggangi gelombang sejarah ini.

Ciri utama dari lanskap gelombang ketiga adalah keterhubungan (*connectedness*). Fenomena gelombang ketiga adalah fenomena jejaring, baik jejaring budaya, sosial, politik, hingga jejaring ekonomi. Implikasi terpenting dari meningkatnya konektivitas ini adalah semakin mudahnya ide, informasi dan sumber daya menyebar. Tentunya ini berlaku sama baik bagi penyebaran yang bersifat positif maupun negatif.

Pola pikir yang tepat dikembangkan untuk dalam era gelombang ketiga ini memiliki empat komponen utama.

- 1. Arsitektural.** Pola pikir pertama yang harus dimiliki adalah kesadaran bahwa manusia adalah subyek dan pelaku utama dalam peradaban. Sebagai pelaku utama maka manusia bertanggung jawab untuk membuat sebuah *grand design*, atau dalam bahasa gelombang ketiga sebuah *operating system*, yang akan menjadi platform untuk segala aktivitas kehidupan. Kemampuan imaji dan desain ini mirip dengan kemampuan seorang arsitek yang harus mengimajinasikan dan membayangkan desain dari sebuah bangunan yang asalnya tidak ada menjadi ada sekaligus merespon ruang yang terhampar di hadapannya; sebuah kemampuan penciptaan.
- 2. Fungsional.** Setelah proses imaji dan desain, langkah selanjutnya adalah mewujudkannya. Proses pemwujudan ini bergantung pada kemampuan kita untuk menilik segala yang ada disekitar kita sebagai kesempatan dan sumber daya yang dapat difungsikan untuk mewujudkan desain kita. Kita selalu mencari fungsi dan faedah dari apapun yang ada disekitar kita.
- 3. Eksperimental.** Seperti sudah disebutkan, sifat utama gelombang ketiga adalah meningkatnya konektivitas dan cepatnya perubahan yang terjadi. Tingginya kompleksitas dan perubahan yang sangat cepat berimplikasi sulitnya melakukan prediksi dan betapa setiap solusi yang ditemukan akan memiliki waktu kadaluarsa yang sangat pendek. Akibatnya, mau tidak mau kita harus memiliki pola pikir yang selalu terbuka dan berani mengambil risiko. Berani mengakui keterbatasan intuisi dan mengakui setiap solusi sifatnya temporer. Kita harus membuat eksperimentasi menjadi *default*.

**4. Kreatif.** Adakalanya jalan buntu tetap menghadang meskipun segala daya upaya telah dikerahkan. Pada situasi seperti ini, hal yang akan menyelamatkan kita adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk memulai ketika yang lainnya terhenti. Pada era konektivitas tinggi ini kita perlu mendefinisikan ulang arti kreativitas. Biasanya kreativitas dianggap sebagai hasil dari intuisi jenius dari individu yang terisolasi. Dalam gelombang ketiga, kreativitas adalah kemampuan menggabungkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah entitas baru. Konektivitas menjadi sumber kreatifitas.

Keempat pola pikir di atas perlu dimiliki individu dalam era gelombang ketiga. Tetapi, selain pola pikir di level individual, kita juga perlu memikirkan susunan struktur pada level kolektif terutama dua struktur utama kehidupan masyarakat yaitu struktur politik dan struktur ekonomi.

#### *Mindset Baru Gelombang Ketiga:*

- Arsitektural
- Fungsional
- Eksperimental
- Kreatif

### **Model Masyarakat Baru**

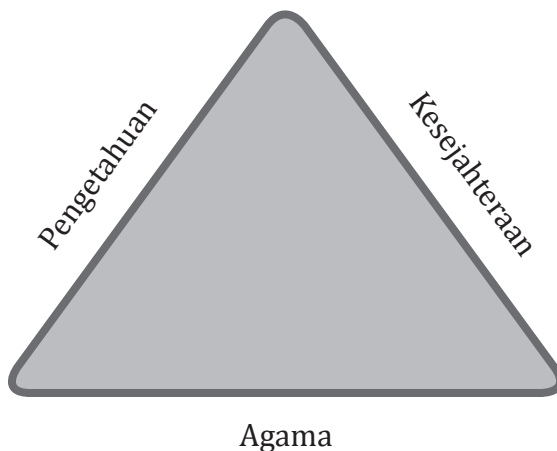
Sejarah mencatat perubahan demografi dan budaya biasanya mempunyai dampak bersifat struktural dan jangka panjang. Meningkatnya usia produktif melampaui penduduk non-produktif dalam waktu yang relatif panjang harus bisa menjadi *"tipping point"* Indonesia menuju negara yang sejahtera. Syaratnya, perubahan demografi ini tidak dibiarkan

berdiri sendiri, namun harus dikapitalisasi melalui sentuhan sains dan teknologi serta optimalisasi nilai ekonomi.

Bonus demografi yang terjadi ketika Indonesia mengalami proses demokratisasi adalah momentum langka yang harus dijaga. Bertemunya kesejahteraan (akibat produktivitas populasi) dengan kebebasan (sebagai buah demokratisasi) akan menempatkan Indonesia ke dalam jalur cepat kemajuan peradaban.

Perubahan budaya juga menggeser konfigurasi nilai-nilai yang dalam jangka panjang mempengaruhi cara pandang dan cara bertindak suatu masyarakat. Perubahan budaya melahirkan modal sosial baru yang mampu memfasilitasi kemajuan individu dan masyarakat.

Perubahan demografi dan budaya menghasilkan perubahan nilai-nilai sehingga kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya model masyarakat baru yang bersendikan agama, pengetahuan dan kesejahteraan. Agama memberi orientasi sementara pengetahuan menjadi pemberdaya (*enabler*). Kesejahteraan yang awalnya adalah hasil dari pengetahuan berubah menjadi faktor katalis agar masyarakat makin berkualitas hidupnya, termasuk dalam soal spiritual. Masyarakat Indonesia masa depan adalah masyarakat yang religius, berpengetahuan dan sejahtera.



## Asas Politik Baru

Dalam sistem demokrasi, kekuatan politik yang ada harus memperoleh legitimasi secara riil dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Legitimasi inilah yang selanjutnya menghasilkan kepercayaan (*trust*) dari rakyat kepada institusi politik. Pertanyaan yang penting di sini adalah bagaimana legitimasi ini dibangun. Dengan lain kata, kita harus memiliki alasan yang disepakati bersama tentang mengapa kita menerima dan menjalankan sistem demokrasi ini.

Biasanya, alasan menerima demokrasi berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat normatif. Alasan-alasan normatif ini berupa argumen pentingnya bagi kita untuk mengadopsi nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Tentunya nilai-nilai demokratis ini sudah menjadi keniscayaan. Tetapi, penerimaan nilai-nilai demokratis baru merupakan syarat perlu, belum syarat cukup, agar institusi politik memperoleh legitimasi penuh dari konstituen. Penerimaan nilai demokratis merupakan syarat perlu karena kita bisa melihatnya sebagai kesepakatan awal untuk menerima sistem demokrasi. Menerima nilai demokratis menjadi tanggung jawab seluruh warga negara agar kita memiliki basis yang sama sebagai modal awal. Meskipun pada kenyataannya penerimaan nilai demokratis ini bervariasi tingkatannya, sifatnya lebih kepada tuntutan kepada warga negara dari institusi politik. *'Anda ingin demokrasi berjalan? Terimalah nilai-nilai demokratis ini.'* Tapi itu saja tidak cukup. Agar legitimasi demokrasi utuh, kita harus melihat sisi sebaliknya, yaitu tuntutan warga negara kepada institusi politik.

Jika tuntutan institusi terhadap warga negara bersifat normatif, yaitu berupa penerimaan dan penerapan nilai-nilai demokratis, maka tuntutan warga negara terhadap institusi politik lebih bersifat praktis:

demokrasi harus mampu menghasilkan apa yang diinginkan dan baik bagi konstituennya. *'Democracy must work! Democracy must deliver!'* Tidak cukup menerima demokrasi hanya dengan alasan normatif, demokrasi perlu legitimasi praktis.

Tidak cukup menerima demokrasi hanya dengan alasan normatif, demokrasi perlu legitimasi praktis.

Legitimasi praktis ini dapat diraih jika politik dijalankan dengan dua asas utama, yaitu: asas faedah dan asas kapabilitas. Asas faedah berarti nilai suatu kebijakan politik tidak semata-mata dinilai dari landasan normatifnya melainkan dari dampaknya, baik dampak langsung maupun tidak langsung, pada kehidupan bangsa dan negara. Fokus pada faedah ini mengharuskan kita memperhitungkan secara serius realitas yang menjadi konteks untuk suatu kebijakan politik dan pemerintahan. Ini bukan berarti idealisme tunduk pada realitas. Justru sebaliknya, supaya kita yakin meraih idealisme maka kita perlu mengetahui dengan seksama apa-apa saja bagian dari realitas yang menghambat dan mendorong pewujudan suatu idealisme. Dengan demikian kita dapat mengambil tindakan yang tepat, mengikis penghambat dan menyokong pendorong idealisme kita. Sikap yang tunduk pada asas faedah ini merupakan sifat dewasa yang tidak hanya merasa puas dengan memiliki idealisme tetapi juga bekerja keras mewujudkan idealisme tersebut.

Asas faedah mensyaratkan kita mampu untuk menelaah realitas yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan politik pemerintahan. Pengetahuan tentang syarat dan konteks ini yang dimaksud dengan

asas kapabilitas. Asas kapabilitas menekankan pada pengalaman, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki subyek politik, baik secara intelektual maupun praktis dalam mengimplementasikan gagasannya. Inilah tulang punggung legitimasi politik berdasarkan kapabilitas.

Institusi politik dan pemerintahan pada era gelombang ketiga tidak dapat lagi mengandalkan otoritas semata. Otoritas tanpa legitimasi dari rakyat akan membuatnya menjadi macan ompong. Legitimasi pada era gelombang ketiga ini tidak bisa hanya berpaku pada nilai-nilai normatif, melainkan juga akan diukur berdasarkan asas faedah dan kapabilitas.

Legitimasi diraih melalui dua asas utama, yaitu: asas faedah dan asas kapabilitas. Asas faedah berarti nilai suatu kebijakan politik tidak semata-mata dinilai dari landasan normatifnya melainkan dari dampaknya, baik dampak langsung maupun tidak langsung, pada kehidupan bangsa dan negara. Asas kapabilitas menekankan pada kemampuan dalam mengimplementasi gagasannya.

### **Indonesia sebagai Entitas Peradaban**

Ekuilibrum baru yang tercipta pada gelombang ketiga memungkinkan Indonesia beranjak dari demokrasi yang semata prosedural menjadi demokrasi yang substansial. Itulah mengapa pematangan budaya



demokrasi menjadi agenda penting. Demokrasi prosedural baru dapat memastikan kepatuhan terhadap proses dengan harapan: prosedur yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Prosedur demokrasi baru bicara pada basis legitimasi sementara substansi demokrasi bicara kemanfaatan sebuah proses demokrasi bagi manusia. Karena itu, Indonesia perlu bertransformasi dari entitas politik menjadi entitas peradaban. Pelajaran kita dalam berdemokrasi dan berpolitik harus juga dikaitkan dengan pembelajaran kita dalam memajukan peradaban.

Indonesia harus bertransformasi dari entitas politik menjadi entitas peradaban. Pelajaran kita dalam berdemokrasi dan berpolitik harus juga dikaitkan dengan pembelajaran kita dalam memajukan peradaban.

Pada gelombang ketiga ini masyarakat menjadi aktor utama yang mengimbangi peran negara. Bahkan, masyarakat dalam skala global dapat mendesak gerak suatu negara, karena kenyataan keterhubungan (*connectedness*) semua pihak dalam satu planet yang stu.

Ambil contoh, isu perubahan iklim. Di ranah global sudah cukup lama kita mendengar wacana "*the limit to grow*" (batas untuk bertumbuh) dari para penggiat lingkungan sebagai kritik terhadap keserakahan kapitalisme dalam mengeruk isi bumi. Belakangan dunia dibuat terhenyak oleh realitas pemanasan global dan perubahan iklim yang mengakibatkan ongkos sangat mahal dan ketegangan baru. Dunia

berpikir, jika hutan di Kalimantan rusak, maka seluruh dunia akan menanggung akibat berkurangnya penyerapan karbon. Karena itu, penyelamatan hutan di Kalimantan bukan saja urusan orang Kalimantan, atau orang Indonesia, melainkan menjadi urusan semua orang di dunia. Ibarat tinggal dalam satu perahu, jika ada satu orang membuat lobang, semua penumpang akan tenggelam.

Pada level individu, terjadi transformasi konsep kewarganegaraan (*citizenship*) akibat kesalingterhubungan tadi. Dalam kasus persaingan tenaga kerja di ranah global, angkatan kerja dapat bergerak dari dan ke mana saja tanpa hambatan batas negara atau regulasi. Yang ada tinggal persaingan. Individu kini bergerak dari warga negara menjadi warga planet dengan kebutuhannya sendiri. Negara-bangsa hanyalah fasilitator interaksi global karena negara-bangsa sudah tidak lagi dapat memberikan perlindungan kepada individu. Yang ada, individu dari berbagai negara-bangsa bergandeng tangan sekaligus berkompetisi sebagai warga planet untuk mencapai kesejahteraan.

Dinamika tidak hanya terjadi di tingkat individu. Negara pun kini mulai menghimpun diri dalam lingkaran-lingkaran komunitas yang relatif lebih longgar dan egaliter ketimbang blok-blok ideologis pada Perang Dingin. Kita bisa belajar dari berayunnya pendulum Eropa. Eropa yang pernah menjadi satu imperium besar, kemudian pecah menjadi negara-bangsa berdasarkan ikatan primordial. Namun, untuk menyaingi Amerika Serikat dan China yang semakin besar dari segi ukuran, mereka kemudian menghimpun diri dalam suatu Masyarakat Ekonomi Eropa berubah menjadi Masyarakat Eropa dan kemudian bertransformasi menjadi Uni Eropa berdasarkan Perjanjian Maastricht pada 1992. Uni Eropa memiliki parlemen dan dewan yang menjadikan organisasi ini bersifat supranasional. Namun, harga mahal yang harus dibayar adalah ketika negara anggotanya mengalami krisis, yaitu Yunani dan Spanyol, kesatuan mata uang Euro telah membuat negara-negara lain yang relatif

sehat terpengaruh dan bahkan terseret ke dalam pusaran perlambatan ekonomi. Kita belum tahu akhir dari dialektika ini. Apakah masyarakat Eropa masih akan melihat Uni Eropa sebagai instrumen efektif, atau malah menjadi ikatan yang membebani dan mengganggu kepentingan nasional masing-masing negara.

Karena masyarakat terbentuk melintasi batas negara maka Indonesia pun harus melakukan transformasi dari entitas politik menjadi entitas peradaban. Skala yang dipikirkan bukan semata warga negara di dalam teritorinya, tetapi juga warga planet secara keseluruhan, bagaimana orang Indonesia sebagai warga planet dapat meraih keadilan dan kesejahteraan.

Lompatan menjadi entitas peradaban ini dimulai dengan utilisasi dan optimalisasi kekuatan budaya. Indonesia harus mulai berpikir seperti satu imperium dengan skala jangkauan dunia. Kita harus ikut melakukan *remapping the world* atau pemetaan kembali dunia dalam perspektif kepentingan nasional sehingga kita tahu posisi dan kekuatan kita sekarang. Dengan menjadi entitas peradaban, Indonesia akan melompat dari negara dengan pengaruh menengah dalam papan catur geopolitik dunia menjadi pemain arus utama yang ikut menata masalah umat manusia di planet ini.

\* \* \*

Demikianlah rangkuman catatan sebagai undangan diskusi terbuka mengenai Indonesia masa depan. Para pendiri bangsa ini pernah berdebat habis-habisan dan berkonsensus dalam merumuskan *strategic intent* menjadi bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928 dan cetak biru negara Indonesia lewat sidang-sidang

BPUPKI/ PPKI yang bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kini saatnya kita menghayati semangat dan menyegarkan konsensus tersebut dalam ikhtiar merancang Indonesia masa depan.

Saya sedang merencanakan sebuah situs internet dengan permainan (*game*) interaktif yang memungkinkan kita mendiskusikan fitur-fitur masyarakat gelombang ketiga dan bagaimana masyarakat baru ini dapat mencapai kesejahteraan. Sebagai “imigran teknologi”, saya sudah minta bantuan para sahabat muda “*native technology*” untuk mengembangkannya.

Seperti saya sebut di muka, saya juga masih ingin mengurai agenda Indonesia di masa depan secara lebih jelas dan terinci serta pendekatan strategisnya sehingga diskusi kita dapat menghasilkan sesuatu yang konkret. Dengan instrumen tersebut, *game* dan buku, mudah-mudahan diskusi kita menjadi bernas dan dianggap relevan dengan generasi gelombang ketiga selaku mayoritas baru di negeri ini.

Pada saat yang sama, saya menyadari buku ini masih banyak kekurangan. Mungkin hipotesis saya keliru atau proposisi saya tidak sempurna. Biarlah ketidaksempurnaan itu menjadi ruang bagi perbaikan lebih lanjut dalam sebuah perbincangan publik menghidupkan politik Indonesia. Biarlah buku ini menjadi sekedar noktah dalam kanvas besar bernama Indonesia.



# Epilog

**R**eformasi yang hingar-bingar itu sudah lima belas tahun berlalu. Kini kita memiliki generasi politik yang tidak lagi merasakan perbedaan situasi politik antara kondisi otoriter Orde Baru dengan suasana demokrasi sekarang. Mereka lahir antara tahun 1992-1997 dan akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 2014. Generasi ini juga tidak merasakan proses transisi yang begitu menegangkan dan melelahkan. Betapa tidak, pada hari-hari Reformasi itu, kita membaca berita tentang konflik berdarah di banyak tempat. Isu dukun santet di Banyuwangi sampai memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Itu semua karena kita berada dalam kerapuhan institusi negara di tengah transisi menuju demokrasi.

Mungkin generasi ini mirip dengan generasi saya yang tidak terlalu mengerti ketika kakek kita mengeluhkan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya ketika berjuang merebut kemerdekaan. Kesenjangan generasi akan terus terjadi karena itu adalah hukum alam. Namun, yang menjadi tantangan adalah, bagaimana menjembatani kesenjangan itu agar memicu lahirnya sinergi antar-generasi agar dapat merealisasikan potensi besar bangsa ini.

Sebagian proses konsolidasi demokrasi sudah berhasil kita jalankan. Karena itulah kita ingin melangkah ke aspek demokrasi yang lebih substansial, yang menempatkan manusia sebagai sentral dan orientasi, agar Indonesia dapat bertransformasi diri menjadi entitas peradaban, bukan sekedar entitas politik.

Seiring waktu berjalan saya bertemu dan berdialog dengan banyak pihak. Pada 2001 saya berkesempatan mengikuti pendidikan Kursus Singkat Angkatan ke-9 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), selain itu saya bertemu banyak kelompok dengan berbagai latar belakang ideologi. Pada rentang 2004-2009 saya intensif berdiskusi dengan kalangan militer dan pelaku bisnis. Ternyata kegelisahan saya, melihat ketegangan antara Islam (atau agama) dengan kemodernan dan keindonesiaan, bukan cuma kegelisahan saya sendiri melainkan juga menjadi kegelisahan banyak pihak. Indonesia hari ini adalah sintesis yang terus diuji dengan pertanyaan dari berbagai sudut pandang. Indonesia memang telah melewati ujian eksistensial terberatnya namun berapa kuat “syaraf” bangsa ini menanggung beban ketegangan psikologis itu?

Saya merasakan ketegangan yang sama ketika berdiskusi dengan para politisi dari negara-negara dunia Islam. Saya banyak diundang untuk berceramah, di Aljazair, Maroko, Kuwait, Mesir, Turki dan negara dunia Islam lainnya, untuk berbagi pengalaman Indonesia mengenai relasi Islam dan negara serta transisi menuju demokrasi. Salah satu masalah modernisasi di dunia Islam adalah benturan budaya yang belum sepenuhnya selesai. Basis keagamaan yang kental di satu masyarakat tidak dapat dicerabut begitu saja oleh modernisasi. Negara tidak dapat menyelesaikan benturan budaya ini dengan pendekatan struktural. Dalam hal relasi antara Islam dan negara, dari pengalaman banyak negara, ketegangan yang muncul malah berujung pada pertempuran yang merugikan kedua belah pihak (*lose-lose battle*).

Optimisme saya tumbuh ketika mengamati lahirnya mayoritas baru yang merupakan masyarakat di gelombang ketiga. Proses perjalanan sejarah dan interaksi sosial-budaya telah menempa bangsa ini menjadi bentuknya yang sekarang, berupa masyarakat yang ditopang oleh agama, pengetahuan dan kesejahteraan. Ketiga elemen itu tidaklah bersifat *mutually exclusive* dan tidak menafikan yang satu agar yang lain bisa hidup, melainkan dapat berpadu menjadi modal kemajuan.

Agama, dalam hal ini Islam, memberi orientasi berdasarkan nilai fundamental perdamaian dan keselamatan. Individu tidak perlu merasa terasing dan tercerabut dari akar eksistensinya karena ada agama yang akan memberinya arah. Pada tingkatan masyarakat, agama menjadi katalis kemajuan, dan bukan penghambat, karena adanya nilai-nilai universal tentang kewajiban menuntut ilmu, berkolaborasi, dan mengusahakan kesejahteraan.

Kemodernan, yang sempat dikhawatirkan menjadi proses pembaratan oleh banyak kalangan Islam,<sup>26</sup> ternyata malah menjadi proses meraih dan akumulasi pengetahuan yang membuat masyarakat makin berdaya dan mempunyai kapasitas untuk maju. Dengan kapasitas untuk maju itulah individu dan masyarakat dapat meraih kesejahteraan, bukan hanya dalam arti material, tetapi kesejahteraan sebagai pembentuk kualitas hidup.

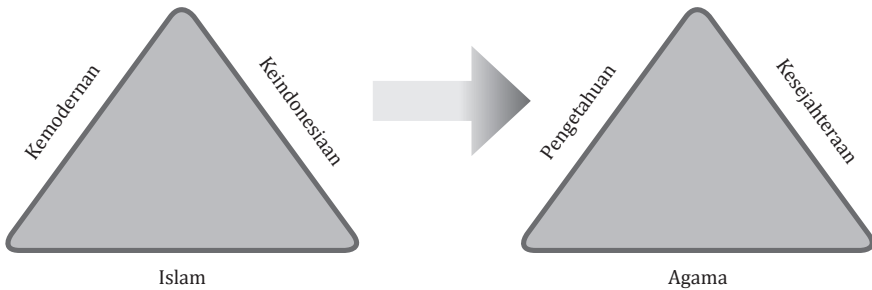
Konsensus dan hubungan yang lebih konstruktif antara agama dan negara pada gelombang ketiga ini membuat makna keindonesiaan makin hidup. Keindonesiaan bukan untuk dipertentangkan dengan keislaman; begitu juga keislaman tidak untuk dipertentangkan dengan kemodernan. Kemodernan merupakan hasil dan sekaligus

---

<sup>26</sup> Sejak 1970-an Cak Nur berpendapat bahwa: "modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi." Kalimat tersebut awalnya adalah judul artikel/ buku kecil yang kemudian diterbitkan kembali dalam kompilasi *Islam, Kemodernan & Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987).



pemicu perkembangan pengetahuan yang menjadi alat menghasilkan kesejahteraan. Hidup yang sejahtera adalah tujuan dan cita-cita Indonesia merdeka. Pengalaman sejarah Indonesia membuktikan dan fenomena gelombang ketiga semakin meyakinkan saya, bahwa ketiga hal tersebut adalah elemen yang produktif bagi kemajuan.



Pada malam menjelang 20 Mei 1998 yang direncanakan sebagai momentum pengerahan massa besar-besaran di Monas untuk medesak Presiden Soeharto turun, saya hanyalah salah seorang koordinator lapangan alias korlap yang berpikir sederhana. Pada waktu itu saya tidak membayangkan akan terlibat dalam jarak yang dekat dengan perubahan-perubahan besar di negeri ini. Saya bersyukur dengan anugerah berupa kesempatan dan pengalaman yang sangat membuka wawasan pengetahuan dan mata batin saya.

Saya sempat belajar di sekolah Katolik di Tual, Maluku Tenggara. Namanya SD Mathias. Hampir semua anak pedagang Bugis, Tionghoa, Arab dan lainnya bersekolah di situ. Mungkin motivasi para orang tua dari berbagai latar belakang etnis (dan agama) waktu itu rasional saja: SD tersebut adalah yang terbaik di situ. Kembali ke kampung di Welado, Bone, Sulawesi Selatan, saya bersekolah di SD Inpres dan sorenya mengaji di Madrasah As'adiyah. Baru ketika menginjak SMP-SMA saya

“mondok” di Pesantren Darul Arqam di Makassar. Tanpa saya sadari, saya sudah bersentuhan dengan banyak tradisi Islam di Indonesia, baik *Nahdliyin* maupun Muhammadiyah, dalam perjalanan pendidikan saya.

Pengalaman di pesantren menggelitik pemikiran saya betapa agama sempat memilih menghindari dari hingar-bingar kehidupan. Pesantren biasanya ada di pinggir kota, bahkan jauh masuk sampai ke dekat hutan. Pesantren jadi semacam isolasi sosial terhadap kehidupan dunia yang menggoda dan penuh dosa, semacam pelarian atas nama pemurnian jiwa. Namun, pada waktunya para “anak pondok” ini harus bertemu dengan kota yang bising, yang sempat dihindarinya. Di sinilah si anak pondok merasakan ketegangan antara agama dan kemodernan. Dulu ia melihat kemodernan dan gemerlap lampu kota dari jarak tertentu, tapi sekarang ia harus berada di tengah kota yang ramai itu.

Saya merasakan ketegangan itu sejak usia 15 tahun, seiring dengan pergulatan mencari identitas diri yang layaknya dilalui seorang anak remaja pada masa puber. Pergulatan pemikiran itu makin intens di usia 18-20 tahun karena, selain kuliah di jurusan syariah, saya mulai masuk ke lingkungan pergerakan Islam.

Ketika saya memimpin partai Islam, saya menemukan bahwa apa yang saya rasakan bukanlah ketegangan imajiner dalam kecamuk pikiran saya semata. Ketegangan itu tercermin dalam tarik menarik politik, terutama akibat warisan politik aliran yang sudah saya jelaskan di bagian prolog. Sekarang saatnya kita melangkah dan meninggalkan sisa-sisa politik aliran itu, karena kita berhadapan dengan masyarakat dengan tidak lagi terpaut dengan konflik dan polarisasi politik masa lalu. Apa yang dulu penting, jadi dirasa usang hari ini. Partai politik ditantang untuk membangun relevansi baru dengan publik. Jangan sampai apa yang didiskusikan partai politik di ruang tertutup tidak beresonansi dengan apa yang menjadi perbincangan masyarakat. Inilah

yang menjadi penyebab terputusnya koneksi antara partai politik dan masyarakat yang berujung pada apatisisme politik. Politik harus menjadi proses amplifikasi perbincangan masyarakat ke dalam sistem bernegara untuk dicari solusinya bagi kesejahteraan bersama.

Dari dialog tentang berapa jam perjalanan naik kereta dari Jakarta ke Makassar; ketegangan Islam, kemodernan dan keindonesiaan yang saya geluti sebagai seorang aktivis dakwah hingga masuk ke politik; hingga perubahan besar demografi yang membuka datangnya gelombang ketiga, semua itu mengantarkan saya pada kesimpulan bahwa saya optimis menatap masa depan Indonesia. Ketegangan Islam, kemodernan dan keindonesiaan mulai terjawab oleh “segitiga” lainnya yang bersendikan agama, pengetahuan dan kesejahteraan yang merupakan karakteristik masyarakat gelombang ketiga.

Kini, kerja keras kita harus difokuskan untuk mentransformasikan Indonesia menjadi entitas peradaban sehingga kita dapat menjadi kekuatan arus utama yang ikut berperan menata masalah umat manusia di muka bumi ini. Insya Allah.

## Pustaka

- Acemoglu, Daron & James A. Robinson. *Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty* (London: Profile Books, 2012).
- Corfe, Robert. *The Future of Politics – with the demise of the left/right confrontational system* (London: Arena Books, 2010).
- Elson, R.E. *The Idea of Indonesia: A History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism* (New York: Cornell Paperbacks, 2008).
- Hefner, Robert W. (terj.). *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).
- Hidayat, Komaruddin & Ahmad Gaus AF (ed). *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1983 [1974]).
- Kristanto, J.B. (ed). *Seribu Tahun Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2000).

Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan & Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987).

Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, 2004).

Uhlen, Anders. (terj.) *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

Yustika, Ahmad Erani. "Kapabilitas Sosial Negara" (*Kompas*, 4 Desember 2013).

## Ucapan Terima Kasih

**B**uku ini merupakan kumpulan dari catatan dan renungan yang mulanya terserak di sana-sini sejak cukup lama. Saya menikmati membaca atau mengajar manajemen organisasi, strategi, ataupun pengembangan manusia. Saya juga kerap mendapati pengalaman dan perdebatan yang menarik ketika berceramah, mulai di kampung, di kampus atau di mesjid perkantoran. Namun, tugas sebagai pimpinan partai dan kemudian pimpinan DPR RI membuat saya larut dalam rutinitas pekerjaan sehingga kegemaran membaca, mengajar dan mencatat tersebut agak terbengkalai. Karena itu saya sangat bersyukur karena akhirnya buku ini bisa sampai ke hadapan pembaca yang budiman berkat dukungan banyak pihak.

Terima kasih saya ucapkan kepada sejumlah sahabat yang telah mendukung hingga terwujudnya buku ini:

- Taufik Ridlo, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Ahmad Zainuddin, Zairoffi, Riko Desendra, Haris Yuliana, Hersubeno Arief yang telah menjadi teman diskusi.
- M. Qodari, MA, Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D., Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang membuka wawasan dengan diskusi-diskusi yang mencerahkan.

- Dadi Krismatono yang telah mengumpulkan dan menyunting catatan awal saya menjadi draft buku serta melakukan studi pustaka.
- Keluarga yang telah mendukung di dalam bekerja selama ini.

Terima kasih kepada The Future Institute yang telah mengelola penerbitan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah pemikiran politik di Indonesia.

## Tentang Penulis

**Anis Matta**, lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968, adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak diangkat pada 1 Februari 2013. Sebelumnya, ia adalah sekretaris jenderal partai tersebut sejak berdiri dengan nama Partai Keadilan pada 1998.

Anis menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Pada periode pertama ia berkeliling dari Komisi I (luar negeri, pertahanan, intelijen & informasi), Komisi XI (ekonomi, keuangan, perbankan) hingga Komisi III (hukum & HAM). Pada periode kedua, ia menjadi Wakil Ketua DPR RI yang mengoordinasi bidang ekonomi dan keuangan. Anis mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR RI menyusul pengangkatannya sebagai presiden partai.

Anis merampungkan pendidikan S-1 jurusan syariah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta, pada 1992. Ia pernah mengajar sebagai dosen agama Islam di Program Ekstension FE Universitas Indonesia. Pada tahun 2000, ia diundang menjadi peserta program pemimpin muda oleh American Council for Young Political Leader (ACYPL) di Amerika Serikat lalu mengikuti pendidikan di Kursus Singkat Angkatan ke-9 Lemhanas (2001).







# Indeks

## A

A.A. Maramis 42  
 abad Asia 79, 80, 85, 92  
*Abadi* 53  
 Abdul Kahar Muzakir 42  
 Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  
 7, 57  
 Abikusno Tjokrosujoso 42  
 Abu Bakar Al Habsy 5  
 Abu Ridho 5  
 Aceh 35, 57, 58, 60  
 Nangroe Aceh Darussalam 57  
 Achmad Rilyadi 5  
 Achmad Subardjo 42  
 Afghanistan 61  
 Afrika 2, 60  
 Agus Salim 42  
 Ahmad Erani Yustika 86  
 Aljazair 5, 112  
 Al Muzzamil Yusuf 5  
 Al-Nahda (Tunisia) 5  
 Alvin Toffler 19  
 Amerika Latin 19  
 Amerika Serikat 2, 10, 60, 107, 121  
 Ambon 10, 26, 38, 59  
 Amien Rais 7  
 Anders Uhlin 7

APBN (Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Negara) 59, 68, 87

## Arab

keturunan 31  
 pedagang 34  
 Arab Saudi 2  
 Arab Spring 80  
 A.R. Baswedan 31  
 asas tunggal 2, 45, 46  
 Asia 23, 39, 60  
 Asia Oceania 61  
 Asia Tenggara 38  
 Asian Games 1962 62

## B

Babinsa (Bintara Pembina Desa)  
 43, 57  
 Badan Pusat Statistik (BPS) 71  
 “Balkanisasi” 64  
 Bank Dunia 48  
 Banyuwangi 66, 111  
 Belanda  
 imperialisme 24  
 penjajah 24, 42  
 pemerintah kolonial 25, 34, 36  
 Benedict Anderson 35  
 Boedi Oetomo 36

Bone (Sulawesi Selatan) 1, 61, 64  
 bonus demografi 72  
 Bosnia 5  
 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-  
 Usaha Persiapan Kemerdekaan  
 Indonesia) 31, 32, 42, 62, 109  
 Bulgaria 61  
 “bunuh diri kelas” 31

## C

Cekoslowakia 63  
 CGI (Consultative Group on  
 Indonesia) 63  
 Celebes 10, 24, 26, 38  
 Cina/ China 36, 61, 80, 107  
 “collective mind” 27, 40, 92  
 Cut Nyak Dien 34

## D

Daerah Operasi Militer (DOM) 57  
 Dana Alokasi Khusus 57  
 Dana Perimbangan 57  
 Daren Acemoglu 50  
 David McLelland 85  
 Deliar Noer 5  
 Demak (kerajaan) 34  
 Dewan Pers 56  
 dividen demografi 72-73, 78  
 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)  
 8, 12, 47, 49, 52, 74, 119 121  
 Duta Masyarakat 53  
 Dwi Fungsi ABRI 47

## E

“ekonomi sebagai panglima” 48,  
 94  
*electoral threshold* 9  
 Ernest Gellner 27

Eropa 39, 60, 63, 95, 107  
 Masyarakat Ekonomi Eropa 107  
 Masyarakat Eropa 107  
 Uni Eropa 107  
 Euro (mata uang) 107

## F

Facebook 81  
 FIS (*Front Islamique du Salut*),  
 Aljazair 5  
 Frans Mendur 40

## G

G-30-S 43,44,60  
 Gajah Mada 23  
 GANEFO (*Games of the New  
 Emerging Forces*) 62  
 George McTurnan Kahin 35  
 generasi X 81  
 generasi Y 81  
 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 57  
 Gerakan Non-Blok 38  
 Golongan Karya 44-46, 53  
 Partai Golkar 7, 8

## H

Habibie (Bacharuddin Jusuf) 7, 8  
*Harian Rakyat* 53  
 Hatta (Mohammad) 42, 62  
 Hidayat Nur Wahid 6  
 Hinda Belanda 24, 26, 28  
 Hindia Timur 24  
 Hiroshima 60  
 HMI Majelis Penyelamat  
 Organisasi (HMI MPO) 46  
 Hoa Kiauw 32  
 HOS Cokroaminoto 35, 57

**I**

IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) 63  
 Ignas Kleden 8, 54  
 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 4, 46  
 India 80  
 Indische Vereeniging 25  
 Inggris 31, 61, 95, 96  
 "Insulinde" 24  
 Iskandar Alisjahbana 19  
 "Islam politik" 9, 62

**J**

Jakarta 1, 25, 62, 74, 116  
 James A. Robinson 50  
 Jawa 1, 3, 10, 24, 21, 36, 38  
 Jeda Kemanusiaan 57  
 Jepang 2, 32, 60  
 Jerman 60  
 Jerman Timur 61  
 John Naisbitt 19

**K**

Kalimantan 60, 107  
 Kaliwungu (Semarang) 37  
 Kasman Singodimedjo 42  
 Kedungombo 46, 48  
 kelas menengah 4, 46, 47, 55, 71, 72  
 kelas menengah santri 46  
 KH Ahmad Dahlan 62  
 Ki Bagus Hadikusumo 42  
 Koentjaraningrat 97-98  
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 8  
 Komunisme 5, 60, 64  
 Komunisme Internasional (Komintern) 62

Konferensi Asia Afrika 38, 62  
 konflik elite 60  
 konflik horizontal 59  
 konflik vertikal 59  
 Konstituante 59  
 Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) 57  
 krisis moneter 1997 6, 50, 64, 74  
 Kuwait 112

**L**

Laos 61  
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) 1, 2, 121  
 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 112, 121  
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 8, 49, 50, 53, 54, 78  
 Liem Koen Hian 31-32  
 Liga Bangsa Bangsa 61  
*lingua franca* 38  
 "Lir-ilir" 34  
 Los Angeles (Olimpiade Musim Panas 1984) 61

**M**

Madrasah As'adiyah 114  
 "mafia Berkeley" 48  
 Majapahit 23, 24  
 Makassar 1, 2, 34, 116  
 Malaka 24  
 Maluku 24  
 Marhaenisme 62  
 Maroko 112  
 Marsinah 48  
 Marxis 16  
 Mashadi  
 Masjid Al Azhar, Jakarta 5

Maslow (Abraham) 73  
 Masyumi 6, 9, 53  
 Megawati Soekarnoputri 7, 8  
 Mekkah 62  
 Melayu 26  
     Melayu Pasar (bahasa) 26  
 Mesir 112  
*Millenials* 81  
 Mochtar Lubis 97-98  
 Monas 114  
 Mongolia 6  
 Moskow (Olimpiade Musim Panas 1980) 61  
 Muhammadiyah 33, 46, 52, 62, 115

## N

Nagasaki 60  
 Nahdlatul Ulama 33, 44, 52  
 Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) 62  
 nasionalisme 25-30, 35, 42, 64  
     nasionalisme-religius 36  
     nasionalisme-sekuler 36  
*"native democracy"* 36  
 Natsir (Mohammad) 35-36  
*Need of Achievement* 85  
 Negara Islam Indonesia (NII) 60  
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 57  
 negara kesejahteraan (*welfare state*) 94  
 Negara Pasundan 60  
 Nipah 48  
*Non-Government Organization* 49  
 Nurcholish Madjid (Cak Nur) 3, 35, 113  
 Nur Mahmudi Ismail 6

## O

Orde Baru 5, 6, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 66, 73, 74, 77, 78, 81, 94, 111  
 Orde Lama 42, 44, 48, 56, 67, 77, 94  
 Oligarki 50, 51  
 Organisasi Non-Pemerintah 49  
 otonomi khusus 57

## P

Palestina 5  
 Pancasila 44, 46, 47, 66, 92  
 Pangeran Diponegoro 34  
 Papua 57-58  
     Majelis Rakyat Papua 57  
 Paris Club 63  
 Partai Arab Indonesia 31  
 Partai Bulan Bintang (PBB) 8, 9  
 Partai Bintang Reformasi (PBR) 9  
 Partai Demokrasi Indonesia 45  
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan 2, 7, 11  
 Partai Demokrat 9  
 Partai Katolik 45  
 Partai Komunis Indonesia (PKI) 43, 62  
 Partai Kristen Indonesia 45  
 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 45  
 Partai Keadilan 6  
 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8, 121  
 Partai Murba 6, 45, 62  
 Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 44, 45

Partai Nasional Indonesia (PNI) 6,  
44, 45  
PNI-Supeni 6  
PNI Front Marhaenis 6  
Partai Persatuan Pembangunan  
(PPP) 8, 45  
Partai Syarikat Islam Indonesia  
(PSII) 45  
Partai Tionghoa 32  
Pedoman Penghayatan  
Pengamalan Pancasila (P-4) 45  
pemilu 1955 6, 53, 62  
pemilu 1971 44, 53  
Perancis 64  
Perang Dingin 60, 61, 64, 69, 92,  
107  
Perang Dunia II 41, 60  
Perang Padri 34  
"Perang Sabil" 35  
Perang Teluk 5  
Perhimpunan Indonesia 25  
peristiwa Semanggi 8  
peristiwa Tanjung Priok 3, 45  
Perjanjian Helsinki 57  
Perjanjian Maastricht 107  
Permesta (Perjuangan Rakyat  
Semesta) 56  
Persatuan Arab Indonesia 31  
Persatuan Tarbiyah Islamiyah  
(Perti) 45  
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  
61  
Dewan Keamanan PBB 61  
Perundingan Renville 32  
pesantren 2, 35, 115  
Piagam Jakarta 43  
politik aliran 6, 9, 11, 115

"politik sebagai panglima" 48, 77,  
94  
Poros Tengah 7  
Portugal 61  
PPKI (Panitia Persiapan  
Kemerdekaan Indonesia) 31, 42,  
62, 109  
PRRI (Pemerintahan Revolusioner  
Republik Indonesia) 56  
Poso 59  
proklamasi kemerdekaan 17  
Agustus 1945 38, 40, 93, 109  
proto-nasionalisme 35  
*public engagement* 90

## R

Raden Patah 34  
Rancamaya 48  
Rasio Ketergantungan  
(*Dependency Ratio*) 72, 78  
R. E. Elson 24  
Reformasi 6, 8, 20, 42, 45, 47, 50,  
52, 54, 57, 58, 63, 66, 69, 74, 78,  
94, 111  
Republik Indonesia Serikat (RIS)  
60  
Robert Corfe 55  
Robert W. Hefner 47  
Rumania 63

## S

Sampit 8, 59, 66  
Samudra Pasai 34  
Samuel Huntington 19  
Sarekat Islam 36, 37  
Sarekat Dagang Islam 36  
Semarang 31, 37

Sidang Umum MPR 7  
 Sjahrir 62  
*social media* 72, 75, 79, 86-88  
 Soeharto 5, 47, 50, 69, 114  
 Soekarno 36, 38, 42, 62, 66, 69  
 sosialisme 42, 62, 62, 95  
 Spanyol 107  
 Sriwijaya 23  
 Studi Informasi Dunia Islam  
   Kontemporer (SIDIK) 5  
*Suara Karya* 53  
 Sultan Baabullah 34  
 Sultan Hasanuddin 34  
*Suluh Indonesia* 53  
 Sumatra 24  
 Sumatra Barat 34, 56  
 Sumpah Palapa 23  
 Sumpah Pemuda 10, 32, 38, 108  
 Sumpah Pemuda Keturunan Arab  
   31  
 Sunan Bonang 34  
 Sunan Kalijaga 34  
 Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers  
   (SIUPP) 54  
 Syarikat Islam 6  
 suku, agama, ras, antar-golongan  
   (SARA) 59

## T

*"Tamba Ati"* (Obat Hati) 34  
 Tan Malaka 61  
 tarbiyah 4  
 Tembok Berlin 5, 61, 63, 74  
 Tentara Nasional Indonesia (TNI)  
   43, 51, 57, 59  
 Ternate 34  
*The Third Wave* 19

Timor Timur 7, 61  
 Tim Sembilan BPUPKI 42  
 Timur Tengah 80  
 Tionghoa 31, 32, 114  
 Tiongkok 34  
 Trilogi Pembangunan 69  
 Trisakti Soekarno 69  
 Tritura 44  
 Tropenmuseum, Koninklijk  
   Instituut voor de Tropen (KIT)  
   37  
 tsunami (Aceh) 57  
 Tual (Maluku Tenggara) 1, 114  
 Turki 112  
 "tujuh setan desa" 43  
 Twitter 15, 87

## U

Uni Soviet 5, 60, 61, 63, 74  
 Universitas Imam Muhammad bin  
   Saud (Riyadh) 2

## W

Wahid Hasyim 42  
 Welado (Bone, Sulawesi Selatan)  
   114  
 Wikipedia 31, 32, 37, 40, 53, 63

## Y

Yamin (Muhammad) 42  
 Yogyakarta 62  
 Yugoslavia 5, 63  
 Yunani 107

## Z

*zeitgeist* 21, 42



**B**uku ini merupakan perpaduan antara analisis dan perenungan. Anis Matta adalah aktivis dakwah yang bertransformasi menjadi politikus, seiring transformasi komunitas dakwah menjadi partai politik pasca-Reformasi 1998. Dua hal ini yang menjadikan buku ini mengandung gagasan yang segar, cara pembacaan realitas yang baru, dan introspeksi yang jernih.

Anis membagi perjalanan sejarah Indonesia menjadi beberapa gelombang, dengan karakteristiknya masing-masing. Kini kita berada di awal gelombang ketiga, ketika terjadi perubahan demografi yang akan mengubah lanskap politik Indonesia. Penduduk Indonesia yang makin muda, makin berpendidikan, makin sejahtera dan makin terkoneksi dengan dunia luar melalui internet adalah “warga negara baru” yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan dan komunikasi politik yang baru pula.

Buku ini menawarkan perspektif baru dalam membaca perjalanan sejarah seraya menyebarkan optimisme dalam memandang masa depan.



**The Future Institute**

[www.thefutureinstitute.net](http://www.thefutureinstitute.net)

ISBN 978-602-14111-1-7



9 786021 411117